

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

BPJS MEMBEBANI RAKYAT

NATO:
Aliansi Jahat

Keluarga
Bahagia dan
Sehat **Tanpa**
Asuransi

dr. Fuad A. Rahman:
Negara Lepas
Tanggung Jawab



AGENDA DAKWAH



Surabaya - Seusai shalat Jumat [29/11] massa berdatangan memadati Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi rumah dinas Gubernur Jatim. Massa hendak menyuarakan desakannya untuk memproses hukum BuSukma yang telah menistakan Nabi Muhammad saw. Perwakilan massa diajak memasuki Gedung Grahadi sayap kanan difasilitasi intelkam Polrestabes Surabaya.



Malang. "Salah satu warisan Rasulullah adalah Khilafah. Maka ajaran khilafah itu jangan dipersekusi dengan isu radikalisme atau terorisme. Justru sebaiknya kita turut memperjuangkan dan mendakwahnya", tegas Ust. Azizi Fathoni, S.Pd., Mudir Kuttab Tahfidz Al Utrujah Kota Malang dalam ta'lim Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. 1441 H di Masjid Al Hidayah Kota Malang, pada Ahad ba'da subuh [24/11].



Banjor. Ratusan umat Islam Kota Banjar yang tergabung dalam Aliansi Muslim Kota Banjar (Almutabar) mengadakan Aksi Bela Nabi pada hari Jumat [29/11] di halaman Polres Kota Banjar. Aksi ini menuntut agar Sukmawati yang telah menghina Nabi dan Al-Quran untuk segera diadili dan dihukum.



Bogor. Sabtu [14/12], Majelis Darul Fikri (MDF) Al-Islamy menyelenggarakan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1441H, bertempat di lapangan bola samping Majelis MDF Al-Islamy Kemang – Kabupaten Bogor. Maulid Akbar kali ini mengambil tema "Meneladani Rasulullah Wujud Rindu dan Cinta KEPADANYA".



Bekasi. Ahad [8/12] berlangsung Multaqa Ulama Aswaja Bekasi yang dihadiri lebih dari 40 alim ulama, kiai dan ustaz di Pondok Pesantren Tamrinus-Shibyan, Cikarang Bekasi, dengan mengambil tema "Kriminalisasi Khilafah sebagai Ajaran Islam dan Penghinaan Baginda Nabi Muhammad saw".

Negara Lepas Tanggung Jawab

BPJS jelas bukan lembaga penjamin pelayanan kesehatan masyarakat. BPJS lebih mirip lembaga pemalak rakyat. Pasalnya, rakyat dipaksa menjadi anggotanya, sekaligus dipaksa membayar iuran setiap bulannya. Tak bisa menolak. Jika menolak, dikenai sanksi berat. Selain itu keberadaan BPJS hanyalah bentuk lepas tanggung jawab Pemerintah dari mengurus pelayanan kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma.

NATO: Aliansi Jahat

NATO, yang dipimpin AS, sesungguhnya aliansi jahat. Kejahatannya banyak. Di antaranya mengintervensi banyak negara. Khususnya di Dunia Islam. Kasus pendudukan Irak pada masa lalu hanyalah salah satunya. Karena itu tentu aneh jika Turki, yang merupakan salah satu negeri Islam, terlibat dan menjadi anggota dalam aliansi jahat tersebut.

Keluarga Bahagia dan Sehat Tanpa Asuransi

Jika hidup sehat dan bahagia, sebetulnya setiap keluarga tak perlu asuransi, termasuk BPJS. Apalagi asuransi dengan aneka ragamnya, juga BPJS, sudah jelas keharamannya. Islam tentu saja agama yang sangat memperhatikan aspek kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Islam pun menekankan bahwa negara wajib menjamin pelayanan kesehatan rakyatnya, dan tidak boleh membiarkan mereka dalam keadaan sengsara.

<i>Pengantar</i>	2	<i>Catatan Dakwah: Kemalisme</i>	43
<i>Dari Redaksi: Wajib Membela Muslim Uighur</i> ..	3	<i>Hiwar dr. Fuad A. Rahman: Negara Lepas Tanggung Jawab</i>	46
<i>Opini</i>	5	<i>Nafsiyyah: Menjaga Umat Dari Lisan Yang Sesat-Menyesatkan</i>	51
<i>Muhasabah: Radikal Islami Vs Radikal Sekular</i> ..	7	<i>Ibrah: Hari Kiamat</i>	54
<i>Fokus: BPJS Membebani Rakyat!</i>	9	<i>Afkar: Ulama: Penunjuk Dan Penentu Kebaikan Umat(1)</i>	56
<i>Analisis: BPJS VS Jaminan Kesehatan Islam</i> ..	14	<i>Siyasah Dakwah: Pelayanan Kesehatan Dalam Sejarah Khilafah</i>	61
<i>Tafsir: Seruan Kepada Rasulullah saw. Pada Awal Kenabian (Bagian 1)</i>	18	<i>Soal Jawab: Bolehkah Menghapus Ajaran Islam?</i> ..	65
<i>Iqtishadiyah: Kritik Atas Konsep Kelangkaan Dalam Ekonomi Kapitalisme</i>	23	<i>Nisa: Jaminan Sejati Perempuan Ada Pada Islam</i>	68
<i>Telaah Kitab: Problem Asasi Ekonomi</i>	27	<i>Takrifat: Studi Kebahasaan</i>	71
<i>Fikih: Bolehkah Berperkara Di Pengadilan Darul Kufur?</i>	33	<i>Hadis Pilihan: Kebolehan Berburu</i>	74
<i>Baiti Jannati: Keluarga Bahagia Dan Sehat Tanpa Asuransi</i>	35	<i>Dunia Islam: NATO: Aliansi Jahat</i>	76
<i>Atsar 6 Fakta Tentang Perang Badar</i>	38	<i>Tarikh: Sifat Dan Karakter Pemimpin Pada Masa KHilafah (Bagian 1)</i>	78
<i>Lintas Dunia</i>	40		

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, BPJS (Kesehatan) adalah lembaga gagal. Gagal menjamin layanan kesehatan masyarakat. Ini tentu kontradiksi dengan namanya: *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Terlalu banyak persoalan yang membelit BPJS. Defisit yang terus membengkak. Mencapai puluhan triliun rupiah. Pelayanan kepada masyarakat yang makin minimal. Iuran (premi) yang makin membebani masyarakat. Sanksi yang makin diperluas bagi siapa saja yang tidak mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS, seperti tidak mendapatkan layanan publik (Pengurusan KTP, SIM, STNK, Surat Nikah, dll). Utang BPJS ke pihak ketiga (rumah sakit dan mitra lain) yang makin membengkak hingga mengakibatkan sebagian rumah sakit bangkrut. Juga seabrek persoalan lain.

Mengapa BPJS kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penjamin layanan sosial, khususnya kesehatan? Tentu saja demikian. Sebabnya, sejak awal BPJS adalah lembaga yang dijadikan oleh Pemerintah sebagai pelarian dari tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan warganya. BPJS justru merupakan lembaga legal yang berupaya memindahkan tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin layanan kesehatan rakyat kepada rakyat sendiri. Dengan itulah Pemerintah sukses melepaskan tanggung jawabnya atas nasib rakyat, khususnya di bidang layanan kesehatan. Inilah sebetulnya akar persoalan BPJS.

BPJS mungkin memang merupakan lembaga nirlaba. Paling tidak menurut UU. Artinya, BPJS tidak ambil untung. Sayangnya, BPJS juga sekaligus merupakan lembaga nirsosial dan nirkemanusiaan. Hanya “menjamin” layanan kesehatan para anggotanya. Bukan seluruh rakyat. Itu pun dengan layanan paling minimal dan yang pasti dengan biaya bukan dari BPJS sendiri, tetapi dari iuran (premi) para anggotanya. Iurannya pun terus mengalami kenaikan sehingga makin memberatkan para anggotanya.

Karena itu selama paradigma Pemerintah tidak berubah, BPJS akan terus membebani masyarakat. Paradigma seharusnya, Pemerintah adalah pengurus dan pelayan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sebab kesehatan adalah di antara hak dasar setiap warga negara. Tidak boleh dialihkan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Menara 165,

Lt-4, Jl. TB

Simatupang

Kav-1 Cilandak Timur,

Jakarta Selatan.. e-

mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).



WAJIB MEMBELA MUSLIM UIGHUR

Sebagaimana dilansir oleh *bbc.com* (24/11/2019), sejumlah dokumen rahasia Pemerintah Cina dibocorkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (*International Consortium of Investigative Journalists* - ICIJ), yang bekerjasama dengan 17 mitra media, termasuk *BBC Panorama* dan Surat Kabar *The Guardian* Inggris. Di antara dokumen itu adalah memo sembilan halaman yang dikirim pada tahun 2017 oleh Zhu Hailun, yang saat itu menjabat wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan merupakan pejabat keamanan tertinggi di kawasan tersebut, kepada para pengelola kamp.

Metro.co.uk (8/10/2019) melansir, wanita Muslim di kamp-kamp penjara Tiongkok menjadi sasaran pemerkosaan sistematis, sterilisasi dan aborsi paksa, kata para korban. Para pelarian yang membawa pengungsi ke luar negeri kini berbagi kisah hidup mereka di dalam pusat-pusat penahanan Xinjiang. PBB mengatakan lebih dari 1.000.000 et

Radio Free Asia-RFA (3/8/2017) melaporkan, Pemerintah Cina mengubah masjid menjadi pusat propaganda. Masjid harus mengibarkan bendera Cina dan memasang slogan partai seperti "Cintai Partai (Komunis), Cintai Negara". Shalat kini harus didahului dengan upacara bendera, menyanyikan lagu partai dan kuliah tentang patriotisme.

Koran The Sun (29/9/2017) dan *Radio Free Asia* (27/9/2017) memberitakan, polisi Cina menyuruh kaum Muslim Uighur menyerahkan sajadah, semua *copy* al-Quran dan benda-benda yang mengandung simbol Islam. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman yang keras.

Aljazeera (17/1/2018) dan *Reuters* memberitakan, Cina melarang anak-anak belajar al-Quran dan ikut dalam kegiatan keislaman.

Bloomberg (27/4/2017) memberitakan, Pemerintah Cina melarang daftar nama islami, termasuk Muhammad, sebagai bagian kampanye untuk mencairkan pengaruh agama di dalam kehidupan.

Asia Times (29/5/2018) melansir, Pemerintah Cina menikahkan paksa Muslimah Uighur dengan laki-laki Han yang kafir. Kelompok HAM menyatakan, Pemerintah Cina melakukan penghapusan ras (*racial cleansing*), menarget Muslim Uighur, dengan dalih inklusi budaya dan asimilasi.

The Guardian (18/1/2018) melaporkan, Cina mengujicoba penggunaan kamera untuk mengenali wajah. *Human Right Watch* -HRW- (1/5/2019) menurunkan laporan penggunaan kamera itu dengan judul, "*Chinas Algorithms of Repression* -Algoritma Represi China".

Human Right Watch (HRW) dalam



laporannya (1/5/2019) menyatakan, sejak akhir 2016, Pemerintah Cina telah menundukkan 13 juta etnis Uyghur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang untuk penahanan sewenang-wenang massal, indoktrinasi politik paksa, pembatasan pergerakan dan penindasan agama. Perkiraan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa di bawah penindasan yang meningkat ini, hingga satu juta orang ditahan di kamp “pendidikan politik”.

Semua itu barulah sebagian dari fakta yang terungkap. Tak terbantahkan bahwa tengah terjadi persekusi dan penindasan dalam aneka bentuk terhadap kaum Muslim Uighur di Turkistan Timur yang oleh Cina disebut Xinjiang. Fakta sesungguhnya sangat mungkin jauh-jauh lebih besar dan mengerikan dari semua yang terungkap itu.

Menyikapi semua itu, kaum Muslim, terutama para penguasa, wajib menunjukkan pembelaan riil. Sebab, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw., *“Perumpamaan kaum Mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan dengan berjaga atau merasakan demam.”* (HR Muslim).

Apalagi Allah SWT berfirman (yang artinya): *Jika mereka (kaum Muslim yang tidak bisa berhijrah dan ada di darul kufur) meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan pembelaan) agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan* (TQS al-Anfal [8]: 72).

Rasulullah saw dan para Khalifah telah memberikan teladan. Rasulullah saw., dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, langsung mengerahkan pasukan untuk membela Muslimah yang auratnya disingkap oleh orang Yahudi Bani Qainuqa. Khalifah Harun ar-Rasyid mengerahkan pasukan untuk menindak Nakfur yang melecehkan seorang Muslimah. Ujung pasukannya telah tiba di tempat Nakfur Romawi, sementara ekornya masih di ibukota Khilafah.

Begitu juga Khalifah al-Mutasim Billah. Ia segera memenuhi jeritan permintaan tolong seorang Muslimah yang dilecehkan di Amuriah hingga berujung pembebasan Amuriah.

Sayang, para penguasa tidak berbuat apa-apa. Sekadar kecaman saja tidak keluar dari mereka. Ikatan iman dan ukhuwah islamiyah yang mengharuskan pembelaan kepada Muslim Uighur dikalahkan oleh ikatan nasionalisme yang bercokol dalam diri para penguasa itu. Mereka menganggap urusan Muslim Uighur bukan urusan mereka, melainkan urusan dalam negeri Cina. Atas dalih “tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara lain,” mereka bungkam dan tidak berbuat apa-apa. Kalaupun keluar kecaman, itu pun setelah didesak oleh umat Islam. Sungguh benar ketika Rasul saw mensifati ikatan *ashabiyah* termasuk nasionalisme sebagai hal busuk dan harus ditinggalkan.

Sebagian lagi jadi berdiam diri bahkan membisu setelah ada gelontoran utang, investasi atau bantuan dari Cina. Bahkan kalimat puja-puji dan pembelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Cina atas kaum Muslim di Xinjiang meluncur dari mereka.

Kenyataan itu makin menegaskan bahwa Umat Islam sangat memerlukan hadirnya sosok penguasa, seorang imam/khalifah, yang akan bertindak menjaga kemuliaan Islam dan melindungi kaum Muslim. Sebagaimana sabda Rasul saw.: *“Sesungguhnya seorang imam/khalifah itu laksana perisai, rakyat (kaum Muslim) berperang di belakangnya dan menjadikan dia pelindung.”* (HR al-Bukhari, Muslim dan an-Nasai).

Karena itu, pembelaan kepada kaum Muslim Uighur dan di tempat lainnya harus disempurnakan dengan melakukan perjuangan untuk merealisasi adanya imam/khalifah itu di tengah-tengah umat Islam.

Wallâh alam bi ash-shawâb. [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Sengkarut Problem Ekonomi Kita

M. Firdaus
(Direktur
FORKEI)

Indonesia, meski termasuk negara dengan segala kekayaan alam yang melimpah-ruah, hingga hari ini terus dililit persoalan ekonomi yang kompleks dan

makin karut-marut. Akibatnya, meski termasuk negeri kaya-raya, kebanyakan rakyatnya miskin.

Problem ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari mahalnya harga kebutuhan bahan pokok, biaya tinggi pendidikan dan kesehatan, kenaikan TDL, mahalnya tarif tol dan harga BBM yang makin memperparah kondisi ekonomi rakyat. Persoalan lain adalah utang Pemerintah yang terus membengkak. Tingginya kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi, suap dan lain sebagainya. Yang paling parah adalah rusaknya pengelolaan SDA dan energi yang membuat rakyat makin menderita.

Kondisi ini terjadi karena Indonesia dan dunia umumnya menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis yang paling menonjol justru kepemilikan individu. Bahkan kepemilikan negara dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan cara privatisasi. Inilah yang menjadi sebab utama mengapa peraturan tentang SDA dan energi semua mengarah pada privatisasi yang berakibat pada penguasaan SDA dan energi oleh swasta bahkan pihak swasta asing.

Selain itu, ketidakstabilan moneter berdampak pada munculnya berbagai persoalan ekonomi terjadi. Ini karena adanya faktor pemicu terjadinya krisis keuangan dan berdampak pada krisis ekonomi, yakni persoalan mata uang dan sistem keuangan (moneter) yang sangat spekulatif dan penuh dengan rente.

Selanjutnya, yang menambah karut-marut ekonomi Indonesia saat ini adalah ketidakberpihakan Pemerintah dan legislatif kepada rakyat. Hal ini tercermin dalam pembuatan peraturan dan perundangan. Lihatlah UU PMA, UU Migas, UU SDA dan UU lainnya. Semuanya jelas-jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi berpihak pada kepentingan pihak swasta pemilik modal bahkan pihak asing. Semua ini menambah derita rakyat dan makin membuat karut-marut ekonomi Indonesia.

Lalu siapa sesungguhnya yang berkontribusi bagi karut-marut ekonomi Indonesia? Ada beberapa pihak. Pihak yang secara langsung terlibat adalah legislatif dan Pemerintah, yakni dalam hal pembuatan peraturan dan perundangan. Selain itu, tentu pihak yang menginginkan dan diuntungkan dengan peraturan dan perundangan tersebut, yakni pihak swasta kapitalis dan pihak asing mengeruk kekayaan alam dan kekayaan ekonomi lainnya di negeri ini.

Pihak lain yang berkontribusi bagi karut-marut ekonomi Indonesia adalah para koruptor serta para pelaku kolusi dan suap. Kolaborasi jahat pejabat korup dengan pengusaha hitam demi memenangkan berbagai tender proyek serta berbagai kepentingan ekonomi mereka lainnya seperti penggelapan pajak adalah fakta nyata kejahatan mereka.

Modus operandi mereka dengan memanfaatkan peraturan dan perundangan yang tidak berpihak

kepada rakyat, tetapi berpihak kepada swasta asing. Lihatlah, bagaimana lembaga legislatif bersama Pemerintah justru banyak membuat undang-undang dan peraturan seperti UU SDA, UU PMA, UU Migas, UU Kelistrikan dan lainnya yang jelas-jelas merugikan atau mengancam kepentingan rakyat. Undang-undang itu memperbesar peluang bisnis swasta dan memperkecil peran negara.

Akibatnya sudah kita rasakan. Sejak negara ini merdeka, sebagian besar kekayaan alam yang melimpah-ruah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang sebagian besarnya bahkan pihak asing. Contoh kecil: Di Bumi Papua, kekayaan tambang emasnya setiap tahun menghasilkan uang sebesar Rp 40 triliun. Kekayaan tersebut 90%-nya dinikmati perusahaan asing (PT Freeport). Mayoritas rakyat Papua sendiri hingga kini masih susah dan miskin. Pemerintah Indonesia pun hanya mendapatkan royalti dan pajak yang tak seberapa dari penghasilan PT Freeport yang luar biasa itu. []

Kemenangan Pasti Datang!

Mahfud Abdullah
(Direktur Indonesia Change)



alam kitab *Al-Yatimah*, Ibn Al-Muqaffa' mengatakan: "Sabar itu ada dua jenis: Kejahatan yang menimpa fisik dan kedermawanan

yang menimpa jiwa. Bukanlah kesabaran jika orang dipuji sebagai seorang yang fisiknya kuat berusaha dan bekerja keras, karena ini termasuk sifat keledai. Namun, kesabaran itu bagi orang yang mampu mengendalikan diri, mampu memikul setiap urusan, serta tabah memelihara dan menjaga semuanya." (*Adab ad-Dunya wa ad-Din* – Karya Al-Mawardi).

Wahai kaum Muslim, para pejuang di seluruh penjuru bumi Allah yang mulia, sesungguhnya kami telah menyaksikan betapa semangat perjuangan Anda telah mengguncangkan para penguasa zalim beserta semua kaki tangan mereka di seluruh dunia. Betapun kebiadaban, kebrutalan dan berbagai tindakan keji mereka lakukan untuk yang mengadang perjuangan Anda, keteguhan hati Anda jauh lebih kokoh. Seruan kebenaran yang Anda teriakkan di depan sistem zalim dan kejam itu jauh lebih tinggi nilainya.

Begitu juga tekad Anda untuk menolak pemerintahan diktator dan Anda menegakkan syariah Allah jauh lebih kuat. Janganlah Anda ragu melawan kekuatan-zalim lainnya. Bertawakallah kepada Allah SWT semata. Janganlah Anda takut terhadap celaan para pencela dalam menyerukan kebenaran. Ingatlah bahwa Rasulullah saw. telah menjadikan seruan kebenaran (*kalimatul haq*) sebagai jihad yang paling utama, Rasulullah saw. bersabda: "*Sebaik-baiknya jihad adalah seruan kebenaran kepada penguasa zalim.*"

Rasulullah s.aw juga telah menjadikan siapa saja yang gugur dalam menyerukan kebenaran sebagai pemimpin para syuhada. Rasulullah saw. bersabda: "*Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri di depan penguasa bengis, kemudian ia diperintah dan dilarang, lalu dibunuh.*"

Buanglah segala bentuk perpecahan seraya berpegang teguh hanya kepada tali Allah SWT yang kokoh. Tentu dengan mengadopsi visi dan tujuan politik jelas yakni tegaknya Islam. Dengan itu Anda dan umat benar-benar menjadi pelindung segala konspirasi yang dirancang Barat dan antek-anteknya untuk mengaborsi dan mengalihkan jalannya perubahan.

Pada saat itulah, kekuatan apapun di bumi ini tak akan bisa membendung keinginan umat untuk membangun masa depannya sendiri. Itulah masa depan yang corak dan bentuknya ditentukan oleh Islam dan sistemnya dibuat oleh Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. []



RADIKAL ISLAMI VS RADIKAL SEKULER

Muhammad Rahmat Kurnia

Kacamata. Seseorang akan menentukan apakah sekolahnya jauh atau dekat bergantung pada tolok ukurnya. Boleh jadi ada yang mengatakan dekat, namun ada juga yang mengatakan jauh. Ya, bergantung pada tolok ukurnya. Bergantung pada kacamata yang dia pakai. Mungkin ada yang mengatakan sekolahnya itu jauh. Ternyata tolok ukurnya jarak dari rumahnya. Boleh jadi orang lain mengatakan sekolahnya sedang karena dihitung dari kantor pos. Ada pula orang yang mengatakan sekolahnya itu hanya beberapa langkah saja. Ternyata, dia menghitungnya dari kantin samping sekolah. Tolok ukur salah, keliru pengambilan keputusan.

“Bagaimana bisa siswa yang mengaku pernah nonton film porno diberi hadiah. Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo?” ujar Pak Firman memberikan pertanyaan retorik.

“Wajarlah dia bilang gitu. *Lho wong* dia itu mengaku suka film porno, *kok*. Ini pengakuan, *lho*,” Kang Eman menanggapi. “Kalau saya nonton film porno, salah saya di mana? *Wong* saya suka, *kok*,” itu kata dia tambahnya.

Memang Ganjar pernah mengakui hal itu saat menjadi tamu Podcast di Youtube pribadi Deddy Corbuzier yang diunggah Selasa 3 Desember 2019. “Saya kadang-kadang kepingin nonton, karena saya dewasa dan saya sehat. Kalau tidak sehat baru tidak akan saya nonton. Sebagai orang dewasa *kan* perlu,

kecuali saya setiap hari suka *ngomong* yang porno-porno, tak sebarin kemana-mana. *Sorry* lah,” akunya.

Jadi dalam kacamata, menonton porno itu boleh. “Persoalannya, dia paling getol bilang ‘Saya Pancasila’. Nah, anak-anak *millennial* bisa saja memahami bahwa menonton porno itu boleh. Pancasila. Apalagi diberi hadiah laptop,” Pak Wawan mengomentari. “Bila demikian, gawat tuh!” tambahnya.

Padahal bila kacamata ajaran Islam, jelas tidak boleh menonton porno karena itu masuk dalam kategori *hadharah* bukan Islam. Itulah kacamata.

Berkaitan dengan kacamata pun terjadi pada istilah radikal yang kini terus digaungkan. “Coba ya lihat. Di kita ini jelas yang namanya menikah itu laki-laki dengan perempuan. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerukan pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Bukankah ini radikal? Bahkan super radikal,” kata Pak Wawan. “Mereka mengklaim dulu di Indonesia perempuan tidak pakai jilbab. Nah, ketika ada kaum Muslimah yang mengenakan jilbab, berbaju gamis panjang termasuk di kantor, dituding radikal. Apalagi kalau mengenakan cadar. Padahal di kalangan pesantren sejak dulu hingga sekarang masih banyak yang mengenakan cadar. Wong istri dan anak-anak perempuan kiai saya sampai kini bercadar, *kok*,” imbuh Kang Eman.

“Iya ya, mestinya kalau tidak *double*

standard, perempuan yang mengenakan celana pendek hingga kelihatan paha, berkaus ketat dan tipis sehingga lekuk tubuh sangat terlihat dengan jelas, berlelegang-lelekok di mal, mereka termasuk orang radikal. Sebab, di lingkungan sekitarnya orang-orang pada menutup aurat. Ini *kan* tidak. Hanya orang Islam saja yang dituduh radikal,” Pak Mumuh menimpali. Ia segera menambahkan, “Tapi, rupanya, kacamataanya memang sudah tidak adil. Yang sini dituduh radikal, yang sana disebut hak asasi manusia. Yang ini dicap radikal, yang sana dikatakan modern.” Ini karena beda kacamata yang dipakai: kacamata Islam atautah kacamata sekular.

Kalau sedikit saja adil, setidaknya orang akan mengatakan ada radikal islamis dan radikal sekular. Radikal islamis sebut saja orang-orang yang berpegang teguh dengan kuat pada Islam. Sebaliknya, radikal sekular merupakan orang-orang yang sangat kuat berpegang pada sekulerisme yang karenanya mendelegitimasi agama. Dulu, sebelum menjabat Wakil Presiden, Kiai Ma’ruf Amin pernah menyebut ada istilah sekulerisme radikal. Menurut dia, radikalisme sekular adalah sekelompok orang yang mendeligitimasi agama. “Nah kalau radikalisme sekular itu sekelompok orang yang kemudian juga mendelegitimasi agama sehingga agama itu tidak boleh ikut memberikan kontribusi di dalam kehidupan,” ucapnya (*Republika*, 17/3/2017).

“Bila demikian, orang-orang yang anti perda syariah adalah orang-orang radikal sekular,” Ustadz Dani mencoba menyimpulkan.

Berdasarkan kacamata sekular, orang-orang Islam yang taat pada agamanya dituding radikal. Padahal sejatinya berdasarkan kacamata ajaran Islam, orang-orang yang taat pada sekulerisme dengan menjauhkan ajaran Islam dari kehidupan diri, keluarga dan negara,

Berdasarkan kacamata sekular, orang-orang Islam yang taat pada agamanya dituding radikal. Padahal sejatinya berdasarkan kacamata ajaran Islam, orang-orang yang taat pada sekulerisme dengan menjauhkan ajaran Islam dari kehidupan diri, keluarga dan negara, itulah yang radikal. Ya, radikal sekular. “Namun, tuduhan radikal itu hanya diarahkan kepada orang-orang Islam yang taat pada agamanya. Politis. Tendensius,” tambah Ustadz Dani.

itulah yang radikal. Ya, radikal sekular. “Namun, tuduhan radikal itu hanya diarahkan kepada orang-orang Islam yang taat pada agamanya. Politis. Tendensius,” tambah Ustadz Dani.

Dapat diduga, orang-orang yang teriak-teriak menuding radikal terhadap kalangan Islam adalah kalangan radikal sekular.

“Yang sangat menyedihkan itu, sebagian ulama justru turut menabuh genderang radikalisme itu. Sasarannya adalah umat Islam sendiri,” Kang Eman berkomentar lagi.

“Ulama seperti itu telah diingatkan dari dulu oleh Imam al-Ghazali,” kata saya. Saya tambahkan, “Beliau mengatakan, rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena cinta harta dan kedudukan dunia.”

Wallâhu a’lam. □

BPJS MEMBEBANI RAKYAT!

dr. Muhammad Amin, M.Ked.Klin, SpMK (Help Sharia)

Sah! Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019. Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres tersebut, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebesar 100% pada Kamis (24/10/2019). Adapun kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPJU) dan bukan pekerja (BP). Kebijakan ini dinilai akan membebani peserta BPJS Kesehatan mandiri yang tergolong sebagai masyarakat tidak mampu.

Dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 perbulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 perbulan untuk kelas II dan sebesar Rp 160.000 perbulan untuk kelas I. Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Membebani Rakyat

Sebelumnya dikabarkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019. Menkeu mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada. Di sisi lain, pihak BPJS pernah menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi meningkat lebih besar dari prediksi awal Rp 28 triliun menjadi Rp 32 triliun.

Rencana kenaikan tarif BPJS menuai kritik berbagai kalangan. Kebijakan ini juga dikeluhkan sebagian masyarakat. Pasalnya mereka bekerja keras siang dan malam hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Saat yang sama, ekonomi memburuk. Harga-harga kebutuhan terus naik. Daya beli rakyat menurun. Ada tanda-tanda sebagian rakyat mulai frustrasi.

Di sisi lain, kekayaan alam yang sejatinya adalah milik bersama seluruh rakyat justru diserahkan kepada swasta. Kebanyakan asing. Rakyat dan negara pun kehilangan sumber dana yang semestinya bisa digunakan membiayai jaminan kesehatan untuk rakyat tanpa memungut

dari rakyat. Akibatnya, rakyat kehilangan kekayaannya. Mereka pun masih dipaksa membayar iuran untuk pelayanan kesehatan mereka. Dilihat dari sisi ini, maka kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan jelas merupakan kezaliman.

Diskriminatif!

Kehadiran BPJS juga akan menjadi tameng untuk menutupi kelemahan Pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang prima kepada rakyatnya. Selama ini alokasi anggaran untuk bidang kesehatan amat minim dibandingkan dengan bidang lainnya. Pada RAPBN 2020, anggaran untuk Kementerian Kesehatan hanya Rp 48,8 triliun. Bandingkan dengan biaya untuk membayar cicilan bunga utang Pemerintah pada periode yang sama. Nilainya mencapai Rp 172,4 triliun atau 62,49% dari target yang ditetapkan dalam alokasi Kas Negara Rp 275,8 triliun, sejak Januari - Agustus 2019.

Dampak dari rendahnya anggaran Pemerintah di bidang kesehatan membuat pengembangan infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan menjadi sangat terbatas. Sebagai contoh, ada 615 dari 2.170 rumah sakit (RS) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan turun kelas. Ini mengindikasikan fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan antarprovinsi masih sangat timpang. Akibatnya, tidak jarang pasien rujuk harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Di sisi lain, kesenjangan tersebut menjadikan beban rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan semakin besar.

Anggaran yang rendah membuat biaya operasional (*capitation fee*) Puskesmas dan rumah sakit milik Pemerintah menjadi sangat terbatas. Biaya operasional yang rendah berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, termasuk kegiatan yang bersifat preventif, menjadi kurang maksimal. Dampak lainnya, insentif bagi tenaga kesehatan

sangat minimalis, sementara beban kerja semakin besar. Akibatnya, sebagian mereka tidak dapat bekerja secara optimal. Kelemahan Pemerintah ini kemudian menjadi lahan empuk bagi investor swasta. Rumah sakit swasta tumbuh dimana-mana. Dengan kehadiran BPJS, status rumah sakit Pemerintah ataupun swasta tidak lagi penting sepanjang BPJS bersedia memberikan profit yang menggiurkan kepada mereka. Dengan demikian, peran negara dalam menyediakan layanan kesehatan akan semakin minimal.

Padahal seharusnya, negara hadir sebagai pelayan rakyat, yakni mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jaminan sosial adalah kewajiban Pemerintah dan merupakan hak rakyat. Sebaliknya, dalam asuransi sosial BPJS Kesehatan, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri. Itu artinya rakyat harus melindungi dirinya sendiri. Pada jaminan sosial, pelayanan kesehatan diberikan sebagai hak dengan tidak membedakan usia dan penyakit yang diderita, sedangkan pada asuransi sosial peserta yang ikut dibatasi baik dari segi usia, profesi maupun penyakit yang diderita. Selain itu, akad dalam asuransi termasuk akad batil dan diharamkan oleh syaria Islam.

Kebijakan BPJS ini juga telah memposisikan hak sosial rakyat berubah menjadi komoditas bisnis. Bahkan Pemerintah dengan sengaja telah membuat aturan untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan pengelola asuransi. Artinya, apabila hak sosial rakyat didekati sebagai komoditi bisnis, maka posisi rakyat yang sentral substansial direduksi menjadi marginal residual. Kepentingan bisnis justru ditempatkan menjadi yang sentral substansial.

Ini tentu sangat berbahaya karena berarti negara telah mempertaruhkan nasib jutaan rakyatnya kepada kuasa pasar. Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini pasar mengemban semangat kerakusan yang predatorik yang dikendalikan oleh kekuatan kapitalis global yang bakal merongrong hak sosial rakyat melalui badan-badan usaha asuransi.

Hal ini sudah terbukti di mana-mana. Termasuk di Indonesia. Institusi bisnis asuransi multinasional saat ini tengah mengincar peluang bisnis besar di Indonesia yang dibukakan antara lain oleh UU 40/2004, Pasal 5 dan Pasal 17, juga UU 24/2011 Pasal 11 huruf b. Disebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi. Ini merupakan bukti nyata dari pengaruh neoliberalisme yang memang sekarang sedang melanda Indonesia.

BPJS Berkaitan Erat dengan Cacat Demokrasi

Konsep BPJS merupakan asuransi sosial (*social insurance*) yang didanai melalui kontribusi peserta—selain subsidi Pemerintah—berdasarkan prinsip-prinsip asuransi. Ia bukan jaminan negara atas kebutuhan dasar rakyatnya yang murni didanai oleh APBN. Peserta/rakyat melindungi diri mereka dari berbagai risiko seperti cacat, sakit, kematian dan pensiun dengan membayar premi secara reguler kepada badan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sistem jaminan sosial sejatinya lahir akibat kegagalan negara-negara kapitalis dalam menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Oleh karena itu, solusi yang ditempuh adalah rakyat harus ikut berkontribusi untuk membiayai jaminan sosial yang akan mereka dapatkan. Sistem ini mulanya dicetuskan pada tahun 1883 oleh Kanselir Jerman, Otto Von Bismarck. Tujuannya untuk mencegah meluasnya pengaruh Marxisme yang dicemaskan akan mengambil-alih kendali Jerman. Pekerja yang memiliki kekuatan yang berpengaruh dibujuk dengan ide pensiun dan jaminan sosial.

Dalam kenyataannya, penerapan sistem ini membuat beban yang harus dipikul oleh rakyat tidak hanya pajak, namun juga iuran asuransi sosial. Di Indonesia, dengan adanya BPJS, selain membayar pajak penghasilan yang berkisar antara 5-30%, mereka juga harus membayar iuran. Ini belum berbagai jenis pajak lainnya seperti PPN sebesar 10% dari setiap transaksi barang kena

pajak. Di negara-negara Barat, yang menjadi kiblat asuransi sosial negara ini, bahkan nilai kontribusi rakyat sangat tinggi. Di Jerman, misalnya, rata-rata mencapai 39,5% dari penghasilan yang terdiri dari pajak penghasilan sebesar 19,1% dan kontribusi jaminan sosial sebanyak 20,4%.

Ironi BPJS

BPJS mendorong pelayanan kesehatan oleh penyedia layanan kesehatan (klinik, puskesmas, rumah sakit) untuk menitikberatkan efisiensi biaya ketimbang mutu pelayanan. Agar pembayaran klaim BPJS kepada penyedia layanan kesehatan dapat ditekan, maka penyakit yang ditanggung dibatasi. Penyakit karena wabah, misalnya, tidak ditanggung. Metode pembiayaan juga dibuat sehemat mungkin disertai harapan agar tenaga kesehatan tetap menjaga mutu pelayanan. Meskipun demikian, model pembayaran yang diberlakukan tersebut harus memberikan insentif yang menarik bagi penyedia layanan kesehatan, khususnya swasta, sehingga mereka mau berinvestasi di bidang ini.

Saat ini metode pembiayaan yang diadopsi BPJS adalah metode proaktif; jenis tindakan, obat dan bahan habis pakai untuk suatu penyakit telah ditetapkan tarifnya dalam bentuk paket. Paket-paket tersebut dikompilasi dalam perangkat lunak yang disebut Indonesian Case Base Groups (INA-CBG's). Implementasi INA-CBG's sendiri didanai oleh Australian Agency for International Development (AusAID).

Metode tersebut diklaim paling efisien dibandingkan metode pembayaran lainnya dalam menekan biaya pengobatan. Meskipun demikian, kualitas yang diperoleh juga lebih rendah dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Metode tersebut membuat fleksibilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan menjadi terbatas. Dokter, misalnya, dituntut untuk menyesuaikan layanan kesehatan dan obat sesuai dengan paket yang telah ditetapkan dalam *software* tersebut. Bahkan jika perlu layanan kesehatan perkasus harus ditekan semaksimal

mungkin, seperti: tidak melakukan pemeriksaan penunjang yang seharusnya dilakukan, tidak memberikan obat yang dibutuhkan, membatasi fasilitas dan waktu pelayanan kesehatan bagi pasien, menyegerakan proses rujukan ke layanan kesehatan lainnya hingga menolak pasien secara halus.

Aneka kasus pun terjadi. Misal, pasien mengeluarkan biaya tambahan seperti menebus obat yang dibutuhkan karena tidak tercakup dalam paket yang ditetapkan dalam INA-CBGs. Obat hanya ditanggung dalam rentang waktu yang lebih singkat dari semestinya. Pasien harus pulang sebelum sehat karena biaya paket INA-CBGs yang diberikan kepada dia telah habis dan sebagainya. Semua ini dilakukan semata-mata agar biaya pelayanan yang diberikan tidak melampaui batas yang dapat diklaim ke BPJS. Beruntung jika bisa lebih rendah sehingga keuntungan penyedia layanan kesehatan semakin besar.

Solusi Islam

Asuransi adalah perusahaan bisnis yang bertentangan dengan konsep Islam. Manfaat untuk memberikan pertanggung jawaban berupa kompensasi pembiayaan dan pembayaran, pada kondisi tertentu, yang dialami tertanggung bukanlah objek *syirkah* (bisnis) yang dibolehkan dalam Islam.

Negara tidak boleh memberikan layanan kesehatan dengan membebankan pembiayaannya kepada masyarakat, baik dengan sistem asuransi atau pengenaan pajak. Penarikan dana masyarakat baik dalam bentuk iuran, pajak atau apapun namanya, dengan dalih dana tersebut akan dikelola untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, tidak bisa dibenarkan. Negara harus mengambil peran sebagai pelayan, bukan pebisnis. Karena itu keseluruhan layanan publik, berupa pendidikan, keamanan termasuk layanan kesehatan harus diberikan oleh negara kepada rakyat secara cuma-cuma, tanpa memandang kelas. Semua rakyat, baik kaya atau

miskin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara.

Layanan kesehatan masyarakat adalah layanan yang sifatnya darurat. Keberadaannya mendesak untuk disediakan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Negara harus menanggung keseluruhan biaya kesehatan masyarakat. Negara bisa mengambil pos-pos penerimaan negara dari *milkiyah al-ummah* seperti harta penerimaan negara dari tambang, minyak dan gas, pendapatan hasil hutan, yang jumlahnya melimpah.

Mengingat pentingnya layanan kesehatan maka negara harus mengupayakan dan menjamin ketersediaannya. Jika ada anggaran di pos perbendaharaan negara maka negara segera membelanjakannya. Jika anggaran di perbendaharaan negara kosong, negara harus mencari solusi alternatif baik berupa pinjaman maupun menetapkan dharibah (pajak khusus) yang dibebankan hanya kepada warga negara yang kaya.

Dengan demikian, layanan kesehatan dapat diberikan oleh negara secara maksimal tanpa membebani rakyat. Konsep layanan ini hanya dapat diwujudkan jika negara menerapkan syariah secara total dalam mengatur kehidupan rakyat. Tanpa penerapan syariah Islam secara total, niscaya problem layanan kesehatan dan problem-problem lain yang menimpa negeri ini tidak akan pernah tuntas.

Allah SWT berfirman:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itu Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka (QS al-A'raf [7]: 96).

In the year 1000, Baghdad had five major hospitals. They treated the rich and the poor with no need for health insurance.

BPJS VS JAMINAN KESEHATAN ISLAM

Syamsuddin Ramadhan An Nawiy

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) acapkali dianggap sebagai bentuk kepedulian negara terhadap pelayanan kebutuhan vital masyarakat. Salah satunya kesehatan. Padahal hakikat dan fakta BPJS justru menunjukkan sebaliknya. Jaminan pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kini dialihkan ke tangan rakyat melalui penetapan premi kesehatan. Rakyat tetap harus membayar premi walaupun tidak sedang mendapatkan layanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang harusnya didapat rakyat secara gratis, atau murah, kini harus dibisniskan ala “asuransi”. Tanpa mengindahkan penderitaan rakyat, pada bulan September 2019, Pemerintah resmi menaikkan iuran (premi) BPJS Kesehatan sebesar 100%. Kebijakan ini ditetapkan setelah sebelumnya BPJS mengalami defisit yang cukup parah, diperkirakan hingga Rp 32,89 triliun. Meskipun premi naik, defisit BPJS akhir tahun ini masih diperkirakan sebesar Rp 18 triliun.

Keluhan atas buruknya BPJS Kesehatan tidak hanya berasal dari peserta BPJS, tetapi juga datang dari rumah sakit, dokter dan rekanan-rekanan rumah sakit. Banyak rumah sakit yang harus nalangi dan hutang ke apotik maupun perusahaan-perusahaan alat kedokteran. Dokter dipaksa bekerja keras dengan imbalan “ala

kadarnya”. Dengan alasan mengatasi defisit yang terus membengkak, dokter diminta tidak melakukan tindakan medis maksimal kepada peserta BPJS. Rakyat harus pasrah menerima pelayanan kesehatan ala kadarnya.

Ironisnya lagi, Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi bagi para penunggak premi BPJS, seperti saat mengurus perpanjangan SIM, IMB, dan lain sebagainya. Inpres mengenai sanksi penunggak premi sudah ada, tetapi tidak bisa dieksekusi di lapangan. Fakta semacam ini menunjukkan bahwa BPJS malah membebani rakyat, bukan memberi solusi atas problem kesehatan masyarakat.

Kesalahan Mendasar

Kisruh BPJS Kesehatan tentu tidak bisa dipisahkan dari paradigma negara dalam menyelenggarakan urusan masyarakat dan negara. Kebutuhan vital rakyat, semacam kesehatan, seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas secara gratis hingga setiap individu rakyat mampu mengaksesnya dengan mudah.

Pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang sebagai jasa yang mewajibkan kompensasi. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat



ditanggung sepenuhnya oleh negara. Jaminan negara atas kesehatan tidak boleh dirupakan melalui mekanisme asuransi. Tak boleh rakyat diperlakukan layaknya nasabah perusahaan asuransi, seperti yang dilakukan Pemerintah melalui BPJS.

Dr. 'Abdurrahman al-Khalidi dalam Kitab *Ash-Siyâsah al-Iqtishâdiyyah al-Mutsala* mengatakan: (Jaminan pemenuhan) kebutuhan-kebutuhan primer bagi seluruh rakyat telah ditetapkan oleh syariah sebagai kewajiban atas negara secara langsung. Nabi saw bersabda, *"Imam (kepala negara) itu adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin."* (HR al-Bukhari).

Syariah menetapkan bahwa di antara tanggung jawab (negara) adalah memenuhi kebutuhan asasi bagi seluruh rakyat. Kebutuhan asasi tersebut adalah keamanan, kesehatan dan Pendidikan.

Berobat termasuk perkara mubah. Namun demikian, kesehatan merupakan salah satu

urusan dari urusan-urusan rakyat. Bahkan kesehatan badan termasuk salah satu urusan vital. Oleh karena itu, pemenuhan kesehatan wajib atas negara. Apalagi tidak adanya pemenuhan kesehatan bagi masyarakat bisa menimbulkan bahaya. Menghilangkan bahaya wajib atas negara. Nabi saw. bersabda, *"Tidak boleh ada bahaya dan yang membahayakan."* (HR Malik).

Atas dasar itu, penyediaan pelayanan kesehatan wajib atas negara. Pasalnya, kesehatan merupakan salah satu urusan rakyat yang wajib dilayani, dan tidak adanya pelayanan kesehatan bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

Rasulullah saw.—sebagai kepala negara saat itu—pernah diberi hadiah berupa seorang dokter. Lalu beliau menjadikan dokter tersebut sebagai dokter untuk seluruh kaum Muslim. Ini menunjukkan bahwa hadiah tersebut untuk seluruh kaum Muslim, bukan untuk beliau sendiri.

Jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah melalui BPJS faktanya justru telah memberatkan rakyat. Alih-alih membantu rakyat, BPJS justru menjadi alat untuk memalak rakyat. Rakyat dipaksa membayar iuran agar bisa mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan secara gratis atau murah. Dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), rakyatlah yang sejatinya menjamin sendiri kesehatannya, bukan Pemerintah. Jaminan kesehatan rakyat oleh negara hanyalah jargon-jargon yang menipu.

BPJS Kesehatan: Asuransi Kesehatan, Bukan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah melalui BPJS Kesehatan—yang dulu bernama Askes (Asuransi Kesehatan)—sejatinya bukan akad jaminan (*dhaman*) yang disyariatkan dalam Islam, tetapi asuransi. BPJS tidak ada bedanya dengan perusahaan asuransi

Jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah melalui BPJS faktanya justru telah memberatkan rakyat. Alih-alih membantu rakyat, BPJS justru menjadi alat untuk memalak rakyat. Rakyat dipaksa membayar iuran agar bisa mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan secara gratis atau murah. Dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), rakyatlah yang sejatinya menjamin sendiri kesehatannya, bukan Pemerintah.

yang menjadikan rakyat sebagai nasabahnya. Peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar premi tiap bulan, baik dalam keadaan sedang membutuhkan layanan kesehatan ataupun tidak.

Praktik asuransi diharamkan di dalam Islam. Sebab, syarat sah jaminan harus terjadi pada penunaian hak harta yang wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo pemenuhannya. Jika tidak terdapat hak wajib yang akan jatuh tempo pemenuhannya, yang harus ditunaikan oleh seseorang, maka makna jaminan (*dhaman*) tidak cocok diberlakukan pada orang tersebut. Sebab, tidak terjadi pemindahan hak seseorang kepada pihak lain. Jaminan (*dhaman*) semacam ini jelas tidak sah.

Jika tidak terdapat hak wajib yang diterima oleh pihak yang mendapat jaminan (*madhmûn lahu*) atas yang dijamin (*madhmûn 'anhu*), maka jaminan (*dhaman*) tersebut tidak sah. Sebab, disyaratkan bagi pihak penjamin (*dhâmin*) agar menjamin barang, jika barang tersebut hilang atau rusak, atau menjamin hutang baik ia menjamin secara praktis, jika pada saat itu hak tersebut berupa hak wajib dan jatuh temponya, ataupun menjamin dengan kemampuan (kekayaannya), jika hak tersebut belum jatuh tempo pemenuhannya. Jika yang dijamin (*madhmûn 'anhu*) berada dalam keadaan tidak harus mendapatkan jaminan, baik pada saat itu juga, ataupun dengan kekayaan pihak penjamin (*dhâmin*), maka jaminan (*dhaman*) tersebut tidak sah. Sebab, hal-hal yang tidak wajib ditunaikan oleh pihak yang dijamin (*madhmûn 'anhu*) tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak penjamin (*dhâmin*).

BPJS: Bukan *Ta'âwun*, Tetapi Pemalakan

BPJS tidak termasuk praktek *ta'âwun* (saling menolong) yang disyariatkan dalam Islam, tetapi pemaksaan. Di antara prinsip penting *ta'âwun* adalah kerelaan. Tidak ada pihak yang dipaksa atau yang memaksa. Di dalam *ta'âwun*

juga tidak ada kewajiban. Karena itu tidak ada keharusan bagi peserta membayar iuran dan akan dikenai sanksi jika tidak menyerahkan iuran. Yang ada hanyalah saling-menolong secara sukarela tanpa ada paksaan.

Di dalam BPJS, faktanya ada pemaksaan dalam hal kepesertaan. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS (UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 14). Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Praktik semacam ini jelas bukan *ta'âwun*, tetapi pemaksaan.

Peserta diwajibkan membayar iuran (premi). Dia akan dikenai sanksi jika tidak atau telat membayar iuran. Di antara ketentuan sanksi penunggak iuran BPJS adalah denda dapat berlaku bagi peserta BPJS yang mendapat rawat inap selama 45 hari sejak status BPJS-nya aktif kembali, yakni denda 2,5% dari biaya rawat inap pelayanan kesehatan dikali dengan lamanya tinggakan perbulannya. Penunggak iuran BPJS juga dikenai sanksi dalam layanan-layanan publik lain, seperti saat mengurus SIM, ijin, dan lain sebagainya. Penunggak BPJS terancam tidak bisa atau dipersulit saat hendak mengurus urusan-urusannya yang lain. Jika ini faktanya, BPJS tidak menjalankan prinsip *ta'âwun*, tetapi pemaksaan.

Sanksi BPJS yang Dikaitkan dengan Pelayanan Publik Lain

Kezaliman lain yang dilakukan Pemerintah melalui BPJS adalah sanksi penunggak BPJS dikaitkan dengan layanan publik yang lain. Negara wajib melayani urusan masyarakat dalam keadaan apapun. Pemberian sanksi penunggak BPJS yang dikaitkan dengan pelayanan publik lain benar-benar merupakan



tindak kezaliman Pemerintah atas rakyatnya. Praktik seperti ini sama artinya dengan menghalangi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang menjadi hak mereka. Bukankah setiap individu rakyat harus mendapatkan layanan publik dengan mudah dan berkualitas? Bukankah mencegah mereka dari layanan-layanan publik lain sama artinya telah menyulitkan dan memberatkan mereka.

Nabi saw. bersabda:

«وَمَنْ يُسَاقِقْ يُشْفِقْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak pada Hari Kiamat (HR al-Bukhari).

Nabi saw. pun mendoakan keburukan bagi penguasa yang membebani rakyatnya:

«اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَسَقَّ عَلَيْهِمْ

فَأَشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفُقْ بِهِمْ

فَارْفُقْ بِهِ»

Ya Allah, siapa saja yang memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, sempitkanlah dia. Siapa saja yang memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, perlakukanlah dia dengan baik (HR Ahmad dan Muslim).

Jaminan Pelayanan Kesehatan Islam

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat yang pelayanannya dijamin oleh negara. Negara Khilafah menyediakan layanan kesehatan bagi setiap individu rakyat secara gratis. Paradigma Khilafah dalam mengatur urusan rakyat adalah *melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya*. Khilafah tidak akan mengeksploitasi atau menempatkan rakyat sebagai “pasar” untuk barang dan jasa kesehatan.

Khilafah menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan maksimal kesehatan. Khilafah membentuk badan-badan riset untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta penangkalnya. Pada masa keemasan Islam, Bani ibn Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis. Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tuna netra. Khalifah Bani Abbasyiah banyak mendirikan rumah sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan rumah sakit keliling.

Khilafah melalui departemen terkait mensosialisasikan hidup sehat dan menciptakan lingkungan bersih dan asri. Khilafah juga membudayakan gaya hidup sehat dengan cara membuat aturan-aturan yang menjamin kehalalan dan higienitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat, serta bersihnya lingkungan dari polusi.

Apakah kas negara Khilafah mencukupi untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, termasuk di dalamnya mendanai berbagai macam riset dan pengembangan kedokteran dan farmasi? Tentu, kas negara Khilafah lebih dari mencukupi untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis bagi setiap individu masyarakat. Pasalnya, Khilafah mengelola seluruh sumberdaya alam dan harta milik umum, seperti tambang-tambang penting, kekayaan laut, hutan, dan lain sebagainya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Khilafah menerbitkan kebijakan larangan privatisasi harta-harta milik umum. Apalagi dalam praktiknya, negara

kekurangan dana disebabkan karena privatisasi sumberdaya alam dan harta-harta milik umum. Belum memasukan dan pendapatan dari sektor-sektor lain. Atas dasar itu, dana negara Khilafah lebih dari cukup, bahkan berlebih, dalam menjamin kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat, di antaranya kesehatan. Apalagi struktur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Khilafah juga terbebas dari hutang riba luar dalam maupun negeri, yang dalam praktiknya amat membebani anggaran negara.

Selain itu, budaya kaum Muslim adalah budaya tolong-menolong dan saling membantu. Budaya ini tentu memudahkan negara Khilafah dalam menciptakan pelayanan kesehatan bagi setiap individu rakyat.

Jaminan Kesehatan Membutuhkan Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Yang Benar

Jaminan pelayanan kesehatan rakyat yang memungkinkan setiap individu rakyat bisa mengakses layanan kesehatan terbaik secara gratis, membutuhkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang benar. Sebab, ia terintegrasi dan terkait dengan kebijakan-kebijakan lain. Dalam hal ketercukupan dana, misalnya, dibutuhkan pemerintahan dan kebijakan yang menjadikan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam ada di tangan pemerintah, bukan swasta. Dibutuhkan pula aturan dan budaya hidup bersih dan sehat, seperti larangan makanan dan minuman haram, pelacuran, seks bebas, hubungan lawan jenis dan lain sebagainya.

Hal-hal di atas hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas paradigma dan aturan terbaik, yakni akidah dan syariah Islam. Islam adalah agama terbaik yang Allah SWT turunkan. Allah SWT berfirman:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

Rakyat negeri ini hanya akan mendapatkan pelayanan terbaik ketika urusan mereka diatur dengan aturan terbaik. Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan syariah Islam. Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara *kâffah* dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas akidah Islam. Sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah 'ala minhâj an-nubuwwah. Bukan demokrasi-sekuler yang jelas-jelas memusuhi formalisasi syariah Islam.

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Menurut Imam an-Nasafi dalam kitab tafsirnya, *Madârik at-Tanzil wa Haqâ'iq at-Ta'wîl*, maknanya, "Sungguh tidak ada hukum yang paling adil dan baik dibandingkan dengan hukum Allah."

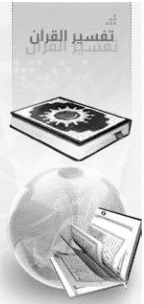
Rakyat negeri ini hanya akan mendapatkan pelayanan terbaik ketika urusan mereka diatur dengan aturan terbaik. Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan syariah Islam. Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara *kâffah* dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas akidah Islam. Sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah 'ala minhâj an-nubuwwah. Bukan demokrasi-sekuler yang jelas-jelas memusuhi formalisasi syariah Islam. [Gus Syams].



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



SERUAN KEPADA RASULULLAH SAW. PADA AWAL KENABIAN (Bagian 1)

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمُنْ بِتَسْتَكْبِرٍ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah! Lalu berilah peringatan! Tuhanmu, agungkanlah! Pakaianmu, bersihkanlah! Perbuatan dosa, tinggalkanlah! Janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak! Untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah! (QS al-Muddatstsir [74]: 1-7).

Surat ini dinamai dengan Surat al-Muddatstsir. Diambil dari ayat pertamanya. Artinya, orang yang berselimut. Tak ada perbedaan pendapat bahwa surat ini termasuk *Makkiyyah*. Menurut Ibnu Abbas, surat ini turun sesudah al-Muzzammil.¹

Ayat sebelumnya, pada surat sebelumnya, diawali dengan panggilan kepada Nabi saw. dengan menyebut beliau sebagai *al-muzzammil* (orang yang berselimut), dalam surat ini beliau kembali dipanggil dengan makna serupa, *al-muddatstsir* (orang yang berselimut). Menurut Abdurrahman as-Sa'di, dua kata itu maknanya sama.²

Jika pada awal surat sebelumnya beliau diperintahkan untuk mendirikan shalat malam, dalam surat ini beliau diperintahkan untuk

menyampaikan peringatan kepada manusia.

Sabab Nuzul

Jabir bin Abdullah ra. mendengar Rasulullah saw. pernah menceritakan tentang masa terhentinya wahyu: “Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, aku melihat ke arah langit. Tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepadaku di Hira. datang kepadaku. Ia duduk di atas sebuah kursi di antara langit dan bumi. Aku pun merasa takut dengannya hingga aku terjatuh ke tanah. Kemudian aku pulang ke rumah keluargaku dan kukatakan, ‘Selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku!’ Lalu turunlah firman Allah SWT: Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! (QS al-Muddatstsir [74]: 1-2). Sampai dengan firman-

Nya: Perbuatan dosa, tinggalkanlah! (QS al-Muddatstsir [74]: 5)." (HR Muslim).

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Ya ayyuha al-muddatstsir (Wahai orang yang berselimut). Khithâb* (seruan) ayat ini ditujukan kepada *al-muddatstsir* (orang yang berselimut). Para ulama sepakat bahwa yang dipanggil dengan sebutan tersebut adalah Nabi saw.³

Kata *al-muddatstsir* merupakan *ism al-fâ'il* dari kata *tadatstsara* (mengenakan selimut). Dengan demikian asal kata tersebut adalah *al-mutadatstsir* (dengan menggunakan huruf *at-tâ*). Huruf *at-tâ* itu lalu di-*idgham*-kan ke dalam huruf *ad-dâl* yang terletak sesudahnya karena keduanya memiliki kedekatan *makhraj*-nya (tempat keluarnya huruf).⁴

Menurut Wahab az-Zuhaili, huruf *ad-dâl* tidak di-*idgham*-kan dengan huruf *at-tâ*. Pasalnya, huruf *at-tâ* adalah huruf *hams*, sementara huruf *ad-dâl* adalah huruf *jahr*. Huruf *jahr* lebih kuat daripada huruf *hams*. Karena itu *idgham* huruf yang lebih lemah ke huruf yang lebih kuat adalah lebih baik daripada sebaliknya.⁵

Pengertian *tadatstsara* adalah mengenakan pakaian *ad-ditsâr*. Kata *ad-ditsâr* menunjuk pada pakaian yang dikenakan di atas *syi'âr*. *Asy-syi'âr* adalah pakaian yang menempel pada badan. Makna tersebut sebagaimana terkandung dalam hadis shahih bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِتَارٌ»

Anshar adalah pakaian dalam, sedang orang lain hanyalah pakaian luar (HR al-Bukhari).⁶

Kata *al-muddatstsir* juga berarti orang yang berselimut dengan pakaian untuk tidur atau untuk kehangatan.⁷ Makna ini pula yang disampaikan oleh sebagian besar mufassir. Menurut Qatadah, makna *al-muddatstsir* adalah

orang yang berselimut dalam pakaiannya.⁸

Ibnu Jarir ath-Thabari juga berkata, "Wahai orang yang berselimut dengan pakaiannya ketika tidur!" Menurut ath-Thabari, Nabi saw. dipanggil demikian karena ketika itu beliau sedang berselimut dengan kain beludru.⁹ Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibrahim, Qatadah dan Aisyah.¹⁰

Penjelasan serupa dikemukakan oleh al-Qurthubi. Menurut al-Qurthubi, ayat ini bermakna: "Wahai orang yang berselimut dengan pakaiannya." Yakni, yang menutupi diri dengan selimut dan tidur.¹¹

Menurut al-Qurthubi, panggilan tersebut merupakan panggilan yang memperlihatkan kelembutan dari *al-Karîm*, Zat Yang Mahamulia, yang memanggil kekasih yang Dia cintai. Sebab, Dia memanggil Nabi saw. dengan menyebut kondisi beliau. Allah SWT tidak memanggil beliau, "Wahai Muhammad!" atau "Wahai Fulan!" agar beliau merasakan kelembutan dan kasih sayang dari Tuhannya.¹²

Menurut al-Qurthubi, panggilan tersebut tidak jauh berbeda dengan panggilan Nabi saw. kepada Ali ra yang sedang tidur di masjid, "*Qum Aba Turab* (Bangunlah, Abu Turab)!" Sebelumnya Ali ra. keluar dari rumahnya dengan keadaan kesal kepada Fatimah ra. ia lalu tersandung bajunya sendiri dan terjatuh di atas tanah. Tanpa membersihkan bajunya, dia pun tidur di samping masjid.¹³

Contoh lainnya adalah panggilan Nabi saw. kepada Hudzaifah pada Perang Khandaq. Beliau memanggil Hudzifah dengan panggilan, "*Qum, ya Nawman* (Bangunlah, wahai orang yang sedang tertidur)."¹⁴

Sebagian mufassir lainnya menafsirkan kata berselimut ini dengan makna majazi, bukan hakiki. Maknanya, yang dimaksud dengan 'orang yang berselimut' di sini adalah 'orang yang berselimut dengan kenabian dan kesempurnaan jiwa'. Dalam arti, yang memperindah dengannya dan menghiasi diri

dengan jejak-jejaknya.¹⁵ Ikrimah berkata tentang makna ayat ini, “Wahai orang yang berselimum dengan kenabian dan berbagai bebannya.”¹⁶

Kemudian Allah SWT berfirman: *Qum fa andzir (Bangunlah, lalu berilah peringatan!)*. Ini merupakan perkara yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi saw. Beliau diperintah dengan firman-Nya: *Qum* (bangunlah). Jika dikaitkan dengan panggilan yang digunakan untuk menyeru beliau, yakni *al-muddatstsir* (berselimum), maka artinya: bangun dan berdiri dari tidurnya. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Bangunlah dari tidurnya.”¹⁷ Al-Khazin juga berkata, “Bangunlah dari tempat tidur dan selimutmu.”¹⁸

Kata *andzir* (peringatkanlah) merupakan *fi’l al-amr* (kata perintah) dari kata *al-indzâr* (peringatan). Secara bahasa, kata tersebut berarti pemberitahuan yang disertai dengan ancaman menakutkan.¹⁹ Ini lebih khusus daripada pemberitahuan secara mutlak.²⁰

Ini sebagaimana diterangkan Qatadah yang berkata, “Sampaikan peringatan tentang adanya azab Allah dan berbagai peristiwa yang menimpa umat-umat serta dahsyatnya hukuman-Nya.”²¹

Kata *al-indzâr* merupakan *al-fi’l al-muta’addiy* yang memerlukan dua *al-maf’ûl*, yakni pihak yang diperingatkan dan perkara yang diperingatkan. Dalam ayat ini, keduanya tidak disebutkan. Oleh karena, keduanya perlu ditelusur sehingga diketahui.

Tentang orang yang diperingatkan, diterangkan oleh ayat-ayat lain bahwa mereka adalah orang-orang kafir (QS Maryam [19]: 97). Kadang juga untuk kaum Mukminin. Sebab, mereka adalah orang yang mendapatkan manfaat darinya (QS Yasin [36]: 11). Kadang pula untuk seluruh manusia (QS Yunus [10]: 2).²²

Adapun perkara yang diperingatkan adalah Hari Kiamat.²³ Dua perkara itu telah dijelaskan

Ibnu Jarir ath-Thabari saat menjelaskan ayat ini. Menurut Ath-Thabari, Allah SWT berfirman kepada Nabi saw.: “Muhammad, bangunlah dari tidurnya, dan sampaikanlah peringatan tentang adanya azab Allah kepada kaummu yang menyekutukan Allah dan menyembah selain-Nya.”²⁴

Hal senada disampaikan oleh al-Qurthubi yang berkata, “Ancamlah penduduk Makkah dan peringatkanlah mereka dengan azab jika mereka tidak mau memeluk Islam.”²⁵

Hal yang sama juga disampaikan asy-



Syaukani.²⁶

Menurut az-Zamakhshari, makna yang benar adalah: “Berikanlah peringatan kepada siapa pun tanpa kecuali!”²⁷

Abu Hayyan al-Andalusi juga mengatakan bahwa peringatan itu bersifat umum untuk seluruh manusia dan diutus untuk semua makhluk.²⁸

Abdurrahman al-Alusi berkata,

“(Berikanlah peringatan) kepada manusia dengan perkataan dan perbuatan yang bisa mewujudkan tujuan serta menjelaskan keadaan perkara yang diperingatkan agar hal itu ditinggalkan.”²⁹

Ibnu ‘Asyur juga mengatakan bahwa tidak disebutkannya *maf’ûl* dalam ayat ini memberikan makna umum, yakni seluruh manusia. Dengan demikian maknanya, “Berikanlah peringatan kepada manusia seluruhnya.” Mereka saat itu adalah seluruh manusia selain Khadijah ra. Sebab, beliau telah

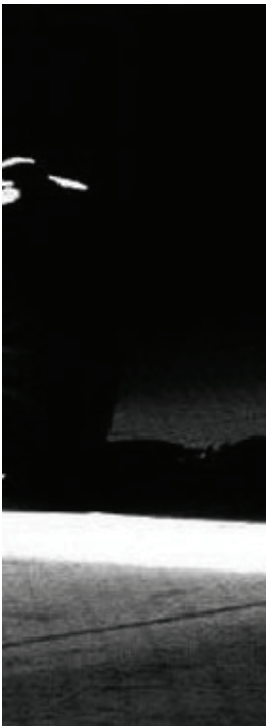
ayat ini dengan kalimat dalam ayat sebelumnya: *Qum fa andzir* (Bangunlah, lalu berilah peringatan!). Nabi saw. diperintahkan untuk bertakbir kepada Allah SWT. Kata *kabbir* merupakan *fil al-amr* (kata perintah) dari kata *kabbara* yang bermakna ‘*azhzhim* (agungkanlah). Demikian menurut banyak ahli tafsir.³²

Menurut Ibnu ‘Asyur, kata *kabbir* dimasuki huruf *al-fâ`* menunjukkan adanya syarat yang dihilangkan. Dengan demikian kata *kabbir* merupakan jawaban darinya. Syarat tersebut bersifat umum karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya syarat tertentu. Syarat yang diperkirakan tersebut adalah *al-maf’ûl* yang didahulukan. Sebab, *al-maf’ûl* yang didahulukan kadang menempati kedudukan sebagai syarat. Jadi kalimat aslinya diperkirakan, “Menjadi apa pun, agungkanlah Tuhanmu.” Dengan demikian makna ayat ini adalah: “Janganlah berhenti menyatakan pengagungan kepada Allah SWT dan mentauhidkan-Nya dalam setiap waktu dan keadaan.” Ini termasuk *al-ijâz* atau peringkasan kalimat.³³

Hal senada juga dikemukakan oleh Syihabuddin al-Alusi. Huruf *at-tâ`* tersebut memberikan makna syarat. Jadi seolah dikatakan, “Apa pun yang terjadi, jangan tinggalkan bertakbir kepada-Nya.”³⁴

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, Allah SWT berfirman, “Kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, *fa`azhzhim* (agungkanlah) dengan penyembahan dan permohonan sungguh-sungguh kepada-Nya dalam segala keperluanmu tanpa menoleh sedikit pun kepada sesembahan dan tandingan-tandingan selain-Nya.”³⁵

Abu Bakar al-Jazairi berkata, “Agungkanlah Tuhanmu dengan pengagungan yang sesuai dengan kemuliaan kesempurnaan-Nya. Karena Dialah Yang Mahabesar. Tak ada yang lebih besar dari-Nya. Dia Yang Mahaagung. Tidak ada yang lebih agung dari-Nya. Karena itu



“Janganlah berhenti menyatakan pengagungan kepada Allah SWT dan mentauhidkan-Nya dalam setiap waktu dan keadaan.”

beriman dan pantas mendapatkan kabar gembira.³⁰

Menurut Ibnu Katsir, perintah ini merupakan penetapan beliau sebagai rasul, sebagaimana dalam wahyu sebelumnya telah menetapkan beliau sebagai nabi.³¹

Kemudian Allah SWT berfirman: *Wa Rabbaka fa kabbir* (Tuhanmu, agungkanlah!). Huruf *al-wâwu* men-‘*athf*-kan kalimat dalam

umumkanlah hal itu melalui lisanmu dengan berkata: *Allahu Akbar* (Allah Mahabesar) dan perbuatanmu. Janganlah engkau menghinakan dirimu kecuali hanya kepada-Nya dan janganlah engkau mencintai kecuali karena-Nya. Agungkanlah Allah dengan segala perbuatanmu. Karena itu janganlah engkau melakukan sesuatu yang tidak diizinkan Allah atau Dia perintahkan kepadamu.”³⁶

Menurut Ibnu al-‘Arabi, *at-takbîr* adalah *at-ta’zhîm* (pengagungan). Artinya, mengingat Allah SWT dengan sifat-Nya yang paling agung dengan hati, memuji-Nya dengan lisan dengan puncak pujian serta ketundukan kepada-Nya dengan puncak ibadah, sebagaimana bersujud kepada-Nya dengan penuh kehinaan dan ketundukan.³⁷

Frasa *Rabbaka* (Tuhanmu) berkedudukan sebagai *al-maf’ûl* (objek) dari *fi’l* (*kata kerja perintah*) *kabbir* (agungkanlah, besarkanlah). Kata itu didahulukan memberikan makna *al-ikhtishâsh* (pengkhususan). Artinya, janganlah kamu mengagungkan yang lainnya. Itu merupakan pembatasan secara khusus. Artinya, bukan patung-patung.³⁸

Kata takbir, yakni *Allah Akbar*, diperintahkan dalam banyak ibadah, seperti dalam azan, iqamah, shalat, Idul Fithri, Idul Adha, dan lain-lain. Bahkan dalam shalat ia dijadikan sebagai pembukanya dan dibaca setiap memulai gerakan lainnya kecuali sesudah rukuk. (Bersambung).

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. □

Catatan Kaki:

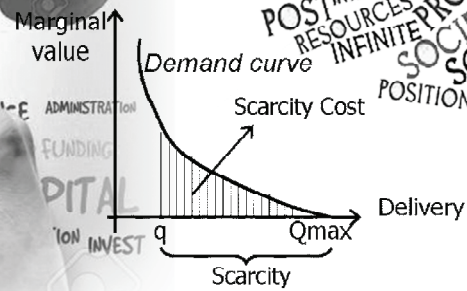
¹ al-Suyuthi, *al-Itqân fi ‘Ulû al-Qur’ân*, vol. 1 (Kairo: al-Haiah al-Mishriyyah, 1974), 42
² al-Sa’di, *Taysir al-Karim al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 895
³ al-Razi, *Mafâtih al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1420 H), 696; al-Khazin, *Lubâb al-Ta’wîl fi Ma’ânî al-Tan’zîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 362; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998), 218
⁴ al-Razi, *Mafâtih al-Ghayb*, vol. 30, 696. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 59; al-

Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 388; Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 294. Lihat juga al-Asfahani, *al-Mufradât fi Charîb al-Qur’ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1412 H), 308
⁵ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 218
⁶ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 323. Lihat juga al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), 644; al-Alusi, *Rûh al-Ma’ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 129; Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 294. Maknanya: Orang Anshar adalah orang khusus dan *bithânah* (orang dalam, teman dekat). Lihat al-Qadhi ‘Iyadh, *Ikml Mu’lim bi Fawâid Muslim*, vol. 3 (Kairo: Dar al-Wafa’, 1998), 601
⁷ al-Razi, *Mafâtih al-Ghayb*, vol. 30, 696; al-Khazin, *Lubâb al-Ta’wîl fi Ma’ânî al-Tan’zîl*, vol. 4, 326; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 215
⁸ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 23 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 9
⁹ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 23, 7
¹⁰ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 326
¹¹ al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 59
¹² al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 61
¹³ al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 61. Ini diriwayatkan dalam Hadits al-Bukhari.
¹⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 61. Ini diriwayatkan dalam Hadits Muslim
¹⁵ al-Alusi, *Râh al-Ma’ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1995), 129
¹⁶ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 388
¹⁷ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 23, 9
¹⁸ al-Khazin, *Lubâb al-Ta’wîl fi Ma’ânî al-Tan’zîl*, vol. 4, 362
¹⁹ al-Asfahani, *al-Mufradât fi Charîb al-Qur’ân*, 797
²⁰ al-Syinqithi, *Adhwâ’ al-Bayân*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 361
²¹ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 23, 9
²² al-Syinqithi, *Adhwâ’ al-Bayân*, vol. 8, 361
²³ al-Syinqithi, *Adhwâ’ al-Bayân*, vol. 8, 361
²⁴ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 23 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 9
²⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 61
²⁶ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 388
²⁷ al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 645
²⁸ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 10, 325
²⁹ al-Sa’di, *Taysir al-Karim al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 895
³⁰ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 295
³¹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 8 (tt: Dar Thayyibahm 1999), 262
³² Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 8, 262; al-Khazin, *Lubâb al-Ta’wîl fi Ma’ânî al-Tan’zîl*, vol. 4, 362; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 2993), 463
³³ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 296
³⁴ al-Alusi, *Râh al-Ma’ânî*, vol. 15, 130
³⁵ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 23, 9
³⁶ al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 463
³⁷ Ibnu ‘Arabi, *Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 339
³⁸ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 294

DONATION DOLLAR COOPERATION CORPORATE CASH INVESTMENT
 BUSINESS WEALTH PAY FUND MANAGEMENT
 BANK ECONOMY ACCOUNTING PROJECT
 CURRENCY REVENUE PROFIT INVEST COMMERCE WEALTH

ECONOMICS

ECONOMIC BUSINESS
 FINANCING BANK



INHERENTLY SCARC
 DERIVED FROM THE
 FULFILLMENT OF
 SEAWATER
 GOOD LED
 SCARC
 DEFINITION ABUNDANCE
 ALLOCATION
 AWARDS OBTAINED IMPLIES
 REMAIN THEORETIC
 AVAILABILITY ABSENCE INFLUENTIAL
 RESOURCES
 POST-INTELLECTUAL
 INFINITE PRODUCTIVE
 SOCIETY SCIENCE
 BIOLOGY DESIRABLE
 POSITIONAL REPLICATED
 PRESUMED
 UNLIMITED
 FUNDAMENTAL
 UNCOMMONNESS
 LAW OF
 HUMAN DESIRED

KRITIK ATAS KONSEP KELANGKAAN DALAM EKONOMI KAPITALISME

Istilah kelangkaan (*scarcity*) memainkan peran sentral dalam teori ekonomi Kapitalisme. Bahkan sebagian ekonom menjadikan kelangkaan sebagai bagian dari definisi ekonomi itu sendiri.¹

Masuknya konsep kelangkaan secara eksplisit ke dalam definisi ekonomi pertama kali ditulis oleh Lionel Robbins. Menurut dia, ilmu ekonomi (*economics*) adalah sains yang mempelajari perilaku manusia sebagai sebuah hubungan antara keinginan akhir (*ends*) dan kelangkaan sarana yang memiliki alternatif penggunaan.²

Meskipun demikian, substansi tulisan Robbins mengenai definisi itu tidak banyak berbeda dengan definisi pemikir ekonomi lainnya, bahwa ilmu ekonomi berkaitan dengan proses produksi dan distribusi. John Stuart Mill, misalnya, mendefinisikan ekonomi politik—istilah yang populer sebelum munculnya ilmu ekonomi—sebagai: “sains yang berkaitan dengan hukum moral atau psikologi tentang produksi dan distribusi kekayaan.”³

Alfred Marshall mendefinisikan ekonomi

sebagai “sains yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi kekayaan.”⁴

Masuknya istilah kelangkaan ke dalam definisi ilmu ekonomi, selain menjadi masalah utama dalam ekonomi Kapitalisme, semakin mengemuka setelah Paul Samuelson, penerima Nobel pertama di bidang ekonomi, menulis konsep itu di dalam bukunya, *Economics*. Ini adalah salah satu buku teks ekonomi terpopuler setelah Perang Dunia II yang kini sudah mencapai edisi ke-19, pada tahun 1948. Menurut dia:

*Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk menggunakan sumberdaya produktif yang langka, yang memiliki penggunaan alternatif, untuk menghasilkan berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi, sekarang dan di masa depan, di antara berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat.*⁵



Menurut dia, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa diproduksi, tidak akan menjadi masalah jika sumberdaya tidak terbatas.⁶ Namun persoalannya, di tengah keterbatasan tersebut, kebutuhan (*wants*) dan keinginan (*desires*) manusia tidak terhitung jumlahnya dan sangat beragam jenisnya. Semakin maju suatu masyarakat, keinginannya akan semakin besar dan cara memuaskannya akan semakin beragam.⁷

Seseorang berada dalam situasi kelangkaan jika barang-barang terbatas secara relatif terhadap keinginannya. Samuelson mencontohkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat di AS selama dua abad terakhir, produksi tidak mampu memenuhi keinginan (*desires*) setiap orang. Jika keinginan tersebut seluruhnya harus dipenuhi, ekonomi AS harus lebih besar beberapa kali lipat dari yang ada saat ini. Demikian pula jutaan orang hidup dalam kemiskinan di Afrika dapat diatasi dengan membesarkan ekonomi mereka.⁸

Oleh karena itu, solusi untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan, menurut para ekonom kapitalis, adalah fokus pada penggunaan sumberdaya yang langka tersebut dengan cara yang paling efisien. “Dengan demikian, esensi atau inti dari ilmu ekonomi adalah mengetahui realitas kelangkaan dan mengetahui bagaimana mengatur masyarakat dengan cara yang mampu menghasilkan penggunaan sumberdaya yang paling efisien. Inilah yang menjadi kontribusi ilmu ekonomi.”⁹

Perlu digarisbawahi, pembahasan kelangkaan dalam ekonomi Kapitalisme hanya terkait dengan barang ekonomi (*economic goods*). Barang ekonomi, menurut McConnell, adalah semua sumberdaya alam, manusia dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara ringkas, para ekonom membagi sumberdaya ekonomi ke dalam empat hal utama yaitu: tanah, tenaga kerja, modal dan kemampuan entrepreneur.¹⁰

Hal-hal yang tidak berkaitan dengan

sumberdaya tersebut bukan bagian dari barang ekonomi. Robbin bahkan menyebut ilmu ekonomi merupakan studi mengenai penyebab kesejahteraan yang bersifat material.¹¹ Dengan kata lain, hal-hal yang bersifat non-material tidak menjadi pembahasan dalam ekonomi Kapitalisme.

Secara spesifik, Alfred Marshall, salah satu pendiri aliran neo-klasik, menjelaskan bahwa barang ekonomi terdiri dari dua kategori yaitu: *Pertama*, barang-barang material dapat ditransfer dan ditukar seperti tanah, rumah, perabotan dan mesin; juga materi lainnya yang ada dalam milik pribadi, seperti saham, surat utang dan hipotek. *Kedua*, barang-barang immaterial yang berada di luar diri seseorang yang berfungsi secara langsung sebagai sarana untuk memperoleh barang-barang material. Marshall mencontohkan koneksi bisnis dan profesi masuk dalam kategori ini. Persahabatan pribadi seseorang yang tidak memiliki nilai bisnis secara langsung tidak masuk dalam kategori barang ekonomi. Ia menekankan bahwa barang ekonomi adalah sesuatu yang bersifat eksternal yang dimiliki seseorang dan yang dapat diukur dengan uang.¹²

Ekonomi Pasar

Pertanyaannya, bagaimana pengalokasian sumberdaya tersebut secara efisien, yakni apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya dan bagaimana mendistribusikannya? Menurut Samuelson, sistem ekonomi suatu negaralah yang menentukan bagaimana proses tersebut dijalankan.

Pada ideologi Kapitalisme, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi pasar. Saat ini sistem ini dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Ekonomi pasar adalah ekonomi yang menjadikan individu dan perusahaan dominan dalam membuat keputusan tentang produksi dan konsumsi.¹³ Peran pemerintah dalam sistem ini adalah mengawasi fungsi pasar, mengeluarkan undang-undang yang mengatur ekonomi, dan

memberikan layanan seperti pendidikan, keamanan dan pengendalian polusi.¹⁴

Namun, menurut Krugman, upaya untuk mencapai efisiensi sumberdaya dalam masyarakat yang menganut sistem Kapitalisme kerap bertentangan (*trade-off*) dengan tujuan yang dianggap layak untuk dicapai dalam suatu masyarakat, seperti masalah keadilan atau kesetaraan. Kebijakan yang mempromosikan keadilan sering menyebabkan penurunan efisiensi dalam perekonomian, dan sebaliknya. Oleh karena itu, bagaimana pembuat kebijakan mempromosikan aspek keadilan di atas efisiensi merupakan urusan para politikus. Para ekonom tetap pada prinsip mereka bahwa sumberdaya ekonomi harus digunakan seefisien mungkin dalam mewujudkan tujuan masyarakat.¹⁵

Kritik

Ideologi Kapitalisme telah berkembang cukup lama. Kontribusinya atas penderitaan penduduk dunia juga sangat besar. Sayangnya, dewasa ini kritik terhadap ideologi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan sistem ekonominya, lebih banyak berfokus pada kesalahan implementasi sistem itu dan pemikiran-pemikiran cabangnya. Adapun kritik mendalam terhadap pemikiran asas yang menjadi pilar sistem tersebut relatif jarang dijumpai.

Sebagai partai politik yang berjuang untuk menggantikan dominasi sistem Kapitalisme dengan sistem Islam, Hizbut Tahrir telah memberikan koreksi atas fondasi ekonomi Kapitalisme, khususnya berkaitan dengan konsep: kelangkaan relatif, nilai (*value*) dan harga; sekaligus menyodorkan konsep sistem ekonomi Islam yang seharusnya diadopsi umat manusia, terutama oleh umat Islam.

Menurut Hizbut tahrir, kelemahan konsep kelangkaan relatif dalam sistem Kapitalisme antara lain:¹⁶ *Pertama*, para pemikir Kapitalisme, seperti yang digambarkan di atas, telah menggabungkan antara aspek peningkatan produksi barang ekonomi dengan aspek distribusi

dan kepemilikan ke dalam pembahasan ilmu (sains) ekonomi. Padahal, peningkatan produksi merupakan ranah ilmu yang bersifat universal, yang tidak dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh seseorang atau suatu negara. Hal ini berbeda dengan konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan. Ini merupakan ranah sistem yang sangat dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Ia tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu (sains) yang bersifat universal. Sistem distribusi dalam sistem Kapitalisme, misalnya, berbeda dengan yang diajarkan oleh sistem Islam dan sistem Komunisme.

Kedua, pembatasan dan penekanan kebutuhan manusia hanya pada barang yang bersifat material merupakan kekeliruan besar. Sebabnya, selain kebutuhan yang bersifat material, ada juga kebutuhan yang bersifat non-material, yaitu kebutuhan moral dan kebutuhan spiritual. Kedua jenis kebutuhan tersebut juga membutuhkan barang dan jasa dalam pemenuhannya.

Ketiga, pandangan yang membatasi kebutuhan pada aspek materi dan mengabaikan aspek spiritual, moral dan akhlak sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal demikian akan melahirkan individu dan masyarakat yang kering pada aspek moral dan spiritualnya. Dampaknya, perilaku masyarakat yang hidup dalam sistem Kapitalisme cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam mengejar keuntungan ekonomi. Hal ini terlihat pada maraknya penipuan, eksploitasi wanita dan pengabaian yang orang-orang lemah secara ekonomi.

Keempat, konsep yang bertumpu pada aspek materi tersebut juga berdampak pada berkembangnya interaksi sosial masyarakat yang bersifat individualis dan tidak memedulikan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Individu-individu masyarakat lebih memfokuskan diri untuk memenuhi kebutuhan materi yang mereka inginkan. Mereka tak memedulikan apakah dampaknya menguntungkan atau merugikan masyarakat, apakah materi itu halal



atau haram menurut keyakinan masyarakat. Akibatnya, minuman beralkohol dan pornografi, misalnya, diproduksi lantaran ada pihak yang menginginkannya, meskipun keduanya sangat merusak masyarakat.

Adapun penekanan para pemikir ekonomi Kapitalisme—seperti Adam Smith, Stuart Mills, Alfred Marshall, dan Malthus—pada aspek materi dan pengabaian mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek non-materi seperti aspek spiritual, tidak lepas dari pengaruh ide sekularisme, yakni pemisahan urusan dunia dari gereja. Ide ini mulai berkembang pesat pada saat mereka mencetuskan teori-teori mereka pada pertengahan abad ke-18. Bahkan dapat dikatakan bahwa ide sekularisme menjadi dasar pendirian ekonomi Kapitalisme.¹⁷

Kelima, konsep kelangkaan sarana untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap tak terbatas tersebut menyebabkan para ekonom memfokuskan perhatian mereka pada upaya peningkatan produksi. Perhatian mereka pada distribusi menjadi nomor berikutnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika negara-negara kapitalis hanya berfokus untuk mendorong produksi setinggi mungkin, yang diukur dengan pertumbuhan PDB, dengan membebaskan rakyatnya, melalui konsep liberalisme, bekerja dan memiliki barang-barang ekonomi yang mereka inginkan. Dengan demikian, negara tidak fokus untuk mendistribusikan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masing-masing individu. Mereka percaya bahwa mekanisme harga menjadi metode paling efektif dalam mendistribusikan kekayaan tersebut. Padahal nyatanya banyak orang yang tidak mampu membayar harga barang pokok yang mereka butuhkan.

Peningkatan taraf hidup dengan model ini jelas keliru dan tidak akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu masyarakat secara keseluruhan. Sebabnya, kebutuhan itu sifatnya individual sehingga proses distribusinya juga bersifat individual. Model ini terbukti telah menyebabkan tingginya angka ketimpangan

ekonomi di dalam masyarakat.

Keenam, sebagai kesimpulan, pandangan bahwa kelangkaan barang dan jasa tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai persoalan utama ekonomi jelas keliru. Pasalnya, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi hanyalah kebutuhan pokok yang sifatnya terbatas, bukan kebutuhan sekunder dan tersier yang senantiasa meningkat. Kebutuhan pokok itu bersifat tetap dan dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang diproduksi masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Hizbut Tahrir, problem ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana mendistribusikan barang-barang ekonomi kepada masing-masing individu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan membantu mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Wallâhu a'lam bis-shawâb. [Muis]

Catatan kaki:

- ¹ Montani, *Scarcity*, dalam Eatwell et al. (ed.), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, (London: Palgrave Macmillan, 2018), 11.965.
- ² *Ibid.*, 3.437; Lionel Robbins, *An Essay on The Nature and Significance of Economic Science* (London: MacMillan & Co, 1932), 15.
- ³ *Ibid.*
- ⁴ Alfred Marshall, *Principle of Economics*, edisi ke-8 (England: Palgrave Macmillan, 2013), 70.
- ⁵ Paul Samuelson dan A. Scott, *Economics*, edisi ke-2 (Toronto: McGraw-Hill, 1976), 5.
- ⁶ *Ibid.*, 18.
- ⁷ Marshall, *Principle of Economics*, 73.
- ⁸ Paul Samuelson dan W. Nordhaus, *Economics*, edisi ke-19e (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010), 4.
- ⁹ *Ibid.*, 4-5.
- ¹⁰ Campbell McConnell et al., *Economics: Principles, Problems, and Policies*, edisi ke-8 (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010), 10.
- ¹¹ Robbins, *An Essay on The Nature*, 4.
- ¹² Marshall, *Principle of Economics*, 47.
- ¹³ Samuelson dan Nordhaus, *Economics*, 8.
- ¹⁴ *Ibid.*, 8.
- ¹⁵ Paul Krugman dan Robin Wells, *Macroeconomics*, edisi ke-4 (New York: Worth Publisher, 2015), 16.
- ¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhany, *An-Nidham al-Iqtishady fi al-Islam*, edisi ke-4 (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 25-33.
- ¹⁷ Salim, M. Fathi, *Nadhrâh fi Usus al-Iqtishady ar-Ra'sumaly* (tp, 1997); Mohammad Malkawy, *Fall of Capitalism and Rise of Islam* (USA: Xlibris Corporation, 2010), 30.

PROBLEM ASASI EKONOMI (Pasal 124 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr-Lanjutan*)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, problem ekonomi adalah distribusi harta dan jasa pada seluruh individu rakyat, serta bagaimana memampukan rakyat dalam memanfaatkan barang dan jasa, dengan cara memberi kesanggupan mereka untuk mendapatkan dan mengusahakan keduanya. Dengan kata lain, problem ekonomi adalah distribusi, bukan produksi.

Dalil yang mendasari kesimpulan ini adalah: *Pertama*, nash-nash syariah yang datang untuk menjelaskan solusi problem kemiskinan, serta kebolehan memiliki dan memanfaatkan harta. *Kedua*, realitas kehidupan ekonomi.

Bila dinisbatkan pada dalil-dalil syariah, terdapat nash-nash syariah yang datang untuk menyelesaikan problem kemiskinan individu, seperti zakat yang didistribusikan untuk delapan golongan, sedekah kepada yang membutuhkan, *kafarah* (denda) yang diwujudkan dalam bentuk memberi makan orang miskin, larangan kikir dan ihtikar (menimbun), dan lain sebagainya. Hukum-

hukum yang terkandung dalam nash-nash ini pada dasarnya ditetapkan untuk mengatasi problem kemiskinan individu akibat barang dan jasa tidak terdistribusi kepada mereka.

Terkait dengan masalah kesanggupan setiap individu rakyat untuk memperoleh dan mengusahakan harta dan jasa, syariah memberi solusi dengan cara membolehkan setiap orang untuk memiliki harta melalui sebab-sebab yang dibolehkan syariah seperti bekerja, hibah, waris, dan lain sebagainya. Seseorang tidak dihalang-halangi untuk memiliki, mengusahakan dan memanfaatkan harta pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam. Dengan cara seperti ini setiap individu terdorong bekerja sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dari sisi fakta, sesungguhnya berbagai krisis ekonomi yang melanda sebuah negara adalah disebabkan karena buruknya distribusi harta di tengah-tengah masyarakat, bukan karena sedikitnya produksi. Lahirnya sistem sosialis yang digagas kaum sosialis, termasuk di dalamnya aliran komunis, merupakan imbas



kezaliman akibat penerapan sistem kapitalis. Di dalam masyarakat kapitalis, produksi dipacu sedemikian rupa hingga melahirkan apa yang disebut dengan “over produksi”. Hanya saja, distribusi yang buruk dalam sistem ini mengakibatkan kekayaan menumpuk hanya pada segelintir orang. Saat yang sama, banyak orang hidup di bawah standar dan mengharap belas kasihan orang yang kaya yang hampir mustahil mereka dapatkan.

Di dalam sistem kapitalis, sekitar 80% dari nilai total pendapatan dunia dihasilkan oleh negara-negara maju yang jumlah penduduknya kurang dari 20% penduduk dunia. Ini menunjukkan lebih dari 4/5 penduduk dunia hanya menghasilkan 1/5 dari total output dunia. Sebaliknya, negara-negara Dunia Ketiga dengan jumlah penduduk hampir meliputi 80% dari total penduduk dunia hanya memperoleh bagian pendapatan di bawah 20% dari total pendapatan dunia.

Realitas tersebut menunjukkan betapa

Di dalam sistem kapitalis, sekitar 80% dari nilai total pendapatan dunia dihasilkan oleh negara-negara maju yang jumlah penduduknya kurang dari 20% penduduk dunia. Ini menunjukkan lebih dari 4/5 penduduk dunia hanya menghasilkan 1/5 dari total output dunia. Sebaliknya, negara-negara Dunia Ketiga dengan jumlah penduduk hampir meliputi 80% dari total penduduk dunia hanya memperoleh bagian pendapatan di bawah 20% dari total pendapatan dunia.

timpangnya pendapatan antara negara-negara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju. Pada tahun 1997, pendapatan perkapita paling tinggi di dunia adalah Swiss. Angka perkapitanya 403 kali dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita dari salah satu negara termiskin di dunia, Ethiopia, dan masih 114 kali lebih besar dibanding dengan negara terluas di dunia, yakni India.

Pada tahun 1993, sekitar 1,3 miliar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan (sangat miskin). Jika dilihat masing-masing wilayah, ditemukan tingkat kemiskinan tertinggi di Asia Selatan, di mana jumlah penduduk termiskin terbesar hidup, yakni 515 juta. Wilayah Afrika Sub-Sahara yang memiliki 219 juta penduduk sangat miskin memiliki tingkat pertumbuhan kemiskinan paling cepat. Diperkirakan tingkat pertumbuhan kemiskinan di Afrika mencapai 50%, pada abad 21.

Selain harus membanting tulang untuk mendapatkan pendapatan, penduduk negara berkembang juga harus berjuang menghadapi penyakit dan kekurangan gizi. Tidak sedikit yang kemudian menyerah dan mati, karena penyakit dan malnutrisi.

Meskipun kondisi kesehatan negara berkembang sudah membaik, sejak tahun 1960, kenyataannya pada tahun 1998 rata-rata usia harapan hidup di negara-negara yang paling terbelakang di dunia hanya mencapai 48 tahun. Bandingkan dengan usia 63 tahun di negara berkembang lainnya dan 75 tahun di negara-negara maju.

Tingkat kematian bayi (*infant mortality rates*), yakni jumlah anak yang mati sebelum berusia 1 tahun untuk setiap 1000 kelahiran, di negara-negara yang paling terbelakang rata-rata mencapai 96; sedangkan di negara-negara yang berkembang lainnya mencapai 64; dan 8 di negara-negara maju.

Pada tahun 1970-an, lebih dari 1 miliar



penduduk negara-negara Dunia Ketiga menderita kekurangan gizi. Pada dekade 1990-an keadaan ini semakin memburuk, terutama di kawasan Afrika sub-Sahara. Penduduk di kawasan ini bahkan sering tidak memiliki sesuatu sekadar untuk mengganjal perut. Wabah kelaparan terus melanda Afrika hingga berlarut-larut. Di Asia dan Afrika, lebih dari 60% penduduknya tidak mampu memenuhi keperluan kalori minimum yang diperlukan untuk hidup sehat. Padahal kekurangan nutrisi ini bisa ditutup hanya dengan 2% dari total produksi padi-padian dunia. Hal ini bertentangan dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa kelaparan dunia disebabkan karena terbatasnya produksi pertanian. Walhasil, yang menjadi sebab kelaparan adalah buruknya distribusi pangan se dunia.

Adapun ketidakmampuan negara-negara Dunia Ketiga mengakses layanan publik dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel. Deprivasi Kesehatan Manusia di Negara-negara Dunia Ketiga, 1995

Bentuk Deprivasi	Jumlah Penderita
Ketiadaan akses pelayanan kesehatan	766 juta
Ketiadaan sumber air bersih	1,2 miliar
Ketiadaan sanitasi	1,9 miliar
Kematian balita (sebelum berumur 5 tahun)	12,2 juta
Malnutrisi di kalangan balita (di bawah 5 tahun)	158 juta

Sumber: United Nations Development Program, Human Development Report, 1994, halk.134-135.

Pada tahun 1990, menurut data statistik, 67% anak-anak di Bangladesh, 43% di Afrika Selatan, 63% anak-anak India, 42% di Vietnam, 38% di Ethiopia, dan 36% di Ghana kekurangan berat badan.

Data terakhir, pada tahun 1995, disebutkan bahwa jumlah dokter di negara-negara paling terbelakang rata-rata hanya 4,4 untuk setiap 100.000 penduduk. Ironisnya, sebagian besar fasilitas kesehatan di negara-negara berkembang terpusat di kota-kota besar yang jumlahnya hanya 25% dari total jumlah penduduk. Di India, contohnya, 80% dari dokternya membuka praktik di daerah perkotaan yang hanya dihuni oleh sekitar 20% penduduk. Kota Bolivia hanya sepertiga dari penduduknya hidup di kota-kota, tetapi di situlah terdapat 90% fasilitas kesehatan. Di Nairobi, ibukota Kenya, angka perbandingan antara penduduk dengan dokter adalah 672:1, sedangkan di daerah-daerah pedesaannya dimana 87% penduduk Kenya tinggal, angka perbandingannya jauh lebih memprihatinkan, yakni 20.000:1.

Dalam penyediaan biaya kesehatan, 75% biaya kesehatan negara-negara berkembang dialokasikan untuk membangun rumah-rumah sakit yang ada di kota-kota besar yang tarifnya relatif mahal.

Korban meninggal akibat penyakit AIDS di seluruh dunia diperkirakan 6 juta jiwa, sedangkan yang terjangkit virus HIV lebih dari 30 juta. Padahal 90% dari total penduduk yang terkena virus HIV ada di negara-negara berkembang. Jumlah penduduk wanita yang terkena virus HIV berjumlah hampir setengahnya dari total penduduk yang terkena infeksi HIV. Sedangkan 1 juta anak juga diperkirakan terkena virus HIV.

Pada tahun 1998, jumlah terbesar korban HIV/AIDS, yaitu sebanyak 19,83 juta orang, berada di wilayah Afrika sub-Sahara, 6,35 juta berada di Asia, dan 1,28 juta berada di negara-negara Amerika Latin.

Ilustrasi atas rendahnya kualitas hidup di negara-negara berkembang terlihat juga dalam bidang pendidikan. Di Amerika Latin diperkirakan 60 dari 100 anak didik yang



memasuki sekolah dasar putus sekolah sebelum sempat menamatkannya. Di negara-negara Asia dan Afrika, median anak putus sekolah berkisar 20-54%. Akan tetapi, jurang perbedaan antarnegara yang berada dalam satu kawasan ternyata juga sangat besar. Ada sejumlah negara kawasan Afrika dan Asia yang tingkat putus sekolahnya saja mencapai 81% dan 64%.

Pada tingkatan sekolah menengah pertama, median anak putus sekolah mencapai 38,7% bagi negara-negara berkembang di kawasan Afrika, dan 18% untuk negara berkembang di kawasan Latin dan Asia. Di Eropa, angka ini hanya sekitar 11,4%.

Persentase penduduk dewasa (yakni 15 tahun ke atas) yang buta huruf di negara-negara berkembang telah menurun dari 60% pada tahun 1960 menjadi 31 persen di tahun 1995. Namun, sehubungan dengan demikian pesatnya pertumbuhan penduduk, jumlah absolut penduduk dewasa yang buta huruf dalam periode yang sama justru telah meningkat dari sekitar 150 juta jiwa menjadi kira-kira 872 juta jiwa pada tahun 1996. Tingkat buta huruf penduduk daerah pedesaan yang paling tinggi ditemukan di daerah-daerah Asia Selatan (50%), diikuti negara-negara Arab(43%), Afrika sub-Sahara (43%), Asia Timur (16%), dan Amerika Latin (13%). Di Amerika Utara dan Eropa, tingkat buta huruf penduduk dewasanya masing-masing hanya sekitar 1,0% dan 2,5%.

Negara-negara berkembang juga menghadapi masalah penyediaan lapangan pekerjaan. Pengangguran di negara berkembang masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.

Tabel Tenaga Kerja dan Pengangguran di Negara-negara Berkembang, 1960-1990 (dalam satuan ribuan).

Indikator	1960	1970	1973	1980	1990
Semua Negara Berkembang					
Penyerapan	507416	617244	658000	773110	991600
Pengangguran	36466	48798	54130	65620	88693
Persentase pengangguran	6,7	7,4	7,6	7,8	8,2
Persentase Total Pengangguran (terbuka terselubung)	25	27	29	-	-
Afrika	31	39	38	-	-
Asia	24	26	28	-	-
Amerika Latin	18	20	25	-	-
Seluruh Afrika					
Penyerapan	100412	119633	127490	149390	191180
Pengangguran	8416	12831	13890	15973	21105
Persentase pengangguran	7,7	9,6	9,8	9,8	9,9
Seluruh Asia					
Penyerapan	340211	413991	441330	516800	660300
Pengangguran	24792	31440	34420	43029	59485
Persentase pengangguran	6,8	7,1	7,2	7,7	8,3
Seluruh Amerika Latin					
Penyerapan	66793	83620	89180	106920	140120
Pengangguran	3258	4527	5820	6618	8103
Persentase pengangguran	4,7	5,1	6,1	5,8	5,5

Sumber: Yves Sabolo, "Employment and Unemployment, 1960-1990, International Labor Review 112 .

Data di atas menunjukkan bahwa pengangguran di negara-negara berkembang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat dengan jelas bahwa pengangguran pada tahun 1960 sebanyak 36,5 juta, melonjak menjadi 54 juta pada tahun 1970. Jadi dalam periode ini terjadi peningkatan pengangguran sebanyak 46%, atau rata-rata 3% pertahun. Bila pengangguran dihubungkan dengan tingkat pendidikan akan terlihat pada data-data berikut ini:

Tabel. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Sejumlah Negara-negara Berkembang (persen).



Negara	Tahun	A	B	C	D
Aljazair	1989	9,2	24,2	28,9	5,8
Tunisia	1989	11,2	20,4	17,4	5,2
Ghana	1988	3,4	7,6	13,5	14,7
Kenya	1986	13,5	15,6	22,2	5,4
Zimbabwe	1987	1,6	6,8	11,6	-
Malaysia	1985	4,7	22,9	30,6	3,9
India	1989	2,0	3,0	9,0	12,0
Indonesia	1985	0,6	1,5	7,5	5,3
Sri Lanka	1981	4,5	14,5	15,1	4,2
Pantai Gading	1985	1,0	5,2	21,7	13,7

Catatan:

A = Pengangguran di kalangan yang tidak berpendidikan

B = Pengangguran di antara lulusan sekolah dasar

C = Pengangguran di antara lulusan sekolah lanjutan

D = Pengangguran di antara lulusan universitas

Sumber : UNDP, Human Development Report, 1993, hal.38

Data di atas menunjukkan bahwa pengangguran yang berasal dari penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi cukup tinggi. Di Indonesia, misalnya, pengangguran dari kalangan berpendidikan tinggi sebanyak 5,3% lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan sekolah dasar.

Dari data lain juga didapatkan bahwa pengangguran yang terbanyak berada pada usia 15-24 tahun. Di Indonesia, pada tahun 1986, pengangguran di usia ini (15-24 tahun) sebanyak 23,4%, lebih banyak dibandingkan usia di atas 25 tahun yang hanya 2,6%. Di Srilanka bahkan mencapai jumlah 40,2%, Kenya 38,1%, India 19,4%, dan di Filipina 18,6%.

Kemiskinan, tingkat pendapatan rendah, serta pendidikan minim secara tidak langsung berpengaruh terhadap sikap penduduk negara berkembang kepada lingkungan hidup. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara-negara berkembang lebih disebabkan karena mereka tidak memiliki pilihan lain—karena kemiskinan mereka—untuk menjalani hidup tidak sehat.

Selama dekade 1980-an, tingkat kesuburan tanah perkapita merosot 1,9% pertahun. Masalah ini pada gilirannya memperparah kelangkaan lahan subur yang kemudian memaksa penduduk miskin di daerah pedesaan

untuk mengandalkan hidupnya pada lahan-lahan marjinal yang produktivitas dan kesuburannya sangat terbatas. Sejauh ini diperkirakan bahwa lebih dari 60% penduduk termiskin di berbagai negara berkembang harus mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan mengandalkan lahan pertanian marjinal yang sulit ditanami.

Akhirnya, hutan yang jumlahnya semakin sedikit dibabat dan diolah menjadi lahan garapan, dan kebanyakan dari lahan itu mengalami pengikisan kualitas dan kesuburan secara cepat sebagai akibat dari metode-metode pertanian yang sama sekali tidak efisien. Setiap tahunnya, dunia kehilangan sekitar 270.000 kilometer persegi lahan subur. Secara keseluruhan 1,2 miliar area lahan telah kehilangan kesuburannya. Untuk membayangkan luas area ini, bayangkan luas wilayah Cina dan India yang dijadikan satu.

Buruknya sanitasi dan kesehatan yang dialami penduduk negara berkembang telah menyebabkan masalah-masalah baru. Hampir 80% dari total penyakit yang diderita oleh penduduk negara Dunia Ketiga diakibatkan karena sanitasi air yang payah. Sembilan puluh persen (90%) dari total kematian anak-anak yang jumlahnya mencapai 13 juta jiwa setiap tahunnya juga disebabkan karena masalah serupa. Meskipun begitu, jumlah penduduk yang harus hidup tanpa sanitasi dan air bersih justru terus meningkat. Pada periode antara tahun 1970 sampai tahun 1980, jumlahnya terus bertambah 135 juta jiwa.

Di Amerika Latin, pada tahun 2030 diprediksi bahwa penyediaan air bersih untuk penduduknya boleh dikatakan sebagai kemustahilan. Ini disebabkan karena ledakan pertumbuhan penduduk demikian besarnya. Jumlah penduduk yang harus dilayani meningkat 250%, padahal untuk sekarang saja tidak semua orang bisa menikmati layanan social tersebut. Angka tersebut sudah membuat



kita tercengang, padahal ada 1,2 miliar penduduk di daerah-daerah pedesaan yang keperluan-keperluan sanitasinya harus dipenuhi.

Unsur-unsur polusi atau polutan yang memenuhi udara juga akan mengancam kesehatan penduduk negara-negara Dunia Ketiga. Polusi di dalam rumah akibat pembakaran mengancam 400 juta hingga 700 juta manusia yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Asap dan percikan debu dapur diyakini telah menyebabkan kematian 4,3 juta anak-anak setiap tahunnya sebagai akibat penyakit pernafasan akut.

Di daerah perkotaan, sumber polusi yang mengancam kesehatan lebih banyak lagi. Menurut laporan WHO, 1,3 miliar manusia yang hidup di daerah perkotaan menjalani kehidupan sehari-hari berdampingan dengan aneka rupa polutan udara yang membahayakan. Pada masa mendatang kondisinya diperkirakan akan semakin mengerikan, karena diprediksi pada tahun 2020 nanti jumlah pabrik di daerah perkotaan akan meningkat 600% dari jumlah yang ada sekarang ini.

Sebagai ilustrasi sederhana betapa tidak efisiennya kehidupan di negara-negara berkembang adalah apa yang terjadi di Lima dan Jakarta. Keluarga-keluarga miskin di kota itu hanya bisa mengkonsumsi air 1/6 dari volume air yang dikonsumsi oleh keluarga-keluarga yang berpenghasilan tinggi. Ironisnya, pengeluaran mereka untuk membeli air justru tiga kali lipat lebih tinggi. Padahal, air yang mereka konsumsi kualitasnya sangat rendah sehingga harus direbus lama. Ini tentunya semakin memperbesar biaya mereka untuk membeli bahan bakar. Selain itu, kompor yang mereka gunakan tingkat efisiensinya rendah, sehingga asap dan polutan yang dihasilkan juga sangat tinggi. Jika mereka diharuskan memasak air sesuai dengan yang disarankan pemerintah, maka tambahan biaya untuk bahan bakar akan menghabiskan 29% dari total pendapatan

Mempertahankan eksistensi sistem kapitalis sama artinya dengan melanggengkan penderitaan dan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, mengakhiri sistem buruk ini merupakan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia. Hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam semata, kesejahteraan dan kemakmuran bisa diwujudkan di tengah-tengah umat manusia

mereka. Di Jakarta, sekitar US\$ 50 juta habis pertahun hanya untuk merebus air.

Realitas di atas menunjukkan kepada kita, bahwa problem ekonomi adalah buruknya distribusi, bukan sedikitnya produksi. Buruknya distribusi kekayaan menyebabkan banyak orang ditimpa berbagai macam persoalan. Pendapatan rendah menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan publik sangat minim. Akibatnya, banyak orang mengalami deprivasi. Deprivasi diikuti dengan lahirnya problem-problem lain yang semakin memberatkan masyarakat.

Mempertahankan eksistensi sistem kapitalis sama artinya dengan melanggengkan penderitaan dan kesengsaraan manusia. Sebaliknya, mengakhiri sistem buruk ini merupakan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia. Hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam semata, kesejahteraan dan kemakmuran bisa diwujudkan di tengah-tengah umat manusia. [Gus Syams]

BOLEHKAH BERPERKARA DI PENGADILAN DARUL KUFUR?

Soal:

Di dalam surat an-Nisa ayat 60 Allah SWT melarang kita pergi kepada *thâghût* untuk meminta keputusan hukum. Namun, saat Khilafah tidak ada, setiap negeri Muslim diperintah oleh pemimpin *thâghût*. Pertanyaannya, jika kita perlu menyelesaikan suatu persengketaan, bisakah kita mengajukan perkara kita ke pengadilan pemimpin *thâghût* itu?

Asumsikan saja, salah seorang anggota keluarga saya diperkosa. Lalu apakah dibenarkan dia pergi ke pengadilan untuk mendapat keadilan, sementara pengadilan akan dilakukan oleh *thâghût* demokratis? Tentu mereka tidak menghukumi dengan syariah. Padahal Allah melarang kita bertahkim kepada *thâghût* yang menyelesaikan persengketaan dengan hukumnya sendiri, dengan meninggalkan hukum Allah SWT.

Jawab:

Kami telah mengeluarkan *Jawab-Soal* pada 18/2/2009. Berikut teksnya:

Boleh bagi orang yang hidup di darul kufur, yang di situ tidak ada mahkamah *syar'iyah*, untuk merujuk (datang) ke mahkamah/pengadilan (sekular) guna menolak kezaliman atas dirinya dan menghalangi haknya diambil oleh pihak lain. Dengan syarat, hak itu terbukti secara *syar'i* miliknya, dan bukan menurut hukum undang-undang mereka yang menyalahi

syariah. Misal, orang yang menjadi korban pencurian. Islam mengharuskan untuk mengembalikan kepada dia hartanya yang dicuri itu. Dalam hal ini boleh orang yang kecurian hartanya untuk datang ke mahkamah/pengadilan guna mendapatkan kembali hartanya yang dicuri itu.

Contoh lain, orang menjual rumah kepada seseorang dengan harga sejumlah tertentu dibayarkan di muka, kemudian sisanya diangsur. Lalu pembeli membayar sebagian dari jumlah itu dan menolak membayar sisanya atau dia mengingkarinya, sementara dia telah membeli sekaligus mendiami rumah itu. Islam mengharuskan untuk mengembalikan kepada penjual apa yang menjadi haknya dari pembeli. Oleh karena itu, boleh bagi penjual itu datang ke mahkamah/pengadilan untuk mengembalikan kepada dia harga rumahnya yang diingkari oleh pembeli itu.

Begitu. Artinya, boleh bagi seseorang datang ke mahkamah/peradilan di darul kufur untuk menghalangi kezaliman atas dirinya dan mengembalikan kepada dia apa yang menjadi haknya dengan ketentuan hak itu terbukti miliknya secara *syar'i*.

Sebaliknya, jika hak itu ditetapkan sebagai miliknya menurut undang-undang positif (sekular), tetapi menyalahi syariah, ia tidak boleh datang ke mahkamah/pengadilan untuk mendapatkan hak yang menyalahi syariah ini. Misal, pemilik saham di dalam *syirkah musahamah* (PT) yang akadnya batil. Ketika pembagian

keuntungan (deviden) kepada para pemilik saham, dia memandang bahwa keuntungan yang diberikan kepada dia menurut nisbah sahamnya lebih kecil dari apa yang menjadi haknya. Dalam hal ini, dia tidak boleh datang ke mahkamah/peradilan darul kufur untuk mendapat semua haknya yang didasarkan pada sahamnya itu. Sebab hak ini ditetapkan sebagai miliknya menurut undang-undang positif, dan itu menyalahi syariah. Sebabnya, *syirkah* tersebut batil dan apa yang menjadi akibatnya berupa keuntungan itu tidak dibenarkan oleh syariah. Yang wajib bagi seorang Muslim adalah keluar dari *syirkah* semacam ini.

Misal lain, orang yang menyimpang hartanya dengan riba di bank, dengan bunga tertentu. Lalu bank memberikan bagiannya kepada dia menurut tingkat bunga dengan jumlah lebih sedikit dari yang disepakati dengan bank. Dalam hal ini tidak boleh bagi dia datang ke mahkamah/pengadilan darul kufur untuk menuntut semua jumlah riba itu dan memaksa bank membayar *nisbah* riba yang jadi haknya. Pасalnya, hak ini ditetapkan menurut undang-undang positif (sekular) yang menyetujui bank-bank ribawi. Hak itu tidak ditetapkan sebagai miliknya menurut syariah. Yang wajib bagi seorang Muslim adalah membatalkan muamalah ribawiyah dengan bank ini.

Begitulah. Artinya, jika seseorang dizalimi atau haknya diambil pihak lain, dan hak itu ditetapkan sebagai miliknya menurut hukum-hukum syariah maka dia boleh datang ke mahkamah/pengadilan darul kufur, tempat dia hidup untuk menghilangkan kezaliman itu atas dirinya dan mengembalikan apa yang menjadi haknya.

Sebaliknya, jika hak itu ditetapkan sebagai miliknya menurut undang-undang positif (sekular) dan bukan menurut hukum syariah, tidak boleh bagi dia datang ke

Jika seseorang dizalimi atau haknya diambil pihak lain, dan hak itu ditetapkan sebagai miliknya menurut hukum-hukum syariah maka dia boleh datang ke mahkamah/pengadilan darul kufur, tempat dia hidup untuk menghilangkan kezaliman itu atas dirinya dan mengembalikan apa yang menjadi haknya.

mahkamah/pengadilan darul kufur tempat dia hidup untuk mendapatkan hak ini. Meski demikian, yang lebih afdhal bagi dia adalah berupaya mengembalikan haknya dengan jalan meminta tolong mediator orang-orang baik di tengah masyarakat sebelum dia datang ke mahkamah/pengadilan itu.

Selesai jawaban kami terdahulu.

Saya berharap, di dalam jawaban ini ada kecukupan jawaban.

Wāllāh a'lam awa ahkam. [Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah/Amir Hizbut Tahrir]

Sumber:

- 1 [Http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/64458.html](http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/64458.html)
- 2 <https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285544578192/1216757195188016/?type=3&theater>



KELUARGA BAHAGIA DAN SEHAT TANPA ASURANSI

Ummu Nadhifah

Setiap keluarga pasti menginginkan rumah tangganya bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Tentu kebahagiaan itu diawali dengan keluarganya menjadi keluarga yang sehat. Berawal dari kesehatan yang prima, anggota keluarga akan selalu bersemangat, riang dan bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari.

Setiap keluarga muslim tentu menginginkan keluarganya bahagia secara hakiki dan mencapai puncak kebahagiaan. Menurut Imam al-Qudha'iy dalam *Musnad ash-Shihab*, kebahagiaan dari segala kebahagiaan adalah panjang usia dalam ketaatan kepada Allah SWT. Keluarga yang bahagia secara hakiki adalah jika anggota keluarga, ayah, ibu dan anak-anak senantiasa bersemangat, bahagia dalam beribadah. Bahkan menjadikan ibadah sebagai kebutuhan dan nyawa dalam hidupnya.

Beribadah kepada Allah adalah melaksanakan seluruh aktivitas sesuai dengan syariah Islam dan ikhlas melakukan hanya karena Allah. Karena itu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang sehat, layak dan *syar'i* adalah ibadah. Memenuhi kebutuhan pakaian yang indah, layak dan *syar'i* adalah ibadah. Memenuhi kebutuhan kendaraan yang aman

dan *syar'i* adalah ibadah. Memenuhi pangan yang sehat, enak dan halal adalah ibadah. Memenuhi kebutuhan pendidikan yang *syar'i* dan mengantarkan sukses dunia akhirat adalah ibadah. Demikian pula keluarga memenuhi kebutuhan keamanan dan kesehatan yang layak dan *syar'i*. Semua itu adalah ibadah.

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang layak dan *syar'i*, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Siapkan Makanan dan Minuman yang Halal dan Sehat.

Di era sekarang ibu sebagai pengatur rumah harus semakin hati-hati dan selektif. Termasuk kewajiban ibu adalah menyiapkan makanan yang halal dan *thayyib* (sehat), yang disukai suami dan anak-anak Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian (QS al-Baqarah [2]: 168).

Imam Ali Ash Shabuni dalam *Mukhtashar Ibn Katsir* menjelaskan bahwa maksud dari kata *halal[an] thayyib[an]* (halal dan baik) adalah makanan atau minuman yang baik untuk dirinya dan sehat, tidak memberi bahaya pada badan dan akal nya.

Makanan dan minuman yang haram akan menjadikan hati manusia keras dan buta. Akibatnya, seseorang lebih cenderung berbuat maksiat, susah memperoleh ilmu yang bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ibnu Abbas ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْغِ
اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ. فَقَالَ: «يَا سَعْدُ،
أَطِيبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْدِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي
جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتْ
حُمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالْتَأُرْ أَوْلَى بِهِ»

Saad bin Abi Waqash berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku orang yang doanya terkabul." Rasulullah saw. bersabda, "Saad, jagalah makananmu, niscaya kamu menjadi seorang yang doanya mustajab. Demi Allah Yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sesungguhnya ada kalanya seseorang memasukkan makanan yang haram dalam perutnya, lalu tidak diterima amalnya selama empat puluh hari. Setiap orang yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram atau riba, neraka lebih tepat menjadi tempatnya." (Ali ash-Shabuni, *Mukhtashar Ibn Katsir*, Tafsir QS al-Baqarah [2]: 168).

2. Budayakan Pola Hidup Bersih, Rapi, Sehat, Aman dan Nyaman.

Kebersihan, kerapihan dan kenyamanan rumah akan menjadikan anggota keluarga

betah dan nyaman di rumah. Demikian pula sikap dan akhlak mulia anggota keluarga akan menjadikan keluarga betah, nyaman dan rindu berkumpul di rumah. Semua anggota keluarga akan merasa bahagia jika mampu merasakan "rumahku adalah surgaku, ayah dan ibuku adalah surgaku". Begitu pula orangtua merasakan "anak-anaku adalah surgaku".

Membiasakan diri dan keluarga agar senantiasa berpikir positif dan berakhlak terpuji adalah penting, karena perintah dari Allah. Di samping itu ternyata 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan. Karena itu kita harus meninggalkan akhlak tercela: pemarah, emosional, suka merendahkan orang lain, berprasangka buruk, dendam, menyimpan kesedihan terlalu lama, stres, putus asa, khawatir dan ketakutan yang berlebihan. Akhlak tercela inilah yang berkontribusi besar menyebabkan berbagai penyakit (Sumber: *The Healing & Discovering the Power of Water*).

3. Ayah Memberi Nafkah yang Halal dan Wajib Menjaga Keluarga dari Api Neraka.

Ibu sebagai manajer keuangan dalam rumah tangga harus mampu menyisihkan sebagian uang belanja untuk biaya tak terduga, termasuk dana kesehatan. Ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah yang halal termasuk dana kesehatan. Ayah bertanggung jawab menjaga diri dan keluarganya dari api neraka: Terkait QS at-Tahrim ayat 6 Ibnu Abbas ra. menyatakan: "Hai orang-orang yang mengimani Muhamad saw. dan al-Quran, jagalah diri kalian, kaum kalian dan keluarga kalian—yaitu anak-anak dan istri-istri kalian—dari api neraka. Didiklah, ajarilah mereka al-khayr, yaitu agama Islam, dengan menerapkan aturan Islam, niscaya hal itu akan menyelamatkannya dari neraka." (Ibn Abbas, *Tanwir Miqbas*, II/95).

4. BPJS Haram dan Merugikan Keluarga.

Dalam Islam Negara berkewajiban menyiapkan layanan kesehatan berkualitas dan gratis. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. Sebagai kepala negara, beliau pernah menyiapkan layanan kesehatan bagi delapan muallaf yang menderita sakit gangguan limpa. Rasulullah saw. memerintahkan agar mereka dirawat di sebuah tempat untuk merawat orang sakit, yaitu sebuah daerah dekat dengan penggembalaan ternak milik baitulmal. Para pasien ini dirawat dan diberi makan dan minum susu langsung dari peternakan secara gratis dan kualitas. Pelayanan ini dilakukan dengan baik sampai mereka sembuh.

Apa yang dilakukan Rasulullah saw. berbeda dengan pemerintahan demokrasi saat ini. Jangankan melayani kesehatan rakyat secara berkualitas dan gratis, malah negara menjual pelayanan kesehatan melalui asuransi kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dari salah satu program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memposisikan BPJS Kesehatan sebagai *badan hukum publik* (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011). Masyarakat yang ingin mendapat layanan kesehatan harus menjadi nasabah BPJS, dengan membayar premi sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan. Konon katanya per 1 Januari 2020 iuran BPJS akan naik. Untuk kelas III sebesar RP 42.000/orang/bulan. Untuk kelas II sebesar Rp 110.000/orang/bulan dan untuk kelas I sebesar RP 160.000/orang/bulan (*Tribunnews.com*). Jika benar biaya iuran BPJS naik, coba bayangkan kalau satu keluarga berjumlah 6 orang. Kalau kelas II saja, maka harus keluar biaya untuk BPJS Rp 660.000. Biaya sebesar ini sungguh berat ditanggung oleh sebuah keluarga pada umumnya di Indonesia. Padahal belum tentu anggota keluarga tersebut sakit.

Apa yang dilakukan Rasulullah saw. berbeda dengan pemerintahan demokrasi saat ini. Jangankan melayani kesehatan rakyat secara berkualitas dan gratis, malah negara menjual pelayanan kesehatan melalui asuransi kesehatan.

Keluarga akan rugi dunia akhirat kalau menjadi nasabah BPJS. Akad dengan BPJS—sebagai lembaga yang serupa asuransi—adalah haram dan merugikan. Akad asuransi haram karena merupakan perjanjian penggantian harta yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan, spekulatif dan riba. Dalam sebuah hadis dinyatakan: “*Rasulullah saw. melarang jual-beli dengan kerikil dan jual beli gharar (tidak jelas).*” (HR Muslim, Malik dan Ahmad).

Asuransi juga bersifat spekulatif. Bagi nasabah yang sering sakit akan diuntungkan dan bagi nasabah yang jarang sakit akan dirugikan. Hal ini termasuk perjudian yang diharamkan (QS al-Maidah [5]: 90). Keharaman asuransi juga karena termasuk riba karena keuntungan nasabah merupakan tambahan dari harta pokoknya. Keharaman riba sangat tegas dalam al-Quran (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 278). □

6 Fakta Tentang Perang Badar

Setiap peradaban akan memperingati pertempuran bersejarah tertentu yang telah memainkan peran penting. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar. Saat itu umat Islam mengalahkan pasukan Quraisy yang kuat setelah diusir dari rumah mereka di Makkah, setelah sanksi ekonomi dan penganiayaan.

Berikut 6 fakta tentang Perang Badar:

1. **Terjadi di bulan Ramadhan.** Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadhan, dua tahun setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah.
2. **Badar terletak 113 km dari Madinah.** Sekitar 70 mil dari Madinah dan sekitar 100 mil melalui jalan darat. Dibutuhkan lebih dari 1 jam dan 45 menit untuk mencapai Badar dengan mobil. Pada masa Nabi saw. akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai di sana.



3. **Disebutkan dalam al-Quran.** Perang Badar disinggung dalam beberapa ayat dalam al-Quran, Surah Ali-Imran ayat 123 – 126.

4. **Muslim kalah jumlah.** Pasukan Muslim kalah jumlah dengan rasio 1: 3. Tentara Muslim berjumlah sekitar 313 dengan persenjataan tidak lengkap dan kurang memadai. Pasukan Quraisy lebih dari 950 orang dengan dilengkapi persenjataan yang lebih baik. Para Sahabat Rasulullah terkemuka seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Hamzah, Mushab ibn 'Umair, Zubair bin al-'Awwam, Ammar bin Yasir, dan Abu Dharr al-Ghifari ikut serta.

Usman bin Affan tidak dapat mengambil bagian karena diperintahkan oleh Nabi saw. untuk merawat istrinya Ruqayyah yang sakit, yang juga merupakan putri Nabi saw. Ibnu Umar meriwayatkan: "*Usman tidak ikut dalam Perang Badar karena dia menikah dengan salah satu putri utusan Allah dan dia sakit. Nabi saw. berkata kepada dia. "Engkau akan mendapatkan hadiah dan bagian (dari rampasan perang) yang mirip dengan hadiah dan bagian dari orang yang telah mengambil bagian dalam Perang Badar."* (HR al-Bukhari).



terhormat. Sebuah riwayat menunjukkan hal tersebut. Jabir menceritakan: *Setelah Perang Badar, para tawanan perang dibawa. Di antara mereka adalah al-'Abbas. Dia tidak memakai baju. Lalu Nabi saw. mencari baju untuk dia. Ternyata baju 'Abdullah bin 'Ubayy adalah ukuran yang tepat. Nabi saw. kemudian memberikan baju itu kepada al-'Abbas untuk dipakai dan memberi pengganti Abdullah dengan bajunya sendiri.*"

5. Malaikat membantu umat Islam dalam pertempuran.

Sebanyak 5.000 malaikat membantu kaum Muslim meraih kemenangan atas kaum Quraish yang lebih siap dalam hal persenjataan, unta dan kuda perang (lihat: QS Ali 'Imran [3]: 125).

6. Korban. Sebanyak 14 sahabat menjadi syahid dalam pertempuran. Nama mereka tercantum di situs pertempuran:

- Umayr ibn Abi Waqas,
- Safwan ibn Wahb,
- Dhu-Shimalayn ibn 'Abdi,
- Mihja 'ibn Salih,
- 'Aqil bin al-Bukayr,
- 'Ubaydah ibn al-Harith,
- Sa'ad ibn Khaythama,
- Mubashir ibn 'Abd al-Mundhir,
- Harithah ibn Suraqah,
- Rafi 'ibn Mu'ala,
- 'Umayr ibn Humam,
- Yazid ibn al-Harith,
- Mu'awidh ibn al-Harith,
- 'Auf ibn al-Harith.

Sebanyak 70 orang dari pasukan Quraish terbunuh termasuk Abu Jahl, salah satu komandan mereka. Banyak orang lain ditawan sebagai tawanan perang oleh Muslim yang kemudian ditebus.

Para tawanan perang diperlakukan dengan bermartabat dan



Prasasti Perang Badar.



LINTAS DUNIA

Ini Lho yang Membuat Fobia Islam Semakin Menguat

Pemukulan terhadap Muslimah hamil di Australia dan pembakaran al-Quran di Norwegia merupakan salah satu bukti yang menunjukkan fobia Islam (*Islamophobia*) di Barat semakin menguat.

“Fobia Islam tidak bisa dilepaskan dari narasi-narasi terus-menerus oleh elit-elit politik terutama dari yang berlatang belakang sayap kanan atau ultra nasionalis yang sekarang ini mendapat tempat di Eropa. Demikian juga mendapat dukungan di Amerika,” ujar Farid Wadji, Pemimpin Redaksi Tabloid Media Umat, saat wawancara *live* dengan Radio Dakta 107.0 MHz FM Bekasi, Rabu (27/11/2019) pagi.

Menurut Farid, narasi-narasi dari elit-elit politik ini yang terus menyuarakan seolah-olah Islam itu menjadi musuh. Ini yang kemudian menciptakan kondisi tertentu hingga seseorang itu merasa punya legitimasi untuk melakukan persekusi terhadap umat Islam sampai pada level bawah.

“Kalau kita lihat, misalkan narasi radikalisme, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sekarang itu selalu menysasar Islam,” ungkapnya.

Farid menyebutkan di benak orang yang fobia Islam itu kalau mendengar kata “radikalisme” bisa dipastikan sama seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, sebagai *evil ideology* (ideologi setan).

Yang disebut penganut ideologi setan oleh Blair tiada lain adalah umat Islam. Terutama yang menginginkan penegakkan syariah Islam, yang ingin menyatukan umat Islam di bawah naungan Khilafah, yang menolak nilai-nilai Barat, dan yang menolak keberadaan penjajah Yahudi di Palestina.

“Jadi kalau kita lihat, narasi-narasi radikalisme ini yang terus-menerus dilakukan rezim atau elit politik di Barat inilah yang memperkuat fobia Islam. Ditambah lagi *framing* (pembingkaihan) dari media massa yang di belakangnya sebagian besarnya adalah pemilik modal kuat pendukung rezim-rezim politik,” tegasnya.

Menurut Farid, fobia Islam menguat di Barat tidak bisa dilepaskan dari kondisi kapitalisme dunia sekarang yang sedang mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa baik secara ekonomi atau pun politik. Ada kecenderungan masyarakat berpaling ke ajaran Islam sebagai satu alternatif.

“Jadi *Islamophobia* ini upaya untuk mencegah manusia untuk kembali ke ajaran Islam. Ajaran Islam itu harus dikriminalkan bahkan dimonsterisasi. Inilah yang bisa kita lihat paling mendasar mengapa fobia Islam sekarang ini kuat di Barat.

Langkah AS Memperkuat Kontrol Atas Minyak di Suriah

Meski Amerika Serikat memainkan permainan yang sangat kompleks di Suriah, termasuk menggunakan pasukan militer negara-negara lain untuk mengendalikan berbagai wilayahnya, pada satu wilayah tertentu AS memutuskan untuk tetap berpatroli di wilayah itu yakni Deir ez-Zor.

Wilayah dimaksud merupakan sebuah wilayah dengan penduduk yang sangat sedikit, tetapi lokasinya sangat strategis yang menyimpan banyak minyak. Akhirnya, pemerintahan Trump menjadi jelas sikapnya tentang minyak, meskipun belum mengakui nilai geopolitik Deir ez-Zor, yang dekat dengan Suriah, Irak dan Yordania.

Menurut *The Guardian*: Para pejabat AS berjuang untuk menjelaskan misi dari pasukan berkekuatan 1.000 tentara AS di Suriah, yang

sering mengambil posisi di dekat ladang minyak atas perintah Donald Trump.

Dua pekan setelah memerintahkan evakuasi penuh pasukan AS, sebelum serangan Turki ke wilayah di timur laut Suriah, dan meninggalkan mitranya, kekuatan Kurdi, dalam perang melawan ISIS, Trump berubah pikiran dan mengatakan beberapa pasukan harus tetap pada tugasnya yakni hanya mengamankan minyak.

Jadi, sementara ratusan pasukan khusus AS dipindahkan dari Suriah, ratusan tentara lainnya, yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja, bergerak ke wilayah yang tujuannya ladang minyak skala kecil di provinsi Deir ez-Zor dan Hasakah, tetapi tanpa gagasan yang jelas tentang apa yang seharusnya mereka lakukan di sana.

“Kami ingin membawa pasukan kami pulang,” kata Trump pada 1 November.

Trump menambahkan, “Kami meninggalkan sejumlah tentara untuk mengamankan minyak. Saya suka minyak, sehingga kami menyimpan minyak.”

Presiden menyarankan bahwa penguasaan terhadap sumber daya alam Suriah merupakan “kompensasi” yang adil atas biaya perang di sana.

Menurut Kantor Berita HT, Kamis (14/11/2019), kebijakan luar negeri Barat akan tetap berpusat di sekitar penjajahan, dan kebutuhan untuk mendominasi seluruh dunia dalam rangka mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya alamnya untuk kepentingan para elit Barat.

“Tapi, insya Allah, umat manusia akan segera melihat kembalinya negara yang hanya berusaha mengembalikan perdamaian, keadilan dan kemakmuran bagi dunia seperti sebelumnya, dalam negara Khilafah Nabi Muhammad SAW,” rilis Kantor Berita HT.

Seruan Macron Memicu Konflik Sesama Negara Barat

Menyusul sebuah wawancara Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyerukan memperkuat Eropa dengan Rusia guna melawan kemungkinan dunia bipolar baru yang didominasi



oleh Amerika dan Cina, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membela kepemimpinan NATO dari serangan Macron.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada Jumat (8/11/2019) bahwa NATO akan tumbuh, berubah atau berisiko hendaknya diabaikan. Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa NATO itu tengah sekarat.

Kanselir Jerman Angela Merkel menolak komentar Macron dalam sebuah wawancara dengan Majalah Mingguan Inggris, *The Economist*. Merkel menyebut itu sebagai “hal yang keras dan kejam”. Pompeo mengatakan NATO itu mungkin yang paling penting “sepanjang sejarah”.

Namun, dia mengakui perlunya NATO untuk berkembang, dalam sesi tanya jawab setelah memberikan pidato di Berlin pada hari Jumat, sehari sebelum peringatan 30 tahun jatuhnya Tembok Berlin.

“Setelah 70 tahun, NATO perlu berkembang dan berubah,” katanya. “NATO harus mampu menghadapi kenyataan dan tantangan zaman.”

“Jika negara-negara berpikir bahwa mereka dapat memperoleh manfaat keamanan tanpa membekali NATO dengan bahan-bahan yang dibutuhkannya, dan jika mereka tidak memenuhi kewajibannya, maka ada risiko, bahwa NATO akan menjadi tidak efektif atau bahkan ketinggalan zaman,” katanya.

Menurut Kantor Berita HT, Kamis (14/11), konflik antar pemerintah Barat adalah hasil dari pembagian Barat menjadi negara-negara bangsa



yang terpisah, yang bercokol di Westphalia pada abad ke-17, tetapi pada kenyataannya melekat dalam perlakuan agama Kristen untuk Gereja dan negara sebagai entitas yang terpisah.

“Ketika Paus Kristen kuat, Eropa mampu mempertahankan kebijakan luar negeri yang lebih bersatu, tetapi dengan melemahnya Gereja Katolik, raja-raja Eropa secara individualis memulai petualangan luar negerinya sendiri-sendiri, masing-masing membangun kepentingan nasional kolonialnya sendiri yang secara alami saling bertentangan, dan kolonialisme Barat berlanjut di bawah nama-nama yang berlainan. Sehingga konflik antara kekuatan Barat berlanjut hingga hari ini,” tulis Kantor Berita HT.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran al-Karim (yang artinya): *Di antara orang-orang yang mengatakan, “Sungguh kami ini orang-orang Nasrani”, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Lalu Kami menimbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.*” (TQS Al-Maidah [5]: 14).

Rezim Negeri Muslim Tetap Diam Meski Cina Hilangkan Identitas Muslim Uighur

Salah satu teknik keji rezim Cina untuk menghapus identitas Islam di tengah Muslim Uighur adalah dengan memaksa Muslimah Uighur tinggal bersama pria lain layaknya suami istri.

“Tidak ada batasan sampai batas yang memuakkan bahwa negara Cina yang tercela itu akan mempermalukan saudara-saudari kita di Turkestan Timur dalam upaya mereka untuk menghapus setiap jejak identitas Islam mereka,” tulis Direktur Bagian Muslimah Kantor Media Pusat (CMO) Hizbut Tahrir seperti diberitakan *Mediaumat.news*, (16/11/2019).

Direktur Muslimah CMO HT tersebut juga

menyatakan tidak ada batasan atas skala pengkhianatan yang memalukan dari para penguasa dan rezim di dunia Muslim yang terus menyesuaikan diri dengan negara anti-Islam, anti-Muslim yang brutal ini, dan yang menolak untuk bahkan mengutuk perlakuan kriminalnya terhadap Muslim Uighur, demi kepentingan ekonomi dan politik yang mementingkan diri sendiri.

“Bagi setiap Muslim yang tulus, darah kita mendidih dan hati kita berdebar karena mendengar pelanggaran keji atas kehormatan saudara-saudari kita, dan gangguan keji terhadap kehidupan pribadi mereka, serta penindasan tanpa henti yang mereka alami di bawah negara tirani komunis ini. Namun, bagi para pemimpin dan pemerintah tanah Muslim, itu adalah bisnis seperti biasa dengan Beijing,” ujarnya.

Menurut Direktur Muslimah tersebut, jelas bahwa tidak ada skala penganiayaan atau penderitaan yang mengerikan dari umat ini, atau serangan terhadap Agama Islam cukup untuk menggerakkan mereka bahkan satu langkah pun untuk melindungi setiap Muslim yang tertindas.

Imran Khan misalnya, Perdana Menteri Pakistan, yang menampilkan dirinya sebagai sang juara untuk membela hak-hak Muslim Kashmir yang tertindas (sementara pada kenyataannya tidak melakukan apa pun untuk mengakhiri penderitaan mereka), tak tampak pembelaannya terhadap Muslim Uighur.

Faktanya, sikapnya adalah memperkuat hubungannya dengan kediktatoran komunis yang membenci Islam ini, tidak memiliki rasa malu dengan menawarkan pelukan hangat kepada negara yang sedang berperang melawan Agama Allah SWT.

Pada awal bulan ini, pada pertemuan Komite Kerjasama Bersama kesembilan Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC), kedua belah pihak menandatangani perjanjian lebih lanjut untuk suatu kerja sama di bidang perdagangan dan kesehatan. Pakistan juga meminta pinjaman 9 miliar dolar dari Cina untuk membiayai proyek jalan dan infrastruktur. *[Joko Prasetyo dari berbagai sumber]*



KEMALISME

Pemerintah melalui Kemenag beberapa waktu lalu secara resmi telah memutuskan menarik atau mengganti seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad. Penghilangan materi khilafah dan jihad itu disebut agar materi di madrasah lebih mengedepankan kedamaian, keutuhan dan toleransi. Dari sana tersirat bahwa penghapusan materi jihad dan khilafah disebabkan materi itu dinilai bakal merusak atau setidaknya mengganggu kedamaian, keutuhan dan toleransi. Sebuah kesimpulan atau penilaian yang sangat aneh.

Bagaimana bisa seorang Muslim menilai buruk ajaran agamanya sendiri? Apalagi bila senyatanya ajaran itu telah berjasa besar dalam keislaman dan kemerdekaan negara ini. Bagaimana negeri ini bisa merdeka bila bukan karena usaha atau perjuangan (jihad) para pendahulu yang tak gentar melawan penjajah? Darimana juga negeri ini mendapatkan Islam bila bukan dari para ulama (Walisongo) yang di antaranya diutus langsung oleh khalifah? Menghilangkan materi khilafah dan jihad tak ubahnya menghilangkan asal-muasal bangsa ini.

Setelah mendapat protes dari berbagai pihak, rencana itu konon kemudian dianulir.

Bila pun benar rencana penghapusan materi jihad dan khilafah ini urung dilakukan, tetap akan dibahas, tetapi hanya dalam perspektif sejarah. Hal ini tidak bisa menutup bukti bahwa rezim ini memang benar-benar mengidap Islamophobia. Sebelumnya, cadar dan celana cingkrang dipersoalkan. Lalu keluar peraturan yang intinya akan ada pengawasan terhadap kegiatan majelis taklim, juga masjid. Bahkan PAUD pun tak luput dari sorotan.

Bagaimana kita menilai fenomena ini? Padahal mereka, para pejabat itu, semua adalah Muslim. Mengapa itu bisa terjadi? Benarkah saat ini mulai berkembang paham kemalisme? Apa itu kemalisme?

++++

Untuk memukul Kekhilafahan Utsmani yang ratusan tahun menjadi payung Dunia Islam, melalui Mustafa Kemal atas dukungan Inggris melancarkan revolusi di Turki di awal abad 20 lalu. Dalam buku *Islam dan Sekularisme di Turki* yang ditulis oleh Prof. Mukti Ali disebutkan bahwa agenda pertama dan utama dari revolusi yang dilancarkan oleh Kemal Pasha di Turki itu adalah penghapusan Kekhalifahan. Penghapusan sistem Khilafah merupakan puncak dari proses sekularisasi politik yang nyata. Tindakan tersebut

Catatan Dakwah

merupakan simbol bahwa Turki telah meninggalkan entitas Megara Islam. Melambangkan peralihan menuju Eropa dan menjauh dari Asia. Upaya revolusi Turki ini dianggap sebagai proses westernisasi.

Setelah itu, Kemal menghapus lembaga-lembaga syariah. Bagi Kemalis, syariah adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem Kekhilafahan. Melalui Komite Ahli Hukum, Kemalis mengambil undang-undang sipil Swiss untuk menggantikan UU Syariah yang ratusan tahun lamanya mengatur kehidupan masyarakat. Undang-undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 04 Oktober 1926 ini antara lain hanya membolehkan monogami, melarang poligami, dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Konsekuensinya, hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu, undang-undang sipil yang baru juga memberi kebebasan bagi

perkawinan antaragama. Selanjutnya, Kemalis menutup madrasah-madrasah yang selama ratusan tahun menjadi lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian lengkap sudah tiga pilar utama Kekhilafahan Utsmani—yakni sistem politik, hukum dan Pendidikan—runtuh.

Kemalis mengatakan, semua langkah itu adalah bagian dari program reformasi agama. Padahal sejatinya itu semua adalah bentuk campur tangan Pemerintah Kemalis dalam kehidupan beragama di masyarakat. Berupa pembatasan-pembatasan bahkan penghapusan-penghapusan. Ada larangan pengajaran al-Quran dan Bahasa Arab, pengubahan azan ke dalam bahasa Turki dan lainnya.

Pada 1935, Pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Utsmani. Pada tahun yang sama, sistem kalender Hijrah diganti dengan sistem kalender Masehi. Hari Minggu dijadikan hari libur menggantikan hari libur sebelumnya, yaitu Hari Jumat. Kemalis juga mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum dan menganjurkan masyarakat Turki menggunakan pakaian ala Barat.

++++

Apa yang terjadi di sini memang belum sampai seperti di Turki dulu. Namun, tanda-tanda ke arah sana tampak nyata. Lihatlah, rezim ini sangat getol memerangi semua yang berbau Khilafah, seolah Khilafah adalah barang haram yang benar-benar harus di jauhi. Lalu mereka melakukan kontrol terhadap materi pengajaran agama di sekolah, khususnya menyangkut materi khilafah dan jihad, menjadi sekadar cerita sejarah. Padahal keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari fikih

Apa yang terjadi di sini memang belum sampai seperti di Turki dulu. Namun, tanda-tanda ke arah sana tampak nyata. Lihatlah, rezim ini sangat getol memerangi semua yang berbau Khilafah, seolah Khilafah adalah barang haram yang benar-benar harus di jauhi. Lalu mereka melakukan kontrol terhadap materi pengajaran agama di sekolah, khususnya menyangkut materi khilafah dan jihad, menjadi sekadar cerita sejarah.

Islam yang tentu saja harus diamalkan. Bahkan juga mengawasi majelis taklim dan masjid. Sempat ada larangan pemakaian cadar di kantor-kantor Pemerintah. Kemudian ada *screening* terhadap pegawai Pemerintah untuk mencari mereka yang berpaham tidak seperti mereka.

Jika ditelaah lebih lanjut, apa yang tengah terjadi di negeri ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Dari dua dokumen penting Rand Corporation berjudul, “*Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies*” dan “*Building Moderate Muslim Networks*”, yang masing-masing terbit pada tahun 2003 dan 2007, kita menjadi tahu bahwa Barat memang memandang bahwa Islam bakal menjadi ancaman serius bagi hegemoni Barat pada masa mendatang. Karena itu Islam harus ditaklukkan. Caranya dengan melemahkan kelompok yang mereka sebut kaum fundamentalis, yakni yang menginginkan penerapan syariah secara *kâffah*. Tujuan dari semua strategi ini adalah menjauhkan Islam dari umatnya, dan membuat orang Islam tak berperilaku lazimnya seorang Muslim. Alat utama dari program ini adalah rezim yang tengah berkuasa. Lalu berjalanlah apa yang sekarang terjadi.


Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi langkah-langkah rezim yang tampak sangat kemalistik ini? *Pertama*: Tiap Muslim harus memperkuat *syakhshiyah* atau kepribadian Islamnya. Cara berpikir dan berperilaku setiap Muslim mesti berdasar ajaran Islam. Caranya, dengan sungguh-sungguh mengkaji Islam. Harus ditumbuhkan di tengah masyarakat kegairahan ‘*ngaji*’. Kemudian, hasil *ngaji* itu diamalkan. Dengan itu di tengah masyarakat akan makin marak pengamalan Islam baik dalam hal ibadah, pakaian, pergaulan, pendidikan, ekonomi, politik maupun hal yang lain. Dengan begitu

Barat memang memandang bahwa Islam bakal menjadi ancaman serius bagi hegemoni Barat pada masa mendatang. Karena itu Islam harus ditaklukkan. Caranya dengan melemahkan kelompok yang mereka sebut kaum fundamentalis, yakni yang menginginkan penerapan syariah secara *kâffah*. Tujuan dari semua strategi ini adalah menjauhkan Islam dari umatnya, dan membuat orang Islam tak berperilaku lazimnya seorang Muslim. Alat utama dari program ini adalah rezim yang tengah berkuasa. Lalu berjalanlah apa yang sekarang terjadi.

kebaikan atau kerahmatan Islam bisa dilihat dan dirasakan secara langsung sehingga mendorong pengamalan lebih lanjut.

Kedua: Harus dibangun jamaah dan jaringan di antara orang atau kelompok yang sudah tersadarkan itu. Ini akan menjadi benteng pencegah sekaligus pelindung dari jahatnya program-program yang kemalistik tadi. Harus dibangun *ta’âwun* atau saling mendukung dan menolong sehingga umat ini bagaikan bangunan kokoh yang tak mudah digusur oleh gerakan kemalis sekeras apapun.

Ketiga: Tak bisa tidak, harus digencarkan gerakan amar makruf nahi mungkar sehingga program kemalistik ini tidak berjalan mulus. Tidak boleh dibiarkan kemungkaran sekecil apapun terjadi begitu saja tanpa hambatan. Di sinilah pentingnya perjuangan hingga terwujud sistem yang islami dengan rezim yang tauhidi, sehingga kejahatan kemalis tak akan ada lagi. Insya Allah. □



dr. Fuad A. Rahman.

NEGARA LEPAS TANGGUNG JAWAB

Pengantar:

BPJS sedang dirundung masalah. Masalahnya akut. Antara lain mengalami defisit puluhan triliun dalam beberapa tahun terakhir ini. Belum lagi iuran (premi) yang harus dibayarkan masyarakat terus naik. Sebaliknya, pelayanan kesehatan oleh BPJS semakin dikurangi. Tentu masyarakat makin terbebani.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Betulkah karena BPJS salah kelola? Ataukah justru persoalan BPJS menyangkut persoalan mendasar, yakni paradigma Negara yang keliru dalam memandang pelayanan kesehatan kepada masyarakat?

Itulah di antara pertanyaan *Redaksi* kepada **dr. Fuad A. Rahman**, seorang dokter sekaligus pengamat kesehatan. Berikut hasil wawancara *Redaksi* dengan beliau dalam rubrik 'Hiwar' kali ini.

BPJS saat ini sedang carut marut. Bagaimana realitasnya ?

Betul. Saat ini BPJS Kesehatan menjadi isu yang dibahas hampir setiap hari dan dalam setiap perbincangan. Bahkan di setiap level

sosial.

Kesehatan itu mahal. Ia butuh sumberdaya dan pembiayaan yang besar. Dari data yang ada, tahun 2014 saja, total belanja kesehatan kita mencapai 3,4% dari PDB kita (USD 890,8

M). Sebagai perbandingan, negara kecil Vietnam porsi belanja kesehatannya 7,1% dari PDB. Bahkan Amerika mencapai 12% PDB (USD 17,43T).

Belanja kesehatan yang mahal inilah mengakibatkan banyak teori yang dimunculkan untuk menanggulangnya. Salah satunya adalah model pembiayaan melalui asuransi sosial, yang dikenal dengan model Bismarck.

Dalam model pembiayaan ini, tagihan kesehatan dibayarkan oleh rakyat (pekerja dan majikan berbagi porsi) melalui asuransi sosial. Seluruh rakyat dibebani iuran yang dibayar kepada Pemerintah (tanpa motif mencari keuntungan bisnis) sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Jerman, Jepang, Belanda, Vietnam lebih dulu menggunakan model ini.

BPJS Kesehatan yang diberlakukan di negri kita ini mencontoh model asuransi sosial model Bismarck ini. Tentu dengan penyesuaian pada beberapa hal, seperti iuran (premi) untuk orang miskin dibayarkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pemerintah (bukan sesuai dengan kebutuhan riil belanja kesehatan)

Masalahnya kemudian, anggaran yang dibayarkan Pemerintah untuk rakyat miskin (Penerima Bantuan Iuran, PBI) sangat rendah, sementara jumlahnya cukup besar. Inilah penyebab anggaran BPJS ini defisit.

Defisit anggaran ini menyebabkan BPJS Kesehatan gagal membayar tagihan ke Rumah Sakit yang menurut Wamen Keuangan, Mardiasmo, diprediksi mencapai 32 Trilyun Rupiah

Defisit ini diikuti dengan banyak masalah turunan sebagai akibatnya. Salah satunya adalah Kualitas Pelayanan yang menurun dan kebijakan mempersulit akses rujukan ke fasilitas rujukan tingkat lanjut.

Apa yang menjadi masalah mendasar BPJS?

Umumnya masyarakat dan *stake holder*

saat ini melihat, bahwa masalah BPJS ini adalah kekurangan dana untuk membayar klaim terhadap pihak ketiga (Rumah Sakit).

Solusinya adalah bagaimana mendapatkan dana untuk menutupi hutang (bayar klaim Rumah Sakit), juga bagaimana cara agar tagihan terhadap pihak ketiga ini diminimalisir.

Pilihan kebijakan yang diambil Pemerintah adalah menaikkan besaran iuran premi (peserta BPJS) agar tersedia dana yang cukup. Di sisi lain, juga menghembuskan isu untuk mengurangi manfaat terhadap BPJS, yakni hanya diarahkan untuk menanggulangi/membiayai kesehatan dasar saja.

Yang paling menyedihkan bagi para dokter dan tenaga kesehatan lain adalah munculnya opini yang menuduh bahwa dokterlah yang menjadi biang keladi penyebab defisit BPJS Kesehatan ini. Akibatnya, memunculkan opini buruk yang bisa membuat konflik di tengah masyarakat.

Padahal faktanya *kan* tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya, RS dan profesi kesehatan banyak dirugikan dengan program ini.

Bagaimana mau korupsi uang BPJS, sementara BPJS membayar RS dengan sistem paket yang sudah ditetapkan sendiri oleh BPJS, bukan berdasarkan tagihan Rumah Sakit.

Contoh sederhananya, pasien-A, misalnya, sakit usus buntu, dirawat dan dilakukan operasi di RS B, misalnya. Dalam merawat pasien A ini, tentu RS mengeluarkan biaya tertentu. Mulai biaya makan-minum, obat-obatan, penggunaan air, cairan infus, pembiusan dan lain sebagainya. Berapapun biaya yang dikeluarkan oleh RS untuk merawat pasien A ini, pihak BPJS kesehatan hanya akan membayar sesuai paket. Dari sini, mana RS mau korupsi, apalagi para dokter. Yang ada, pihak RS menekan para dokter untuk menggunakan obat-obatan dan alat kesehatan semurah mungkin.

Benarkah masyarakat merasakan manfaatnya?

Kebijakan atau program apapun tentu tidak bisa dinilai hanya dengan ada atau tidaknya manfaat yang didapatkan oleh rakyat. Apalagi manfaat yang terbatas. Mengapa? Karena kebijakan apapun pasti ada sisi manfaatnya sekecil apapun itu. Bahkan pada zaman Pemerintahan Kolonial sekalipun. Apalagi menyangkut kebijakan publik.

Karena itu bila ada yg menanyakan manfaat, tentu ada manfaat, terutama bagi pasien. Hanya saja, apakah kebijakan ini bermanfaat atau menyenangkan semua orang? Apakah mesti membayar iuran, baru boleh mendapatkan hak untuk berobat? Apakah kebijakan ini menyenangkan pemberi pelayanan (RS, Tenaga Kesehatan dll). Berapa banyak RS harus tutup di era BPJS ini? Ini yang mesti dipikirkan dan disadari oleh masyarakat, terutama pengambil kebijakan.

menurut saya, lebih tepat dikatakan bahwa sistem ini dibentuk sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawab Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini tentu bertentangan dengan UUD Negara. Pasalnya, salah satu tujuan negara ini dibentuk adalah memajukan kesejahteraan umum.

Benarkah dengan realitas yang ada BPJS itu layanan Pemerintah menjamin kesehatan masyarakat?

Tidak. Karena BPJS Kesehatan (JKN) ini dikelola dengan prinsip asuransi, maka yang dijamin adalah peserta yang terdaftar dan aktif keanggotaan asuransinya, bukan seluruh rakyat secara universal. Jadi, yang dijamin oleh Pemerintah hanyalah kelompok masyarakat tertentu saja yakni penerima bantuan iuran (premi).

Jika bukan jaminan kesehatan, lalu apa? Apakah asuransi?

Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, program jaminan kesehatan ini adalah asuransi sosial (*social insurance*) yang diadopsi dari negara lain. Hanya saja masyarakat sedikit bias dalam memahaminya karena asuransi ini diterjemahkan secara tekstual dengan kata “jaminan”. Harusnya digunakan sesuai makna aslinya, yakni asuransi sosial, agar sejak awal masyarakat paham akan faktanya.

Jika demikian, sejatinya Pemerintah sedang berbisnis dengan rakyatnya kah?

Kurang tepat jika dikatakan demikian. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di situ disebutkan bahwa JKN ini, adalah lembaga nir-laba. Seharusnya tidak menjadi lembaga bisnis. Tentu ini berbeda dengan asuransi komersial (*private*) yang didirikan untuk mencari keuntungan.

Karena itu, menurut saya, lebih tepat dikatakan bahwa sistem ini dibentuk sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawab Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini tentu bertentangan dengan UUD Negara. Pasalnya, salah satu tujuan negara ini dibentuk adalah memajukan kesejahteraan umum.

Bolehkah asuransi dalam Islam?

Secara fikih, kita mesti membedakan antara asuransi komersial (privat) dan asuransi sosial, karena fakta antara keduanya berbeda.

Kalau asuransi privat, sudah jelas batil, karena dibangun berdasarkan akad yang bertentangan dengan syariah Islam. Bahkan pengelola asuransi-pun sadar akan keharamannya. Karena itu mereka mencoba menawarkan asuransi dengan embel-embel syariah. Jadi, seharusnya mayoritas umat Islam sudah paham keharamannya.

Kalau asuransi sosial (seperti BPJS Kesehatan) yang digagas oleh Negara seperti ini tidak memenuhi syarat untuk diterapkan hukum sebagaimana batilnya asuransi komersial. Namun, MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa BPJS ini tidak sesuai syariah.

Kalau melihat faktanya, memang BPJS ini melanggar syariah Islam. Pasalnya, pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma oleh Negara, menjadi berbayar. Artinya, Negara melepaskan kewajiban mengurus rakyat.

Jika demikian, problem utama BPJS itu apa? Apakah liberalisasi atau lepas tanggungjawab Pemerintah terhadap jaminan kesehatan masyarakatnya?

Dua-duanya. Negara abai dan melepaskan tanggung jawabnya melayani rakyat. Ini terjadi karena logika yang dibangun adalah logika liberalisme. Negara bertindak hanya sebagai pengawas dalam interaksi sosial dalam masyarakat.

Namun, Pemerintah mengatakan bahwa iuran BPJS masih lebih murah dibanding beli rokok atau pulsa. Tepatkah logika tersebut?

Logika ini tidak tepat. Malah bisa dibilang

ngawur. Ini hanya tepat bila logikanya memang liberal. Merasa tidak mempunyai tanggung jawab dalam melayani rakyat.

Tepatkah adanya sanksi terhadap BPJS yang tidak bayar/nunggu membayar iuran dengan tidak dilayani dalam layanan publik lainnya? Ini bentuk layanan atau justru pemalakan?

Di dalam Konstitusi Negara disebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu komponen kesejahteraan umum itu adalah kesehatan, juga pendidikan. Jadi mestinya *kan* kesehatan ini jadi tanggung jawab negara *dong*.

Masa sesuatu yang menjadi kewajiban negara dibebankan ke rakyat. Malah diberikan sanksi lagi. Ini *kan* logika yang aneh.

Bagaimana Islam mengatur jaminan kesehatan masyarakatnya?

Dalam Islam, pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan sosial dasar masyarakat. Karena itu Negara menyediakan pemenuhan ketiga hal ini pada batas yang optimal tanpa membedakan ras dan agama warga negaranya. Semua konsekuensi anggaran ditanggung sepenuhnya oleh Negara dan diberikan kepada rakyat secara cuma-cuma.

Bagaimana Islam mencukupi sumberdana yang dipakai untuk menjamin kesehatan masyarakat sehingga semua terbayar dengan baik?

Islam ini *kan ad-din*, pandangan hidup yang mengatur urusan ritual sebagaimana lazimnya agama. Juga mengatur interaksi sosial, seperti laiknya ideologi mengatur negara.

Karena itu berbicara masalah bagaimana Islam menutaskan problem kesehatan harus dilihat dalam konteks Islam sebagai ideologi

dengan sejumlah perangkat sistem tertentu. Ketika membahas pembiayaan kesehatan, tentunya ini terkait erat dengan sistem ekonomi.

Coba kita mengambil salah satu contoh aturan Islam tentang kepemilikan. Dalam Sistem Ekonomi Islam, kepemilikan atas kekayaan dibagi atas tiga bagian: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Simpelnya, kepemilikan umum adalah kepemilikan atas kekayaan yang menjadi hajat/kebutuhan bersama masyarakat seperti: lautan, sumber air, udara, sumber energi, hutan, barang tambang dan mineral, gelombang udara dan cahaya, gelombang elektromagnetik, panas bumi, jalan umum, fasilitas publik, dan lain sebagainya.

Harta kekayaan ini dalam Sistem Islam tidak boleh diberikan kepada individu (swasta) baik lokal, apalagi asing. Semuanya wajib dikelola oleh negara. Bila menguntungkan, hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemenuhan pelayanan publik.

Ini adalah salah satu sumber utama pembiayaan sektor pelayanan publik dalam Islam (termasuk kesehatan).

Jadi dalam Islam anggaran untuk pelayanan kesehatan akan sangat memadai. Berbeda dengan kondisi kita saat ini. Negara tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini terjadi karena mayoritas kekayaan publik diserahkan pada swasta, baik lokal maupun asing.

Hal lain yang terjadi ketika Islam dijadikan sebagai landasan interaksi sosial adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga wakaf dalam masyarakat. Islam berhasil menumbuhkan kesadaran sosial dalam masyarakat untuk berlomba dalam kebaikan dan amal shalih.

Pada masa lalu Negara dan masyarakat berlomba membangun dan mengelola lembaga

Jadi dalam Islam anggaran untuk pelayanan kesehatan akan sangat memadai. Berbeda dengan kondisi kita saat ini. Negara tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini terjadi karena mayoritas kekayaan publik diserahkan pada swasta, baik lokal maupun asing.

pendidikan dan RS pada taraf yang nyaris belum bisa disaingi oleh peradaban saat ini.

Kita ambil satu contoh, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *'Min Rawa'i Hadharatina*, halaman 110, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Raghīb As-Sirjani dalam bukunya, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Di sana disebutkan:

"Orang sakit adalah manusia yang sedang mengalami krisis. Mereka butuh pendamping. Tidak hanya medis, tetapi juga psikologis, sosial, ekonomi dan lain sebagainya."

"Semua pasien dilayani gratis, bahkan ketika sembuh diberi sejumlah harta yang mencukupi hingga dia sanggup bekerja. Agar tidak memaksakan diri untuk bekerja sebelum sembuh."

Rumah sakit-rumah sakit ini dibangun dan dikelola dari dana wakaf umat Islam. *Wallahu a'lam.* □

MENJAGA UMAT DARI LISAN YANG SESAT-MENYESATKAN

Irfan Abu Naveed

Di antara tantangan terbesar pada zaman ini adalah apa yang digambarkan Syaikh Abdullah Ba Alwi al-Hadhrami (w. 1272 H) dalam *Sullam at-Tawfiq*. Ia menyoal orang-orang yang menggampangkan diri mengucapkan kalimat yang disadari atau tidak bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, benar-benar sesat-menyesatkan hingga idiom *lisan tak bertulang* menjadi tantangan yang wajib diwaspadai.

Di antara buktinya, beragam fenomena menyesatkan dan menyesakkan dada yang kembali pada hal-hal kentara: (1) Monsterisasi (stigmatisasi negatif) dan desakralisasi ajaran Islam, semisal Khilafah dan kelompok dakwahnya; (2) Liberalisasi keyakinan dan pemahaman (kasus salam lintas agama); (3) Kriminalisasi da'i yang kritis; (4) Justifikasi atas penistaan terhadap simbol-simbol Islam (kasus penistaan masjid, bendera tauhid) hingga penistaan terhadap Rasulullah saw. Itu semua berbahaya dan wajib ditolak. Allah SWT memperingatkan:

﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

Di antara manusia (ada) orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan (QS Luqman [31]: 6).

Frasa *lahw al-hadîts* mencakup perkara-perkara kebatilan yang terucap (bahkan tersurat atau tersirat), untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah (Islam). Al-Hafizh Ibn Jarir ath-Thabari (w. 310 H) dalam *Jâmi' al-Bayân* (XX/130) menuturkan bahwa frasa (*lahw al-hadîts*) mencakup segala hal berupa ucapan yang menyimpangkan (manusia) dari jalan Allah, hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya larang untuk didengarkan. Ini karena Allah SWT mengungkapkan keumuman dalam firman-Nya: (*lahw al-hadîts*), dan Dia tidak mengkhususkannya. Oleh karena itu, ia tetap dalam keumumannya. Perbuatan ini, jika tak ditobati, kelak disesali tatkala mendapati apa yang Allah janjikan dan peringatkan:

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

Siapa saja yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi balasan akibat kejahatannya itu. Dia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong bagi diri selain dari Allah (QS an-Nisa' [4]: 123).

Sepak-terjang oknum yang memanipulasi dan memutarbalikkan fakta Khilafah dengan stigma “ajaran berbahaya”, misalnya, padahal Ijmak Sahabat menegaskan kefarduannya dalam Islam, diikuti kesepakatan para ulama—pada saat yang sama menghargamatkan konsepsi-konsepsi yang bertentangan dengan Islam, dipoles dengan retorika “solusi bagi kehidupan manusia”—jelas termasuk penyesatan. Ini sejalan dengan klaim kaum

munafik di masa Rasulullah saw.:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾﴾

Jika dikatakan kepada mereka, “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” (QS al-Baqarah [2]: 11-12).

Mereka mengaku melakukan perbaikan, kenyataannya justru kerusakan demi kerusakan. Rusaknya kehidupan tatkala dijauhkan dari syariah Allah dan Rasul-Nya, mengabaikan syariah Islam (QS Thaha [20]: 124, QS ar-Rum [30]: 41), *lisân al-hâl afshah min lisân al-maqâl*. Potensi bahaya di balik retorika mereka pun diisyaratkan oleh Rasulullah saw. yang bersabda:

﴿إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ
اللِّسَانِ﴾

Sesungguhnya yang paling dikhawatirkan dari perkara yang aku khawatirkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah (HR Ahmad dan al-Bazzar).

Hadis yang diawali huruf *inna* (*tawkid*) ini, menegaskan *khbar* adanya hal yang mengancam umat ini, hingga termasuk hal yang paling dikhawatirkan Nabi Muhammad saw. Ini menunjukkan besarnya potensi bahaya di dalamnya hingga diungkapkan dalam bentuk *tafdhîl* (superlatif): *akhwaf* (yang paling dikhawatirkan).

Persoalannya semakin berat tatkala

penyesatan tersebut dipoles dalam wujud rupa yang baik, sehingga menjadi tipudaya. Itu semua, bagian dari visi misi Iblis, didukung bala tentaranya, setan golongan jin dan manusia, yang berjanji menghiasi keburukan dengan wajah kebaikan dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٧﴾﴾

Iblis berkata, “Tuhanku, sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan buruk) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.” (QS al-Hijr [15]: 39).

Kaum imperialis dan pengekornya secara ideologis dan politis berupaya menghancurkan Islam, memporakporandakan barisan kaum Muslim, mengadu-domba mereka. Kaum Muslim yang cinta Allah dan Rasul-Nya tak boleh diam. Mereka wajib bicara, Al-Hafizh Abdurrahman al-Awza'i (w. 157 H) mengingatkan:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى تَعْرِتِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ،
فَمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَّا يُؤْتَى الْإِسْلَامَ مِنْ تَعْرِتِهِ فَلْيَفْعَلْ

Tidaklah setiap Muslim itu, kecuali ia harus berdiri di depan celah dari celah-celah pertahanan Islam. Siapa saja yang mampu agar Islam tidak (dihancurkan) datang dari celah di depannya, maka lakukanlah!

Penyesatan mereka wajib dihadapi dengan lisan mulia yang digambarkan Allah SWT:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah,

mengerjakan amal shalih dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (QS Fushshilat [41]: 33).

Kalimat *ahsan* merupakan pengutamaan (*tafdhîl*). *Ahsanu qawl[an]* menunjukkan predikat dari Allah SWT atas keutamaan lisan dakwah. Dalam ayat ini kalimat *ahsanu qaul[an]* diawali dengan kalimat tanya, namun maksudnya penafian (*istifhâm nafî*). Dengan demikian bisa disimpulkan: tidak ada perkataan lisan yang lebih baik daripada perkataan orang yang berdakwah. Lisan ini pun termasuk lisan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dalam firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (QS al-Ahzab [33]: 70).

Frasa *qawl[an]* (perkataan) diungkapkan dalam bentuk *nakirah* (umum) diikuti dengan sifat *sadîd[an]*. Ini menunjukkan keluasan cakupannya, namun dibatasi oleh tuntutan: sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Salah satu ucapan baik, bahkan terbaik adalah dakwah, menyeru manusia kepada Allah. Durrah binti Abi Lahab berkata: Seseorang berdiri ketika Rasulullah Saw di atas mimbar, lalu bertanya, "Siapakah sebaik-baiknya manusia?" Beliau menjawab:

«خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَبُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ»

Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling taat, yang paling bertakwa di antara mereka, yang paling banyak melakukan amar makruf nahi mungkar serta yang paling sering bersilaturahmi (HR Ahmad dan ath-

Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling taat, yang paling bertakwa di antara mereka, yang paling banyak melakukan amar makruf nahi mungkar serta yang paling sering bersilaturahmi (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

Thabrani).

Islam wajib dibela. Umat wajib dijaga dari beragam lisan yang tercela, sesat-menyesatkan. Tak boleh ada yang menghentikan amal mulia ini kecuali kematian yang mulia dan dimuliakan Allah dan Rasul-Nya:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ

قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَهَمَّاهُ فَقَتَلَهُ»

Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintah dia (kebaikan) dan mencegah dia (dari keburukan), kemudian penguasa zalim itu membunuh dirinya (HR Al-Hakim dan ath-Thabarani).

Wallâhu a'lam. []



HARI KIAMAT

Perjalanan terakhir yang ditempuh oleh manusia adalah kehidupan di alam akhirat. Alam akhirat merupakan negeri terakhir yang kekal untuk selama-lamanya. Ujungnya adalah surga atau neraka. Setelah itu tidak ada lagi alam yang lain. Sesuai namanya, “alam akhirat” adalah alam yang paling akhir. Akhirat adalah istilah untuk kehidupan alam baka (kekal) pasca kematian dan pasca kehancuran dunia ini.

Kehidupan di alam akhirat didahului dengan peristiwa kiamat. Kiamat terjadi saat malaikat meniup sangkakala yang pertama. Tiupan pertama ini menghancurkan seluruh kehidupan di jagat raya. Tiupan sangkakala pertama akan disusul dengan tiupan sangkakala kedua yang membangunkan kembali semua makhluk. Inilah yang Allah SWT gambarkan dalam al-Quran: *Ditiuplah sangkakala. Lalu matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)* (TQS az-Zumar [39]: 68).

Semua manusia terbangun dan bergegas menuju ke Padang Masyhar. Semua manusia yang dibangkitkan kembali dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk dihisab perbuatan baik dan buruknya yang dilakukan selama berada di alam dunia. Pada saat itu sudah ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Begitulah sebagaimana firman-Nya: *Ditiuplah sangkakala. Lalu tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah para rasul-(Nya). Tidaklah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Lalu tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. Pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kalian tidak dibalas, kecuali dengan apa yang telah kalian kerjakan* (TQS Yasin [36]: 51-54).

Allah SWT pun berfirman: *Hari Kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)-nya. Hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk). Kami tidak mengundurkan hari itu melainkan sampai waktu tertentu. Saat datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya. Lalu di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia* (TQS Hud [11]: 103-105).

Orang-orang yang mulia telah diberi ketetapan yang baik dari Allah SWT. Mereka itu dijauhkan dari neraka dan tidak mendengar sedikitpun suara api neraka. Mereka juga tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar yang terjadi pada Hari Kiamat. Begitu yang Allah SWT gambarkan melalui firman-Nya: *Sungguh orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami. Mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka inginkan. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada Hari Kiamat). Mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat*

berkata), "Inilah hari kalian yang telah dijanjikan kepada kalian." Itulah hari saat Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kami lah Yang akan melaksanakannya (TQS al-Anbiya' [21]: 101-104).

Keadaan manusia pada Hari Kiamat pada umumnya berada dalam kepanikan yang amat dahsyat. Tidak ada yang bisa saling tolong-menolong. Ada yang bergembira dan ada yang bermuka masam. Bergantung pada amalan masing-masing saat di dunia, sebagaimana firman-Nya: *Jika datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua), pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan mereka. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka* (TQS 'Abasa [80]: 33-42).

Orang-orang yang selama di alam dunia mengingkari adanya Hari Kebangkitan dan perjumpaan mereka dengan Allah SWT pada Hari Kiamat akan menyesal serta akan menerima azab dengan memikul dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itulah yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam ayat berikut: *Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah hingga jika Kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami karena kelalaian kami tentang Kiamat itu!" Seraya mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu* (TQS al-An'am [6]: 30-31).

Setiap manusia akan diadili di Pengadilan Akhirat dengan membela diri sendiri saat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Begitulah yang Allah SWT gambarkan: *(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dia kerjakan, sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugikan)* (TQS an-Nahl [16]: 111).

Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kita atau membela kita di Pengadilan Akhirat di hadapan Hakim Yang Mahaadil, Allah SWT: *Takutlah kalian pada suatu hari saat seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Tidak akan diterima suatu tebusan dari dirinya. Tidak akan memberi manfaat syafaat apapun bagi dia dan tidak pula mereka akan ditolong* (TQS al-Baqarah [2]: 123).

Dipastikan manusia diminta pertanggungjawabannya atas apa pun yang dia pernah kerjakan di dunia, dengan segala argumentasi dan alasan-alasan pembenaran perbuatannya (QS al-Qiyamah [75]: 13-15).

Tangan dan kaki ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia di dunia: *Pada hari saat lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka tentang apa saja yang dulu mereka lakukan* (TQS an-Nur [24]: 24. Lihat pula: QS Yasin [36]: 65).

Bahkan semua anggota tubuh manusia, termasuk kulitnya, ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia di dunia (QS Fushshilat [41]: 19-22).

Nasib manusia setelah dijatuhkan vonis bermacam-macam. Orang kafir dibawa ke Neraka Jahanam berombong-rombongan. Saat mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Tentu, Neraka Jahanam inilah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri (QS az-Zumar [39]: 71-72).

Sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Saat mereka sampai ke surga itu, terbukalah pintu-pintunya. Tentu, surga itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang beramal (QS az-Zumar [39]: 73-74).

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

ULAMA: PENUNJUK DAN PENENTU KEBAIKAN UMAT (1)

Ilmu didefinisikan dengan informasi (*al-ma'lûmât*) dan pengetahuan (*al-ma'ârif*) yang diterima manusia, baik dari makhluk atau dari Allah. Jika dari makhluk, ia menyesatkan dan menipu, sebab makhluk lemah dan membutuhkan yang lain. Jika dari Allah, ia pasti akan membawa manusia ke jalan yang benar dan lurus, serta memberi manusia petunjuk.

Islam sangat mendorong orang untuk mencari dan memiliki ilmu. Dengan ilmu, semua urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan benar. Sebaliknya, tanpa ilmu, rusaklah tanam-tanaman dan ternak.

Allah SWT telah mengajarkan ilmu kepada Adam. Allah SWT telah menjadikan ilmu sebagai ukuran ketakwaan, kemuliaan dan keutamaan. Allah SWT mengutamakan anak-cucu Adam dengan ilmu atas seluruh isi alam semesta, memuliakan mereka atas semua makhluk-Nya yang lain, seperti jin, malaikat dan setan, meskipun kadang kekuatan jin atau setan lebih kuat daripada manusia.

Ilmu ini adalah untuk semua manusia, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Namun, ada berbagai perbedaan kemampuan individu. Ada manusia yang cerdas, cepat paham, kuat

hapalannya, serta mampu menghubungkan hukum Islam dengan realita, dan kelebihan lainnya yang membedakan seorang individu dari lainnya. Ilmu ini telah memberikan banyak kebaikan dan andil dari kelompok ulama. Mereka tidak memonopolinya. Ilmu ini untuk semua. Karena itu, para ulama bagaikan kumpulan bintang yang memiliki berbagai sifat yang menghiasinya:

1. *Wara'*, takwa dan takut kepada Allah SWT.
2. Berani untuk mengatakan kebenaran. Bahkan di hadapan penguasa zalim sekalipun.
3. Cinta dan kasih sayang kepada kaum Muslim serta sangat pemaaf.
4. Bukan penjilat, oportunist dan pencari muka.
5. Banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan, sedekah, shalat, puasa dan membaca al-Quran.
6. Bersungguh-sungguh dalam menuntun ilmu dan mengajarkannya, membahas masalah dan dalil-dalilnya. Semua itu dilakukan demi menggali hukum syariah dari dalil-dalilnya yang rinci.

Ilmu menjadikan dunia makmur dan bangkit. Ilmu adalah amanah (kepercayaan)

dan tanggung jawab besar. Gunung-gunung enggan memikunya, namun manusia yang zalim dan bodoh menerimanya.

Ulama dengan ilmunya adalah pewaris para nabi. Mereka memiliki peran khusus menghidupkan alam semesta. Mereka memiliki tugas mulia dan tanggung jawab besar, yaitu meluruskan berbagai penyimpangan di tengah umat, baik yang dilakukan para penguasa atau yang lainnya, serta meluruskan setiap pemikiran yang salah dan keliru.

Berkat ulama, umat benar-benar bangkit pemikirannya secara menyeluruh tentang alam semesta dan kehidupan, yang membuahkan revolusi mengakar dan radikal, besar dan terus meningkat bagaikan bola salju. Semua itu kerena umat mengambil akidah Islam dan hukum-hukumnya sebagai sebuah ideologi yang diterapkan dalam kehidupan nyata, dan mengarah pada rekonstruksi terbaik bagi alam semesta.

Ulama memiliki tugas berat dan tanggung jawab besar dalam menolak dan menyangkal setiap ideologi batil dan setiap pemikiran yang lahir darinya. Hal itu dilakukan dengan menjelaskan kerusakan dan kepalsuannya. Kemudian menghancurkannya dan mencabut dari akarnya. Lalu menggantinya dengan ideologi Islam, yang melahirkan hukum-hukum Islam untuk semua aspek kehidupan.

Banyak teladan dari sikap ulama dalam meluruskan berbagai penyimpangan para penguasa dan dalam menasihati mereka. Beberapa di antara mereka adalah sebagai berikut

1. *Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah: Memobilisasi Tentara Pada Pertempuran Shaqhab.*

Pada bulan Rajab, tahun 702 H, beredar berita tentang niat Tatar untuk memasuki negeri Syam. Masyarakat gelisah dan tampak sangat ketakutan. Tatar tiba di Homs dan Baalbek. Mereka mendaratkan malapetaka di

negeri ini. Mereka mulai melakukan perang psikologis (urat saraf) dengan menyebar berbagai berita yang menambah ketakutan, melemahkan tekad para pejuang, dan membuat umat putus asa. Mereka berkata: “*Tidak ada kekuatan bagi kaum Muslim untuk melawan Tatar, sebab jumlah kaum Muslim sedikit, sementara jumlah Tatar banyak.*”

Namun, karena kuatnya pengaruh dan keyakinan para ulama, mereka mampu melawan perang psikologis yang keji ini, yang bertujuan membunuh umat sebelum berperang.

Para ulama bersikap seperti singa buas yang meraung hingga dunia melihat mereka sebagai kekuatan yang tidak tertandingi. Di antaranya, Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah *rahimahullah* dalam melawan perang psikologis yang membuat kecil nyali kaum Muslim. Para ulama dapat menyakinkan sejumlah pemimpin untuk melawan Tatar, apa pun keadaannya. Para ulama mampu memberi semangat dirinya dan rakyatnya, serta meminta warga negeri Damaskus untuk tidak seorang pun yang meninggalkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah *rahimahullah* memiliki pengaruh terbesar dalam membangun sikap tersebut.

Beliau berusaha mengobarkan emosi dan semangat umat serta mempersiapkan mereka untuk berperang demi keselamatan. Beliau pergi menuju militer yang tiba dari Hama. Setelah bertemu mereka, beliau memberi tahu mereka tentang aliansi para pemimpin untuk melawan musuh. Mereka merespon itu. Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah bersumpah kepada para pemimpin dan masyarakat, “*Sungguh, kalian kali ini adalah orang-orang yang dimenangkan.*”

Para pemimpin berkata kepada beliau, “*Katakanlah, insya Allah.*” Beliau berkata, “*Insya Allah, kemenangan itu nyata bukan janji.*” Dalam hal ini, beliau menafsirkan sesuatu dari Kitabullah. Di antaranya firman

Allah SWT (yang artinya): “*Demikianlah, siapa saja yang membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolong dirinya* (TQS al-Hajj [22]: 61).

Namun, di tengah mereka muncul *syubhat* (keraguan) yang dapat memperlemah kekuatan mereka dalam menghadapi tentara Tatar, yaitu pernyataan: “*Bagaimana kita memerangi Tatar ini, sedangkan mereka menampakkan Islam, dan mereka bukan pemberontak kepada Imam (Khalifah). Mungkin mereka tidak taat pada waktu itu dan kemudian mereka melanggarnya?!*”

Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah *rahimahullah* menjawab *syubhat* tersebut dengan mengatakan: “Mereka itu tidak ubahnya kaum Khawarij yang pemberontak terhadap Ali dan Muawiyah *radhiyallahu ‘anhuma*. Mereka yakin bahwa mereka lebih berhak memimpin daripada keduanya. Mereka mengklaim bahwa mereka lebih layak daripada kaum Muslim. Mereka adalah pelaku kemaksiatan dan kezaliman.”

Sikap itu begitu jelas hingga *syubhat* pun hilang. Syaikhul Islam menegaskan sikapnya dengan mengatakan, “Jika kalian melihat saya di sisi itu—yakni di sisi musuh—sementara di atas kepala saya ada al-Quran, maka kalian harus membunuh saya.”

Sikap tegas ini telah mendorong masyarakat untuk melawan Tatar dan meneguhkan hati mereka. Benteng Damaskus dipenuhi massa yang berdatangan hingga jalanan begitu ramai. Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah *rahimahullah* keluar dari Damaskus pagi hari Kamis, dari Bab al-Nasr dengan susah-payah, dan diikuti massa dalam jumlah besar untuk terlibat pertempuran melawan Tatar.

Di sinilah letak pentingnya peran para ulama ketika Khilafah Rasyidah kedua tegak. Dengan izin Allah, berbagai konspirasi akan terus berlanjut, sikap permusuhan dan konspirasi seperti ini akan terus ada. Bahkan

akan lebih banyak lagi dimunculkan berbagai *syubhat*. Kondisi seperti ini tidak jauh beda dengan realitas kita. Jadi begitulah yang seharusnya kita lakukan!

Oleh karena itu, para ulama memiliki tanggung jawab besar sebelum dan sesudah tegaknya Khilafah, yaitu terus mendorong umat, mengobarkan semangat berperang, menyebarkan Islam, mengungkap intrik dan menguatkan akidahnya.

Wahai Ibnu Taymiyyah, Anda telah melakukan kebaikan untuk umat. Semoga Allah merahmati Anda dengan balasan yang lebih baik di akhirat. Anda telah menolak *syubhat* yang bisa melemahkan umat? Seandainya bukan karena ilmu Anda, niscaya umat akan jatuh ke dalam jurang berbagai *syubhat*.

Begitulah seharusnya para ulama kita mau menerima nasihat dan waspada terhadap berbagai *syubhat*, yang bisa menyebabkan umat lemah dan kalah.

2. Imam Ahmad bin Hanbal: Teguh di Zaman *Fitnah*.

Imam Ahmad memiliki sikap yang teguh dan penuh keberanian menghadapi Khalifah al-Ma'mun, pengasingan, serta penyesatan umat terkait akidah dan kitab sucinya. Sejumlah muridnya datang kepada beliau dan berkata, : “Mengapa Anda tidak melakukan takwil, wahai Imam kami?” Beliau berkata, “Bagaimana saya melakukan takwil, sementara orang-orang di belakang pintu menulis apa yang saya katakan?”

Beliau mengalami bertahun-tahun dipenjara, dibelenggu dan disiksa. Namun, semua itu tidak menghalangi beliau dari mengingat Allah SWT.

Sikap inilah yang menghantarkan Imam Ahmad pada kedudukan tinggi. Salah seorang ulama berkata, “Saya tidak melihat seseorang anak muda dan ilmunya masih sedikit yang lebih teguh menjalankan perintah Allah daripada Muhammad bin Nuh. Saya berharap bahwa

Allah menjadikan dia *husnul khatimah*. Suatu hari, dia berkata kepada saya, sedang saya dan dia berada di tempat yang sunyi, 'Wahai Abu Abdillah, bertakwalah kepada Allah. Sungguh Anda tidak seperti saya. Anda adalah teladan umat. Mereka telah menyerahkan beban kepada Anda karena mereka percaya kepada Anda. Bertakwalah kepada Allah dan teguhlah dalam menjalankan perintah-Nya.' Imam Ahmad berkata, 'Saya kagum atas dukungan yang diberikan kepada saya. Begitu juga nasihatnya.'"

Ketika beliau dalam penjara, dan hendak dicambuk, seorang pria yang berada di penjara yang sama berkata kepada beliau, "Wahai Ahmad: Saya seorang pencuri. Setiap kali saya mencuri, saya ditangkap dan dicambuk. Namun, saya tetap dan tetap mencuri. Pukulan itu tidak berpengaruh kepada saya. Adapun Anda berada untuk melindungi akidah Anda. Hati-hatilah, jangan sampai saya justru lebih teguh daripada Anda. Bersiaplah dicambuk."

Subhanallah, bagaimana keteguhan ini ada? Dari siapa keteguhan itu ada?! Dari seorang pencuri! Demi Allah, saya tidak mampu menahan tumpahan air mata mendapatkan pelajaran dari sikap yang agung ini.

Begitulah seharusnya para ulama mengambil pelajaran dari sikap ini. Seharusnya ulama kita memiliki karakter mulia ini. Mengatakan kebenaran dan merasakan tanggung jawab. Tidak egois dan tidak membanggakan diri demi menyelamatkan umat Islam dan negaranya.

3. *Imam al-Buwaithi: Aku Lebih Memilih Mati dalam Kondisi Terikat dengan Rantai-Rantai Besi Ini, Agar Suatu Hari Nanti, Orang-Orang Mengerti Bahwa Telah Mati dalam Mempertahankan Keyakinan Ini Seseorang yang Terbelenggu dalam Ikatan-Ikatan Besi.*

Imam al-Buwaithi, Yusuf Abu Ya'qub bin Yahya al-Mishri, adalah seorang yang sangat alim dan pemimpin ahli fikih. Beliau merupakan

murid kesayangan Imam Syafii. Beliau seorang imam dalam ilmu dan teladan dalam amal. Beliau seorang yang zuhud, *rabbani* dan mujtahid. Lisannya selalu basah berzikir kepada Allah SWT.

Ibnu Abi Du'ad dedengkot Mu'tazilah, melalui surat yang dia kirim, meminta gubernur Mesir untuk memaksa al-Buwaithi agar berkata bahwa al-Quran itu makhluk. Al-Buwaithi tetap menolak untuk mengatakannya. Tampaknya wali itu cerdas dengan berkata kepada beliau, "Katakan ini antara aku dan engkau saja." Al-Buwaithi berkata, "Di belakangku ada ratusan ribu orang yang tidak mengerti arti dari semua ini. Aku tidak mau mereka tersesat karena aku." Akhirnya al-Buwaithi dipaksa pergi meninggalkan Mesir menuju Baghdad.

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Aku melihat dia di atas keledai, digantungi besi seberat 40 ritel. Lehernya dikalungi rantai besi. Kakinya diikat. Antara kalung besi di leher dan rantai besi di kaki dihubungkan dengan rantai besi yang berat. Dalam kondisi itu dia berkata, "Allah telah menciptakan makhluknya dengan kata, "*Kun*". Apabila (firman Allah "*kun*") itu adalah makhluk, itu berarti makhluk diciptakan dengan makhluk." Bila aku masuk menemuinya (Al-Watsiq), aku pasti akan mengatakan kebenaran kepada dia, "*Aku lebih memilih mati dalam kondisi terikat dengan rantai-rantai besi ini, agar suatu hari nanti, orang-orang mengerti bahwa telah mati dalam mempertahankan keyakinan ini seseorang yang terbelenggu dalam ikatan-ikatan besi.*"

Beliau wafat dengan tetap diikat dalam penjara di Baghdad, Irak pada tahun 231 H.

4. *Imam al-Azhar: Pergi ke Pasar dengan Kain Kafannya untuk Menghadapi Westernisasi Wanita*

Ini adalah sikap tegas ulama yang terjadi baru-baru ini pada zaman kita. Ketika revolusi

di Mesir tahun 1952. Muhammad Najib, Presiden Mesir saat itu, berdiri dengan sombong dan berkata, “Kita akan menyamakan perempuan dengan laki-laki dalam semua hak.”

Besoknya semua surat kabar memberitakan, “Presiden Muhammad Najib menyatakan dalam pidatonya bahwa dia akan menyamakan perempuan dengan laki-laki.”

Syaikh Al-Azhar saat itu adalah Muhammad al-Khidr Husain *rahimahullah*, asal Tunisia. Ketika sampai kepada beliau berita itu, beliau menghubungi Presiden Muhammad Najib, dan berkata, “Anda harus mengingkari berita itu, atau besok saya akan pergi ke pasar dengan kain kafanku, dan menyerukan semua orang untuk menghadapi Anda.”

Para anggota Dewan Revolusi lalu menemui Syaikh Al-Azhar di kantornya. Mereka berkata, “Wahai Syaikh kami, ini persoalan sulit, namun kami sampaikan kepada Anda, bahwa ini

semua tidak benar.”

Syaikh berkata, “Pernyataan ini tidak berguna. Saya ingin Anda mengingkarinya di depan umum, seperti ketika Anda mengumumkannya. Jika tidak, besok, saya akan pergi dengan memakai kain kafan. Demi Allah, saya tidak akan berhenti sampai saya memenangkan pertempuran ini, atau nyawaku melayang.”

Mereka berkata, “Wahai Tuan, apakah Anda akan bersikeras dengan sikap Anda ini?” Beliau berkata, “Ya.”

Lalu Muhammad Najib berdiri, mengumumkan penolakannya terhadap berita, bahwa itu salah. “Bagaimana saya dapat mengatakan perkataan ini, sedangkan ia bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.”

Perhatikan sikap agung ini. Bagaimana syaikh mempertaruhkan jiwanya menghadapi pelanggaran terhadap satu hukum syariah saja yang dimaksudkan untuk menghilangkan identitas umat dan para wanitanya. Apa yang kita pikirkan jika yang dilanggar banyak hukum Islam, tidak hanya satu. Seandainya para ulama kita sekarang menempuh cara ini, tidak menyimpang darinya, niscaya kami yakin bagaimana pernyataan Syaikh itu bergema dan berdampak besar di tangan umat, serta di tengah kerumunan massa besar yang berjalan di belakang para ulama *rabbani* ... yang akan memimpin umat menuju perubahan.

Ingat! Yang paling ditakuti oleh negara adalah opini umum dan kerumunan massa umat. Sungguh semua itu merupakan senjata sebenarnya. Seandainya para ulama menggunakan dengan sebaik-baiknya, niscaya mereka akan memimpin umat menuju perubahan yang tepat dan benar. [Bersambung]

[Muhammad Bajuri–Abdurrahman al-Amiry, *Al-Waie Arab*, edisi: 397, Tahun XXXIV, Shafar 1441 H./Oktober 2019 M.]

Ingat! Yang paling ditakuti oleh negara adalah opini umum dan kerumunan massa umat. Sungguh semua itu merupakan senjata sebenarnya. Seandainya para ulama menggunakan dengan sebaik-baiknya, niscaya mereka akan memimpin umat menuju perubahan yang tepat dan benar.

PELAYANAN KESEHATAN DALAM SEJARAH KHILAFAH

Prof. Dr. Fahmi Amhar

Pelayanan Kesehatan dalam Sejarah Khilafah Islam bisa kita bagi dalam tiga aspek. *Pertama*, tentang pembudayaan hidup sehat. *Kedua*, tentang pemajuan ilmu dan teknologi kesehatan. *Ketiga*, tentang penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan.

Pembudayaan Hidup Sehat

Rasulullah saw. banyak memberikan contoh kebiasaan sehari-hari untuk mencegah penyakit. Misalnya: menekankan kebersihan; makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang; lebih banyak makan buah (saat itu buah paling tersedia di Madinah adalah rutab atau kurma segar); mengisi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara; kebiasaan puasa Senin-Kamis; mengkonsumsi madu, susu kambing atau habatussaudah, dan sebagainya.

Sehebat apapun penemuan dalam teknologi kesehatan, hanya akan efektif

menyehatkan masyarakat bila mereka sadar hidup sehat, kemudian menggerakkan penguasa membangun infrastruktur pencegah penyakit dan juga fasilitas bagi yang terlanjur sakit. Para tenaga kesehatannya juga orang-orang yang profesional dan memiliki integritas. Bukan orang-orang dengan pendidikan asal-asalan serta bermental pedagang.

Menarik untuk mencatat bahwa di dalam Daulah Islam, pada tahun 800-an Masehi, madrasah sebagai sekolah rakyat praktis sudah terdapat di mana-mana. Tak heran bahwa kemudian tingkat pemahaman masyarakat tentang kesehatan pada waktu itu sudah sangat baik.

Pemajuan Ilmu dan Teknologi Kesehatan

Rasulullah saw. juga menunjukkan persetujuannya pada beberapa teknik pengobatan yang dikenal saat itu, seperti

bekam atau meminumkan air kencing unta pada sekelompok orang Badui yang menderita demam. Beliau juga menjadikan seorang dokter yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada dirinya sebagai dokter publik. Dokter tersebut tentu masih non-Muslim saat belajar medis. Nah, ada sabda Rasulullah sa., “*Antum a'lamu bi umuri dunyakum* (Kalian lebih tahu urusan dunia kalian).”

Hadis ini, sekalipun munculnya terkait dengan teknik penyerbukan di dunia pertanian, dipahami oleh generasi Muslim terdahulu juga berlaku untuk teknik pengobatan. Itulah latar belakang sehingga dalam beberapa abad kaum Muslim benar-benar memimpin dunia di bidang kedokteran, baik secara preventif maupun kuratif, baik di teknologinya maupun manajemennya.

Karena itu keliru juga mensimplifikasi bahwa sehat ala Nabi saw. itu sekadar pada 4 hal (1) banyak puasa sunnah, dll; (2) mengkonsumsi madu atau habatussaudah; (3) bila sakit, terapinya adalah bekam; (4) dalam kondisi tak ada apapun, atau untuk penyakit karena pengaruh sihir dilakukan ruqyah *syar'iyah*, misalnya dengan dibacakan surat al-Fatihah.

Penyederhanaan seperti di atas tidak ada pada masa keemasan Islam. Kaum Muslim secara sadar melakukan penelitian-penelitian ilmiah di bidang kedokteran secara orisinal dan memberikan kontribusi yang luar biasa di bidang kedokteran. Bahkan mereka memiliki *genre* yang khas, melampaui *genre* yang ada saat itu, seperti kedokteran Yunani, India, Persia, dan karya-karya tokoh kedokteran kuno (Hippocrates, Celcus atau Galen).

Tidak dapat dipungkiri, Rasulullah saw. adalah inspirator utama kedokteran Islam. Meski beliau bukan dokter, kata-katanya yang terekam dalam banyak hadis sangat inspiratif, semisal, “*Tidak ada penyakit yang Allah ciptakan, kecuali Dia juga menciptakan cara*

penyembuhannya.” (HR al-Bukhari).

Muslim ilmuwan pertama yang terkenal berjasa luar biasa adalah Jabir al-Hayan atau *Geber* (721-815 M). Beliau menemukan teknologi destilasi, pemurnian alkohol untuk disinfektan, serta mendirikan apotik yang pertama di dunia yakni di Baghdad.

Banu Musa (800-873 M) menemukan masker gas untuk dipakai para pekerja pertambangan dan industri sehingga tingkat kesehatan para pekerja dapat diperbaiki.

Muhammad ibn Zakariya ar-Razi (865-925 M) memulai eksperimen terkontrol dan observasi klinis, serta menolak beberapa metode Galen dan Aristoteles yang pendapat-pendapatnya hanya berlandaskan filsafat, tidak dibangun dari eksperimennya yang dapat diverifikasi. Ar-Razi juga meletakkan dasar-dasar mengenali penyakit dari analisis urin. Bersama-sama Tsabit bin Qurra dan Ibn al Jazzar dia juga menemukan cara awal penanganan disfungsi ereksi.

Pada abad-9, Ishaq bin Ali Rahawi menulis kitab *Adab ath-Thabib*, yang untuk pertama kalinya ditujukan untuk kode etik kedokteran. Ada 20 bab di dalam buku itu. Di antaranya merekomendasikan agar ada *peer-review* atas setiap pendapat baru di dunia kedokteran. Kalau ada pasien yang meninggal, maka catatan medis sang dokter akan diperiksa oleh suatu dewan dokter untuk menguji apakah yang dia lakukan sudah sesuai standar layanan medik.

Masih di abad-9, Al-Kindi menunjukkan aplikasi matematika untuk kuantifikasi di bidang kedokteran, misalnya untuk mengukur derajat penyakit, mengukur kekuatan obat hingga dapat menaksir saat kritis pasien.

Sekitar tahun 1000 M, Ammar ibn Ali al-Mawsili menemukan jarum hypodermik, yang dengannya dia dapat melakukan operasi bedah katarak pada mata! Pada kurun waktu yang sama, Abu al-Qasim az-Zahrawi menemukan

plaster adhesive untuk mengobati luka dengan cepat. Penemuan ini sangat membantu pasukan Islam di medan jihad.

Abu al-Qasim az-Zahrawi dianggap Bapak ilmu bedah modern, karena dalam kitab *Tashrif* (suatu ensiklopedi 30 jilid) yang dipublikasikan pada tahun 1000 M, sudah menemukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam bedah, termasuk plester dan 200 alat bedah. Sebagian besar alat ini belum pernah digunakan orang sebelumnya, termasuk beberapa alat bedah yang khas digunakan untuk wanita. Persoalan bedah juga terkait anasthesi (pembiusan). Beberapa zat bius seperti campuran opium sudah digunakan dengan tepat oleh Abu al-Qasim, Ibnu Zuhur maupun Ibnu Sina.

Pada 1037 Ibnu Sina menemukan thermometer meski standarisasinya baru dilakukan oleh Celsius dan Fahrenheit berabad-abad kemudian. Ibnu Sina juga sangat dikenal karena bukunya *Qanun fi ath-Thib*, sebuah ensiklopedia pengobatan (pharmacopoeia) yang nyaris menjadi standar kedokteran dunia hingga Abad 18.

Ibnu an-Nafis adalah Bapak Fisiologi peredaran darah yang merupakan perintis bedah manusia. Pada tahun 1242 ia sudah dapat menerangkan secara benar sirkulasi peredaran darah jantung-paru-paru. Di Barat baru tahun 1628 William Harvey menemukan hal yang sama.

Pada abad 15, kitab *Tashrih al-Badan* karya Mansur bin Ilyas menggambarkan secara lengkap struktur tubuh manusia, termasuk

sistem syaraf.

Semua prestasi ini terjadi tidak lain karena adanya negara—yakni Khilafah—yang mendukung aktivitas riset kedokteran untuk kesehatan umat. Umat yang sehat adalah umat yang kuat, produktif dan memperkuat negara. Kesehatan dilakukan secara preventif (pencegahan), bukan cuma kuratif (pengobatan). Anggaran negara yang diberikan untuk riset kedokteran adalah investasi, bukan anggaran sia-sia.

Menarik untuk mengetahui, bahwa cikal-bakal vaksinasi sebagai cara preventif itu juga dari dokter-dokter Muslim zaman Khilafah Turki Utsmani, bahkan mungkin sudah dirintis sejak zaman Abbasiyah. Ini diceritakan pada buku, *1001 Inventions Muslim Heritage in Our World*. Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), istri Duta Besar Inggris untuk Turki saat itu, membawa ilmu vaksinasi ke Inggris untuk memerangi cacar ganas (*smallpox*). Namun, Inggris perlu menunggu hampir

setengah abad, sampai tahun 1796 Edward Jenner mencoba teknik itu dan menyatakan berhasil. Cacar ganas yang pernah membunuh puluhan juta manusia hingga awal abad-20 akhirnya benar-benar berhasil dimusnahkan di seluruh dunia dengan vaksinasi yang massif. Kasus cacar ganas terakhir tercatat tahun 1978. Akhirnya, Jennerlah yang disebut dalam sejarah sebagai penemu vaksinasi, terutama vaksin cacar.

Dengan ilmu dan teknologi yang semakin



Cover Buku *Medieval Islamic Medicine* karya Peter E. Pormann and Emilie Savage-Smith

maju itu, otomatis kompetensi tenaga kesehatan juga wajib meningkat. Tenaga kesehatan secara teratur diuji kompetensinya. Dokter Khalifah menguji setiap tabib agar mereka hanya mengobati sesuai pendidikan atau keahliannya. Mereka harus diperankan sebagai konsultan kesehatan, dan bukan orang yang sok mampu mengatasi segala penyakit.

Penyediaan Infrastruktur & Fasilitas Kesehatan

Pada kurun abad 9-10 M, Qusta ibn Luqa, ar-Razi, Ibn al-Jazzar dan al-Masihi membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan, yang sebelumnya hanya diserahkan pada kesadaran masing-masing orang, yang di perkotaan padat penduduk akan berakibat kota yang kumuh. Kebersihan kota menjadi salah satu modal sehat selain kesadaran sehat karena pendidikan.

Ini adalah sisi hulu untuk mencegah penyakit sehingga beban sisi hilir dalam pengobatan jauh lebih ringan. Meski demikian, negara membangun rumah sakit di hampir semua kota di Daulah Khilafah. Ini adalah rumah-rumah sakit dalam pengertian modern. Rumah sakit ini dibuat untuk mempercepat penyembuhan pasien di bawah pengawasan staf yang terlatih serta untuk mencegah penularan kepada masyarakat.

Pada zaman Pertengahan, hampir semua kota besar Khilafah memiliki rumah sakit. Di Cairo, rumah sakit Qalaqun dapat menampung hingga 8000 pasien. Rumah sakit ini juga sudah digunakan untuk pendidikan universitas serta untuk riset. Rumah Sakit ini juga tidak hanya untuk yang sakit fisik, namun juga sakit jiwa. Di Eropa, rumah sakit semacam ini baru didirikan oleh veteran Perang Salib yang menyaksikan kehebatan sistem kesehatan di Timur Tengah. Sebelumnya pasien jiwa hanya diisolir dan paling jauh dicoba diterapi dengan ruqyah.

Semua rumah sakit di Dunia Islam dilengkapi dengan tes-tes kompetensi bagi

setiap dokter dan perawatnya, aturan kemurnian obat, kebersihan dan kesegaran udara, sampai pemisahan pasien penyakit-penyakit tertentu.

Rumah-rumah sakit ini bahkan menjadi favorit para pelancong asing yang ingin mencicipi sedikit kemewahan tanpa biaya, karena seluruh rumah sakit di Daulah Khilafah bebas biaya. Namun, pada hari keempat, bila terbukti mereka tidak sakit, mereka akan disuruh pergi, karena kewajiban menjamu musafir hanya tiga hari.

Banyak individu yang ingin berkontribusi dalam amal ini. Negara memfasilitasi dengan membentuk lembaga wakaf (*charitable trust*) yang menjadikan makin banyak madrasah dan fasilitas kesehatan bebas biaya. Model ini pada saat itu adalah yang pertama di dunia.

Khatimah

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa kaum Muslim terdahulu memahami bahwa sehat tidak hanya urusan dokter, tetapi pertama-tama urusan masing-masing untuk menjaga kesehatan. Namun, ada sinergi yang luar biasa antara negara yang memfasilitasi manajemen kesehatan yang terpadu dan sekelompok ilmuwan Muslim yang memikul tanggung jawab mengembangkan teknologi kedokteran.

Wallâhu a'lam bi ash-shawab. □

Daftar Rujukan

- 1 Al-Hassani, Salim (Ed., 2012): *1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization: Official Companion to the 1001 Inventions Exhibition*. National Geographic, London.
- 2 Boyden, Stephen Vickers (2004). *The Biology of Civilization*. UNSW Press. pp. 7–8.
- 3 Durant, Will (1935-1975): *Story of Civilization*. New York: Simon & Schuster.
- 4 Fernández-Armesto, Felipe (2001). *Civilizations: Culture, Ambition, and the Transformation of Nature*. Simon & Schuster.
- 5 Hagger, Nicholas (2008): *The Rise and Fall of Civilizations: Why Civilizations Rise and Fall and What Happens When They End Paperback* – March 7, 2008



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dari Abu Hurairah).¹

Karena itu dengan tegas Imam an-Nawawi, dalam kitabnya, *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, menjelaskan:

اعْلَمَنَّ أَنَّ التَّعْلِيمَ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي بِهِ قَوَامُ الدِّينِ،
وَبِهِ يُؤْمَنُ بِإِحْقَاقِ الْعِلْمِ، فَهُوَ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الدِّينِ
وَأَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَأَكْبَدِ فُرُوضِ الْكَيْفَايَاتِ. قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) وَقَالَ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا الْآيَةَ. فِي الصَّحِيحِ مِنْ طَرِيقٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ؟ قَالَ: (لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبِ)
وَالْأَحَادِيثُ بِمَعْنَاهُ كَثِيرَةٌ، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ.

Ketahuiilah, mengajarkan Islam itu merupakan perkara pangkal, yang dengan itu agama Islam tetap tegak. Dengan itu, hilangnya ilmu akan terjaga. Mengajarkan [Islam] merupakan urusan agama yang paling penting, ibadah yang paling agung dan fardhu kifayah yang paling kuat. Allah SWT berfirman: Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi al-Kitab, “Hendaknya kalian menjelaskannya kepada umat manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya.” (QS Ali ‘Imran [3]: 187). Allah juga berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan... (QS al-Baqarah [2]: 159). Dalam kitab Ash-Shahih, dari berbagai jalur, Nabi saw. bersabda, “Hendaknya yang melihat [hadir di majelis] di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir.” Banyak hadis yang maknanya sama. Ijmak menyepakati hal itu.²

Apalagi jika yang disembunyikan, dihapus dan tidak diajarkan itu merupakan ilmu yang

BOLEHKAH MENGHAPUS AJARAN ISLAM?

Soal:

Bagaimana hukumnya menghapus ajaran Islam dari materi yang diajarkan kepada umat? Apalagi jika disertai tuduhan bahwa ajaran Islam itu berpotensi menyebabkan kekerasan dan kerusakan? Atau materi itu boleh diajarkan, tetapi bukan untuk dilaksanakan?

Jawab:

Menghapus ajaran Islam dari materi yang diajarkan kepada umat hukumnya haram. Ini termasuk larangan *kitmân al-‘ilm* (menyembunyikan ilmu) (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 159-160; QS Ali ‘Imran [3]: 187).

Perintah menyampaikan dan menjelaskan ajaran Islam hukumnya wajib. Kewajiban ini dikuatkan oleh adanya larangan menyembunyikannya, yang disertai dengan ancaman laknat Allah dan laknat dari seluruh makhluk-Nya. Tindakan menyembunyikan, termasuk di dalamnya menghapus ajaran Islam, agar tidak diketahui umat, itu hukumnya haram. Apapun alasannya.

Bahkan dengan keras Rasulullah saw. mengancam mereka:

«مَنْ سئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَجْمَعَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu [Islam], kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah akan menyumbat mulutnya dengan api neraka pada Hari Kiamat (HR

paling penting, seperti masalah Khilafah dan Jihad. Nabi menyebut Jihad sebagai *Dzarwah Sanam al-Islam* [ujung tombak Islam].³ Artinya, begitu pentingnya ajaran Islam ini. Begitu juga dengan Khilafah, dinyatakan oleh para ulama' sebagai *Taj al-Furudh* [mahkota kewajiban], *Ahamm al-Wajibat* [kewajiban paling penting], atau *Ma'lum min ad-Din bi ad-Dharurah* [perkara yang urgensinya dalam Islam sudah diketahui].⁴ Tidak hanya dibahas dalam pembahasan Akidah, tetapi juga Fiqih dan Tarikh.⁵

Suka ataupun tidak, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Sama seperti shalat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Itu semua adalah ajaran Islam. Keengganan seseorang untuk mentaati perintah-perintah Allah tersebut tidak serta-merta membuat syariah Allah itu dipersoalkan dan kemudian disingkirkan. Sebab pada hakikatnya manusialah yang harus menyesuaikan diri dengan syariah Islam. Bukan sebaliknya.

Banyak ulama yang sudah menjelaskan ajaran Islam tentang Khilafah. Tentang Khilafah, Imam ar-Razi menyatakan:

الْخِلَافَةُ أَوْ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَىٰ أَوْ إِمَارَةُ الْمُؤْمِنِينَ كُلُّهَا
يُؤَدِّي مَعْنَىٰ وَاحِدًا وَ تَدُلُّ عَلَىٰ وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ
السُّلْطَةُ الْعُلْيَا لِلْمُسْلِمِينَ

*Khilafah, Imamah al-Uzhma atau Imarah al-Mu'minin semuanya memberikan makna yang satu (sinonim), dan menunjukkan tugas yang juga satu (sama), yaitu kekuasaan tertinggi bagi kaum Muslim.*⁶

Imamah/Khilafah selalu dibahas oleh semua mazhab di dalam Islam. Dalam hal ini, Syaikh Muhammad Abu Zahrah menyatakan:

الْمَذَاهِبُ السِّيَاسِيَّةُ كُلُّهَا تَدُورُ حَوْلَ الْخِلَافَةِ

*Semua mazhab siyasah (selalu) membincangkan seputar Khilafah.*⁷

Menurut Syaikh al-Islam al-Imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Marwa an-Nawawi, menegakkan Imamah/Khilafah adalah kewajiban. Ia menyatakan:

إِلْفَصْلُ الثَّانِي فِي وُجُوبِ الْإِمَامَةِ وَ بَيَانِ طُرُقِهَا: لَا
بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَ يَنْصُرُ السُّنَّةَ وَ
يَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِينَ وَ يَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَ يَضَعُهَا
مَوَاضِعَهَا. قُلْتُ: تَوَلَّى الْإِمَامَةَ فَرَضٌ كِفَايَةٌ

Pasal Kedua Tentang Kewajiban Imamah (Khilafah) dan Penjelasan Metode (Mewujudkan)-nya: Suatu keharusan bagi umat adanya seorang imam (khalifah) yang menegakkan agama, menolong Sunnah, menegakkan keadilan bagi orang-orang yang terzalimi serta menunaikan berbagai hak dan menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya. Saya menyatakan bahwa menegakkan Imamah (Khilafah) adalah fardhu kifayah.⁸

Itu hanyalah sebagian kecil dari pandangan para ulama terkait Khilafah. Masih banyak pendapat ulama seputar Khilafah. Mereka memposisikan Khilafah sebagai perkara yang sangat penting. Karena itu mereka tidak pernah menghilangkan pembahasan Khilafah di dalam kitab-kitab mereka.

Begitupun materi tentang jihad. Para ulama memberikan perhatian penuh pada perkara jihad karena jihad memang banyak dinyatakan dalam al-Quran (lihat, misalnya: QS al-Furqan [1]: 52; QS al-Baqarah [2]: 216; QS ash-Shaff: 10-11).

Secara umum istilah jihad disebutkan sebanyak 37 kali di dalam al-Quran. Hasan Izzuddin al-Jamal dalam *Mu'jam wa Tafsir Lughawi li Kalimat al-Qur'an* menyatakan bahwa dalam al-Quran pada umumnya kata jihad berarti mengerahkan kemampuan menyebarkan dan membela ajaran Islam.

Secara *syar'ij* jihad bermakna perang (*qitâl*) di jalan Allah. Selain dalam beberapa ayat di atas, jihad dalam makna perang di jalan Allah ini antara lain dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw., sebagaimana penuturan Anas bin Malik ra.:

«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»

Perangilah kaum musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian (HR Abu Dawd, an-Nasa'i dan Ahmad).

Allah SWT dan Rasul-Nya mensyariatkan jihad, dengan berbagai tingkatannya, dimaksudkan agar Islam benar-benar tegak di muka bumi. Siapapun yang mengaku Muslim dituntut untuk berjihad menghadapi pelaku kekufuran, kezaliman dan kemungkaran; mengeluarkan manusia dari kegelapan kekufuran menuju cahaya Islam (*min azh-zhulumât ila an-nûr*). Tentu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing.

Karena itu menghapus materi jihad dan Khilafah dari kurikulum madrasah jelas merupakan upaya untuk menutup-nutupi kebenaran. Ini merupakan bentuk kemungkaran yang sangat nyata dan jelas haram. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ

بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾

Sungguh orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk yang telah Kami turunkan, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat (QS al-Baqarah [2]: 159).

Mengapa menyembunyikan kebenaran diancam dengan laknat Allah SWT? Karena

manusia tidak akan masuk surga tanpa kebenaran. Jika kebenaran disembunyikan dari manusia maka sama saja dengan menutup jalan bagi manusia menuju surga. Wajarlah jika mereka dilaknat oleh Allah SWT.

Perilaku menghalang-halangi manusia dari jalan Islam tentu tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman. Pasalnya, hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir yang tidak sudi melihat umat Islam menaati aturan-aturan agamanya (Lihat: QS al-A'raf [7]: 44-45).

Apalagi jika penghapusan itu dengan tuduhan, bahwa Jihad dan Khilafah dianggap sebagai biang radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa dan negara, maka ini merupakan tindakan *iftira' 'ala-Llahi kadziba* [tuduhan jahat kepada Allah]. Ini tidak hanya mengingkari nash yang *qath'i*, tetapi juga menyerang perkara penting dalam ajaran Islam. Tindakan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Jika tidak hapus, tetapi dialihkan menjadi materi sejarah, dan tidak disertai dengan penjelasan tentang kewajiban untuk menjalankannya, maka itu sama seperti hukum yang telah dijelaskan di atas. Menyembunyikan ilmu, atau menghalangi pelaksanaan kewajiban, yang sama-sama haram. *Fa al-'iyadzu billâh!* []

Catatan kaki:

- ¹ Lihat, Abu Dawud, hadits no 3658; at-Tirmidzi, hadits no. 2649; Ibn Majah, hadits no. 264.
- ² Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab*, Juz I/30.
- ³ Hr. al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala as-Shihain*, hadits no. 2436, Juz III/347-348.
- ⁴ Lihat, Ibn Hajar al-Haitami, *as-Shawaiq al-Muhriqah*, Juz I/25; ar-Ramli, *Ghayat al-Bayan Syarah Zubad Ibn Ruslan*, hal. 23;
- ⁵ Lihat, Imam al-Ghazali, *al-Iqtshad fi al-I'tiqad*; an-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin wa 'Umdat al-Muftir, as-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa'*.
- ⁶ Lihat, Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shahihâh*, hal. 186.
- ⁷ Lihat, Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, Juz I/21.
- ⁸ Lihat, An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin wa Umdah al-Muftir*, Juz III/433.



JAMINAN SEJATI PEREMPUAN ADA PADA ISLAM

Ratu Erma R.

Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) diselenggarakan secara global selama 16 hari, dari 25 November-10 Desember setiap tahun. Pada peringatan tahun 2019 ini, Komnas Perempuan melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) menjadi semakin kompleks dan meluas serta tidak tertangani dan terlindungi.

Sepanjang tahun 2016 – 2018 terjadi 17.088 kasus KTP (kekerasan terhadap perempuan). Sebanyak 42%-nya adalah kekerasan seksual dan 52% dari kekerasan seksual tersebut adalah tindak perkosaan.

Perjuangan untuk menghilangkan KTP ini sudah cukup lama. Sejak tahun 1979 ada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang ditindaklanjuti dengan upaya para feminis untuk mendorong pemerintah masing-masing menerbitkan berbagai aturan yang mendukung penghapusan KTP. Di Indonesia, salah satunya adalah pengesahan UU – Penghapusan KDRT

tahun 2004. Kini gerakan perempuan fokus mendorong Pemerintah agar mengesahkan RUU Penghapusan kekerasan seksual (PKS) yang belum dilegalkan.

Pertanyaan kritis patut kita lontarkan terhadap perjuangan panjang feminis ini. Mengapa tak kunjung membuahkan hasil, bahkan justru masalah semakin kompleks?

Kritik Cara Pandang

Para feminis menempatkan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan sebagai masalah utama KTP. Mereka mengatakan, ada konstruksi seksualitas di masyarakat patriarki yang mewajarkan laki-laki bersikap agresif terhadap perempuan, sehingga permisif terhadap kekerasan seksual. Perempuan menjadi pihak yang disalahkan. Misal, ada pelembagaan bahwa perempuan tidak boleh keluar malam, tidak boleh pakai baju terbuka, dan sebagainya. Mestinya, penting berpikir bahwa laki-laki juga harus mengontrol tubuhnya, menahan diri dan tidak

berpikiran kotor. Jika ada kasus KTP, bukan perempuan yang mesti disalahkan, tetapi bahwa pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya.

Cara berpikir seperti di atas, menunjukkan kekacauan berpikir dan kesembronoan mereka. Sebab ada kontradiksi yang sangat jelas antara tuntutan adanya UU yang melindungi perempuan dan tuntutan untuk 'membebaskan' perempuan. Ada kontradiksi antara himbuan untuk menghormati perempuan dan pembiaran terhadap perkembangan industri iklan, bisnis dan hiburan yang mengeksploitasi perempuan; juga pembiaran terhadap peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan hiburan porno yang memicu laki-laki memperkosakan perempuan.

Kontradiksi inilah yang menjadi ciri khas ideologi kapitalis liberal. Ideologi ini menyanjung nilai-nilai kebebasan individu dan mengabaikan akibat buruk pada masyarakat. Kebutuhan individu manapun mesti dipenuhi selama mereka menginginkannya. Tidak peduli apakah keinginan itu benar atau salah. Kapitalisme menganggap bahwa unsur masyarakat hanya individu saja. Mereka menafikan aturan, pemikiran dan perasaan yang dibentuk oleh aturan tersebut. Fokusnya pada kepentingan individu dan mewujudkan semua kebutuhannya. Aturan dibuat ketika muncul gesekan atau konflik di antara kepentingan individu-individu tersebut. Sebab itu, aturan dari ideologi kapitalis seperti 'pemadam kebakaran'. Baru dirumuskan jika masalah sudah terjadi. Bersifat tambal sulam dan kontradiktif. Tidak menyelesaikan sama sekali. Selamanya masyarakat di sistem kapitalis liberal akan bergulat dengan masalah yang tidak kunjung usai, seperti KTP ini.

Karena itu penanganan KTP tanpa kembali pada persoalan dasar manusia tentu tidak akan menemukan titik terang yang menunjukkan

solusi. Keyakinan feminis bahwa KTP dapat diselesaikan dengan legislasi UU, namun tidak mempersoalkan bercokolnya ideologi kapitalis yang mendewakan kebebasan individu dan merendahkan martabat perempuan, adalah kesia-siaan. Sebab di satu sisi mereka minta perempuan di-'merdeka'-kan dengan tidak diikat nilai atau aturan yang mengekang, apakah itu agama atau budaya. Di sisi lain mereka tidak bisa menolak doktrin kapitalisme yang mewajibkan pemenuhan kepentingan individu, apa dan siapapun itu. Mereka tidak memahami bahwa berbagai persoalan yang menimpa perempuan sesungguhnya lahir dari ide kebebasan ini.

Penanganan yang sungguh-sungguh atas kasus KTP memerlukan sistem pemerintahan yang menjamin perwujudan perlindungan terhadap perempuan sebagai pilar utama di setiap level kebijakan.

Jaminan Perlindungan Sejati

Sesungguhnya yang memahami potensi dan karakter manusia itu adalah Pencipta-Nya sendiri, Allah SWT. Zat Yang Mahatahu ini telah menciptakan naluri seksual pada laki-laki dan perempuan sekaligus menurunkan syariah untuk mengaturnya.

Berikut adalah Jaminan Sistem Islam untuk mengatur interaksi lawan jenis dalam masyarakat Islam, yang tidak akan menimbulkan KTP dan persoalan lain yang ditimbulkan dari interaksi ini.

1. Jaminan dengan Sistem Pergaulan.

Pertama: Memandang perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan domestik dan publik. Rasulullah saw. bersabda, "*Innama an-nisa' saqa'iq ar-rijal* (Perempuan adalah 'saudara kandung' para lelaki)."

Di rumah tangga, mereka seperti dua orang sahabat yang saling *support* kebutuhan

masing-masing. Bekerjasama dalam mendidik generasi. Dalam kehidupan publik mereka adalah mitra sejajar dalam memajukan masyarakat. Tidak membenarkan memandang perempuan sebagai obyek pemuas hasrat seksual. Islam membatasi perbincangan seksual hanya dalam ranah domestik, di antara suami-istri. Pandangan ini diedukasi dalam pendidikan keluarga oleh orangtua, juga di sekolah formal termasuk pendidikan non-formal di masyarakat. Dengan itu terbentuk pandangan khas masyarakat Islam terhadap interaksi laki-laki dan perempuan dalam rangka melestarikan manusia dan bukan pandangan seksualitas semata, seperti pandangan Barat sekular.

Kedua: Perintah kepada laki-laki dan perempuan untuk menutupi auratnya dan menjaga kemaluannya. Pasalnya, semua bermula dari pandangan yang tidak dijaga, yang akan menjerumuskan pada keharaman.

Ketiga: Memudahkan urusan untuk menikah. Tidak mempersulit. Pasalnya, menikah adalah sarana penyaluran naluri seksual yang sah. Menikah juga akan menjaga kehormatan masing-masing pasangan.

Keempat: Melarang perempuan untuk berdandan berlebihan (*tabarruj*=menonjolkan kecantikan kepada laki-laki lain) yang merangsang naluri seksual laki-laki.

Kelima: Mencegah laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas yang merusak akhlak. Perempuan tidak dibolehkan bekerja yang mengeksploitasi sisi kewanitannya, seperti menjadi SPG, dan lain-lain.

Keenam: Memerintahkan *mahram* untuk menemani perjalanan perempuan yang lebih dari sehari semalam dalam rangka menjaga kehormatannya.

2. Jaminan dengan Sistem Penerangan dan Media.

Mengawasi pemilik media massa untuk

tidak menyebarkan konten porno dan akan menindak tegas jika melanggar dengan mencabut izin pendiriannya.

3. Jaminan dengan Sistem Ekonomi.

Menjamin kebutuhan finansial perempuan melalui pemberian nafkah oleh wali atau suaminya. Tidak mewajibkan wanita bekerja. Dengan itu ia dapat menjalankan secara sempurna tugas utama dan strategisnya dalam mendidik dan menjaga generasi.

4. Jaminan dengan Sistem Sanksi.

Menangani kelemahan individu yang terjerumus dalam penyimpangan dengan hukum yang jelas dan tegas. Menghukum pelaku pelecehan seksual, pemerkosaan, pacaran, pembunuhan dan sejenisnya dengan hukuman setimpal.

Penutup

Dari pemaparan singkat di atas, tampak bahwa hanya Islam sajalah yang memiliki nilai-nilai mulia dan benar-benar bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan perempuan. Jaminan perlindungan pada seluruh sistem di atas hanya bisa diterapkan oleh negara Khilafah yang menjadikan syariah Islam sebagai sumber aturan. Khilafah adalah negara yang menolak prinsip-prinsip rusak kapitalisme liberal dan mengagungkan nilai-nilai ketakwaan. Khilafah melarang segala bentuk aktivitas yang menjadikan perempuan sebagai obyek komoditas dan merendahkan perempuan. Khilafah adalah negara yang memberi rasa aman pada perempuan baik di dalam rumah maupun diluar rumah. Khilafah memberi kesempatan pada perempuan berkontribusi aktif di bidang politik, pendidikan, ekonomi dan layanan publik lain yang bebas dari pelecehan.

Wallâhu a'lam bish shawâb. []

STUDI KEBAHASAAN

أَبْحَاثُ اللُّغَةِ

Kata *al-lughah* secara bahasa berasal dari kata *laghâ – yalghû – laghw[an]*. Artinya, *takallama* (berbicara). Dikatakan: *Laghâ wa laghiya fî qawlihi*. Maksudnya: *Akhthâ'a al-kalâm* (salah bicaranya). *Laghâ wa laghiya*. Maksudnya: *Takallama 'an ghayri tafakkur[fin]* (Berbicara tanpa dipikirkan; atau berbicara yang bukan-bukan). *Al-Laghwu wa al-laghâ* bisa bermakna perkataan yang bukan-bukan atau omong-kosong; bisa juga berarti *katsratu al-kalâm* (banyak cakap). *Al-Laghatu* artinya suara. *Al-Lughah*, jamaknya *lughan* dan *lughât*, yakni bahasa, istilah (idiom); *lughat[un] khushûshiyah*, yakni *al-lahjah* (dialek) atau aksan (Lihat: *Kamus al-Munawir* pada kata *laghâ*).

Menurut Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, *al-lughah* merupakan suara-suara yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan tujuan/maksud mereka. Dikatakan: *laghawtu* yakni *takallamtu* (aku berbicara).

Arti ini dinyatakan di dalam al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لَهُ: دَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا
فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Orang-orang kafir berkata, "Janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka." (QS Fushshilat [41]: 26).

Makna *alghaw fîhi*, yakni buatlah hiruk-pikuk dengan banyak bicara terhadapnya.

Bahasa itu merupakan kumpulan lafal (kata) yang disusun. Lafal-lafal itu disusun, yakni dikarang atau dibuat, untuk mengungkapkan makna tertentu yang dimaksudkan oleh si penyusun dalam rangka berkomunikasi dengan orang lain. Inilah substansi bahasa. Dari situ, *al-lughah* (bahasa) secara istilah merupakan ungkapan tentang lafal-lafal yang disusun untuk makna-makna tertentu (Lihat: Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, Juz III, bab *Abhâts al-Lughah*).

Dalam konteks ushul fikih, studi kebahasaan dimaksudkan untuk bisa ber-*istidlal* dari nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Studi kebahasaan dalam hal ini sangat penting. Sebab *istidlal* (berargumentasi) dengan al-Quran dan as-Sunnah menuntut penguasaan atas dua aspek penting. *Pertama*: Terkait dengan klasifikasi al-Quran dan as-Sunnah, seperti *al-amru wa an-*



nahyu, al-'âm wa al-khâsh, al-mutlaqu wa al-muqayyadu, al-mujmal wa al-mubayyan, an-nâsikkh wa al-mansûkh. Kedua: Penguasaan tentang bahasa al-Quran dan as-Sunnah untuk bisa memahami makna-makna lafal serta konotasi yang ditunjukkan oleh nas-nas al-Quran dan as-Sunnah itu. Bahkan pemahaman tentang perintah dan larangan, umum dan khusus, mutlak dan *muqayyad* dsb, juga erat kaitannya dengan penguasaan bahasa. Jadi penguasaan bahasa al-Quran dan as-Sunnah mutlak diperlukan untuk bisa memahami nas dan ber-*istidlal* dengannya. Penguasaan bahasa itu diperoleh melalui studi kebahasaan, yakni studi kebahasaan (*abhâts al-lughah*) bahasa Arab, sebab al-Quran dan as-Sunnah berbahasa Arab.

Bahasa Arab merupakan lafal-lafal Arab yang disusun untuk menunjukkan makna-makna dan konotasi tertentu. Penunjukan lafal terhadap makna diambil dari penetapan pembuat/penyusun lafal itu. Oleh karena itu, masalah *al-wadh'u* (penyusunan/pembuatan) lafal/bahasa harus diketahui, kemudian diketahui *dalâlah lafazh*.

Al-Wadh'u atau penyusunan/pembuatan lafal adalah pengkhususan lafal dengan makna tertentu, jika atau ketika orang pertama mengucapkan lafal itu maka orang kedua yang diajak bicara memahaminya. Penyusunan/pembuatan lafal itu terjadi dipengaruhi oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan menjalani hidup. Untuk itu harus terjadi pertemuan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Pertemuan itu merupakan perkara yang alami. Pertemuan di antara manusia itu tidak akan terjadi saling membantu di dalamnya dan tidak bisa mencapai tujuan adanya pertemuan itu kecuali jika yang satu memberitahukan kepada yang lain apa yang ada di dalam benaknya. Di sinilah diperlukan wasilah pemberitahuan itu. Lafal (bahasa)-lah

yang paling baik sebagai wasilah memberitahukan apa yang ada di dalam benak. Dari situ, maka terjadilah penyusunan atau pembuatan lafal untuk memberitahukan atau mengungkapkan apa yang ada di dalam benak.

Jadi sebab penyusunan atau pembuatan bahasa adalah pengungkapan apa yang ada di dalam benak. Obyeknya adalah lafal yang tersusun dari huruf-huruf. Sesuatu yang diungkapkan dengan lafal yang disusun itu adalah makna-makna yang ada di dalam benak, bukan sesuatu yang ada di luar benak. Lafal disusun/dibuat bukan untuk mengungkapkan hakikat atau substansi sesuatu.

Jadi lafal berbeda dengan ide/pemikiran (*al-fikru*). Ide/pemikiran merupakan kesimpulan/hukum terhadap suatu fakta. Sebab pemikiran adalah transformasi fakta ke dalam otak melalui indera dan disertai informasi awal, lalu fakta itu ditafsirkan atau disimpulkan. Ini berbeda dengan lafal. Lafal tidak disusun untuk mengungkapkan hakikat fakta dan tidak pula mengungkapkan hukum atas fakta. Lafal itu disusun untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam benak baik itu sesuai dengan fakta atau tidak.

Dari situ, penetapan atau penyusunan bahasa (*wadh'u al-lughah*) itu bersifat *isthilâhiyah*, yakni bahasa itu merupakan buatan manusia, bukan dari Allah SWT. Manuialah yang mengistilahkan lafal-lafal, yakni mengistilahkan bahasa. Ini berlaku atas semua Bahasa, termasuk bahasa Arab. Bahasa Arab disusun atau diistilahkan oleh orang-orang Arab, bukan bersifat *tawqifi* berasal dari Allah SWT.

Bahasa Arab bersifat *istilahi*, yakni merupakan istilah yang diistilahkan oleh orang Arab. Mereka menyusun atau mengarang lafal/bahasa untuk menunjukkan makna tertentu. Karena bahasa Arab itu bersifat *istilahi* dari orang Arab, maka metode untuk mengetahui bahasa Arab adalah mengambilnya dari orang-



orang Arab. Jadi, jika mereka mengatakan bahwa lafal ini disusun/dikarang untuk makna ini atau makna ini ditetapkan untuk lafal ini, maka hal itu diterima sepenuhnya dan tidak perlu diperdebatkan. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk mendiskusikannya. Sebab masalahnya adalah masalah penyusunan istilah yang mereka istilahkan. Bukan masalah 'aqliyyah dan tidak berkaitan dengan pemikiran. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab diterima sepenuhnya.

Yang dimaksud dengan orang Arab yang menjadi sumber pengambilan bahasa itu adalah orang-orang Arab yang masih murni (*al-'arab al-aqhâh*) bahasanya. Mereka adalah orang-orang Arab yang berbicara menggunakan bahasa Arab sebelum rusaknya lisan Arab. Mereka ada hingga akhir abad kedua Hijrah. Bahkan sebagian dari mereka masih ada sampai abad keempat Hijrah. Mereka tinggal di kampung dan bahasa mereka tidak rusak. Dari merekalah bahasa Arab diambil.

Yang menjadi konsentrasi dalam studi bahasa adalah bahasa al-Quran dan as-Sunnah. Berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih, al-Quran diturunkan dalam tujuh huruf (*sab'atu ahruḥ*). Banyak pendapat dari para ulama tentang makna tujuh huruf itu. Menurut Ayaikh Atha' bin Khalil di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, dari pengelaborasi *qira'ah mutawatirah* al-Quran, bahwa semuanya tidak keluar dari dialek/aksen tujuh kabilah Arab: Quraisy, Tamim, Qays, Asad, Hudzail, sebagian dari Kinanah dan sebagian dari Tha'iy. Ketujuh kabilah itulah yang menjadi sandaran pengambilan *lisan al-'Arab* dan ketentuannya seperti dalam hal *al-gharîb* (kata-kata asing), *i'râb* (pengucapan akhir kata berdasarkan posisinya apakah *rafa'*, *nashab*, *jar* atau *jazm*) dan *tashrîf* (perubahan bentuk kata). Hal itu tidak diambil dari kabilah lain. Apalagi kabilah yang bercampur dengan non-

Arab seperti: Lakhm dan Judzam yang bertetangga dengan Mesir dan Qibthi; Bakar bertetangga dengan Persia; Qudha'ah, Ghasan dan Iyad yang bertetangga dengan penduduk Syam; penduduk Yaman yang bertetangga dengan India dan Habsyah; Abdu Qays dan Azad Amman yang tinggal di Bahrain yang bercampur dengan India dan Persia.

Metode mengambil dari 'Arab al-aqhâh itu adalah melalui metode periwayatan yang shahih. Suatu lafal, agar bisa dianggap sebagai bahasa Arab, harus diriwayatkan dari orang Arab dengan riwayat yang shahih. Jadi metode untuk mengetahui bahasa Arab adalah penukulan *mutawatir* dan *ahad* yang *shahih*. Sebagian besar lafal bahasa Arab dinukilkan secara *mutawatir*. Sebab sebagian besar lafal itu sudah *ma'lum* di kalangan orang Arab karena penggunaannya yang luas dan dinukilkan dari generasi ke generasi. Adapun riwayat *ahad* adalah lafal yang tidak *ma'lum*. Tidak diketahui secara luas oleh orang Arab umumnya dan tidak *mutawatir*. Metode untuk mendapatkan *zhan* (*ghalabatu azh-zhann*) atasnya tidak lain melalui *khbar ahad*, yakni penukulan secara *ahad*, seperti lafal-lafal yang diriwayatkan dari para sastrawan dan ahli bahasa yang menekuni bahasa Arab. Misal: al-Khalil bin Ahmad, al-Asma'iy, al-Azhari, Ibnu Sayidih, Ibnu Duraid, al-Laits bin Sa'ad, dan semisal mereka. Apa yang mereka riwayatkan itu dibukukan dalam berbagai *mu'jam* bahasa dan menjadi di antara rujukan untuk mengetahui makna lafal Arab.

Selain itu, *lisan al-'Arab* (bahasa Arab) dan ketentuannya, juga dinukilkan dari ketujuh kabilah itu dan dituliskan dalam buku utamanya oleh penduduk Bashrah dan Kufah. Akhirnya, hal itu menjadi cabang ilmu tersendiri.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

KEBOLEHAN BERBURU

أَبَا ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدِ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آيَاتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَعْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَادْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

Abu Tsa'labah al-Khusyani ra. berkata: Aku pernah datang kepada Rasulullah saw. Lalu aku katakan, "Ya Rasulullah saw., kami ada di tanah kaum Ahlul Kitab dan kami makan dari wadah-wadah mereka. Kami juga ada di tanah tempat berburu. Aku berburu dengan panahku. Aku berburu dengan anjingku yang terlatih dan yang tidak terlatih. Beritahulah aku, apa yang halal bagi kami dari yang demikian?" Rasulullah saw. bersabda, "Adapun yang engkau sebutkan bahwa engkau ada di tanah Ahlul Kitab, Kalian makan dari wadah-wadah mereka, maka jika kalian menemukan selain wadah mereka, maka makanlah di dalamnya. Jika kalian tidak menemukannya, cucilah wadah-wadah itu, lalu makanlah di dalamnya. Adapun apa yang engkau sebutkan bahwa engkau ada di tanah tempat berburu, maka apa yang kamu buru dengan panahmu, sebutlah Asma Allah lalu makanlah. Apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih, maka sebutlah Asma Allah, lalu makanlah. Apa saja yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih dan engkau masih sempat menyembelihnya maka makanlah." (HR al-Bukhari no. 5488, 5496, Muslim no. 1930; an-Nasai no. 4759; Ibnu Majah no. 3207, Ahmad no. 17752).

Dalam hadis lain, Adi bin Hatim ra. menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

«إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا، لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكَنَ وَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَنْتَ سَهْمُكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ»
Jika engkau melepaskan anjingmu dan engkau baca basmalah, lalu anjing itu menangkap buruan dan membunuhnya, maka makanlah. Jika anjing itu memakan (sebagian hewan

buruan itu) maka jangan engkau makan, melainkan anjing itu menangkap atas dirinya sendiri, dan jika bercampur dengan anjing lain, tidak dibaca nama Allah atasnya, lalu anjing-anjing itu menangkap dan membunuh maka jangan engkau makan, sebab engkau tidak tahu anjing yang mana yang membunuhnya. Jika engkau memanah hewan buruan, lalu engkau dapati setelah satu atau dua hari tidak ada padanya kecuali bekas panahmu maka makanlah, dan jika jatuh di air maka jangan engkau makan." (HR al-Bukhari no. 5484, Muslim no. 1929).

Di dalam hadis di atas Rasul saw. menjelaskan ketentuan hukum mengenai

berburu. Ada beberapa ketentuan hukum yang dijelaskan hadis di atas. Di antaranya:

Pertama, boleh berburu menggunakan panah, dan ketika melepaskannya disertai bacaan basmalah, maka hewan yang didapat boleh dimakan. Jika pada hewan buruan itu ada bekas anak panah lain atau jatuh di air maka tidak boleh dimakan. Sebab tidak diketahui anak panah mana yang membunuh hewan itu dan apakah dia mati karena anak panah atau karena tenggelam.

Jika menggunakan alat lain, Adi bin Hatim menuturkan bahwa dia bertanya tentang berburu menggunakan *al-mi'râdh* (tongkat, baik yang ujungnya tumpul ataupun lancip/tajam seperti tombak, lembing, dsb), lalu Rasul saw. bersabda:

«إِذَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلْ،
فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ»

Jika mengenai hewan buruan dengan bagian tajamnya maka makanlah. Jika mengenai dengan bagian tumpulnya dan mati maka itu adalah waqîdz, maka jangan engkau makan (HR al-Bukhari no. 5476 dan Muslim no. 1929).

Waqîdz[un] maknanya dipukul dengan keras. Artinya, hewan itu mati karena pukulan. Makna *bihaddihi* dijelaskan dalam lafal lain riwayat Muslim, yaitu *fakhazaqa* (lalu mengoyaknya).

Kedua, boleh berburu menggunakan anjing yang terlatih atau tidak terlatih. Dalam riwayat Adi bin Hatim dijelaskan kriteria atau sifat anjing terlatih itu, yaitu anjing itu hanya menangkap hewan buruan dan membawanya untuk tuannya, baik dalam keadaan hidup atau mati, dan anjing itu tidak memakan sebagian dari hewan buruan itu. Dalam hal ini ketika melepaskan anjing itu juga disyariatkan untuk membaca basmalah. Jika anjing itu tidak memakan sebagian dari hewan buruannya,

maka hewan buruan itu boleh dimakan. Jika anjing itu memakan sebagian darinya maka tidak boleh dimakan.

Adapun jika anjingnya tidak terlatih, jika hewan buruan yang dia dapat masih sempat disembelih, artinya masih didapati hidup lalu disembelih, maka boleh dimakan. Jika tidak maka haram.

Penggunaan hewan pemburu bukan hanya berlaku pada anjing, tetapi juga boleh hewan pemburu lainnya. Hal itu dinyatakan di dalam firman Allah SWT:

﴿قُلْ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

Katakanlah, "Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Makanlah dari apa yang dia tangkap untuk kalian dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)... "(TQS al-Maidah [5]: 4).

Berburu itu mencakup buruan air seperti ikan, mutiara, marjan, koral dan lainnya. Juga mencakup buruan darat yang halal termasuk burung.

Ketiga, Rasul saw. menyatakan bahwa hewan buruan yang didapat dari berburu dengan memenuhi ketentuan hukumnya maka boleh dimakan. Ijin untuk memakan hewan buruan itu menunjukkan bahwa hewan buruan itu menjadi milik orang yang berburu. Sebab kepemilikan adalah izin *Asy-Syâri'* untuk memanfaatkan suatu harta. Ini menunjukkan bahwa berburu itu menjadi sebab kepemilikan si pemburu atas hasil buruannya.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



NATO: ALIANSI JAHAT

Presiden Erdogan menyatakan: “Turki, karena posisi geografisnya, menempuh kebijakan luar negeri yang beragam. Termasuk kerjasama dengan NATO dalam kerangka prioritasnya sendiri. Tempat perlindungan yang disediakan NATO sangat penting bagi kami. Namun, yang jelas aliansi ini sedang dalam proses pembaruan.” (www.sabah.com.tr).

*** **

Komentar Erdogan tentang NATO ini disampaikan sebelum ia berangkat ke London untuk merayakan peringatan 70 tahun pendirian NATO—aliansi yang tidak konsisten. Eksistensi NATO ini sama sekali bukan rahasia bagi mereka yang melihat dan berpikir. Karena itu timbul pertanyaan, apakah Erdogan sendiri percaya dengan pernyataan yang dia buat tentang NATO? Apakah dia benar-benar percaya bahwa NATO melakukan misi tempat perlindungan (penyelamatan) dengan benar? Apakah Erdogan percaya atau tidak, ini tidak

akan mengaburkan eksistensi NATO dan tindakannya.

Sangat menyedihkan bahwa Turki adalah satu-satunya negara yang berpartisipasi dalam aliansi tentara Salib ini, seperti Barat dan Amerika. Dengan kata lain, Turki adalah satu-satunya negara yang penduduknya Muslim dan berpartisipasi dalam NATO. Meskipun 29 anggota NATO memiliki beberapa pembicaraan di antara mereka tentang keuntungannya sendiri, mereka menjadi sekutu langsung ketika urusannya terkait kaum Muslim dan konflik melawan Muslim. Sungguh kami mengetahui semua fakta ini melalui pengalaman di negara kami yang mereka hancurkan, dan bukan melalui buku-buku politik.

NATO adalah tentara aliansi tentara Salib yang terlibat dalam menyerang Afghanistan, Bosnia, Timur Tengah, Afrika dan Libya baru-baru ini. NATO bertanggung jawab atas jutaan kaum Muslim yang terbunuh dan terluka. Tempat perlindungan (penyelamatan) yang disebutkan oleh Erdogan hanya berlaku jika

memberikan keuntungan pada kaum kafir penjajah. Sungguh, membuat pernyataan bahwa NATO akan memberikan keamanan bagi kaum Muslim, menurut hemat kami, adalah penipuan dan demagogi. Padahal semua tahu bahwa kaum kafir penjajah, sebutan lain dari aliansi tentara Salib, tidak akan pernah menginginkan kebaikan bagi kaum Muslim.

Sejak menjadi anggota, Turki telah mendukung NATO di Afghanistan sebagai kekuatan internasional, di Bosnia sebagai kekuatan perdamaian dan di wilayah lain sebagai kekuatan militer. Lebih dari itu, NATO berperilaku seolah-olah “Turki adalah wilayah NATO”, dan Turki telah berpartisipasi dalam aliansi jahat. Sayangnya, Turki telah menjadi bagian dari rencana kotor kaum kafir penjajah. Perlu diketahui bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, itu mengarah pada penyesalan nantinya.

Dalam hal ini, apakah Anda akan membiarkan negeri kami dieksploitasi oleh NATO? Wahai para penguasa, apakah Anda masih ingin mendapatkan kebaikan dari jagal (pembantai) Anda? Apakah Anda masih akan berpartisipasi dalam aliansi jahat yang bertujuan untuk menindas kaum Muslim? Anda telah menjadi anggota NATO selama lebih dari 60 tahun, dan telah terlibat dalam semua kejahatannya. Bukankah ini telah membuat Anda kehilangan tidur Anda?

Apakah Anda masih belum juga menutup pangkalan-pangkalan yang Anda buka untuk NATO di negeri ini yang telah dialiri dengan darah kaum Muslim? Sampai kapan Anda akan terus menampung tentara pembantai di negeri kami?

Tidakkah Anda takut dengan peringatan dari Allah SWT (yang artinya): *Janganlah kalian cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kalian disentuh api neraka* (TQS Hud [11]: 113).

Sesungguhnya kaum kafir penjajah dan

Sejak menjadi anggota, Turki telah mendukung NATO di Afghanistan sebagai kekuatan internasional, di Bosnia sebagai kekuatan perdamaian dan di wilayah lain sebagai kekuatan militer. Lebih dari itu, NATO berperilaku seolah-olah “Turki adalah wilayah NATO”, dan Turki telah berpartisipasi dalam aliansi jahat. Sayangnya, Turki telah menjadi bagian dari rencana kotor kaum kafir penjajah. Perlu diketahui bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, itu mengarah pada penyesalan nantinya.

semua aliansi jahat, terutama Amerika, adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas semua kesedihan, air mata, dan pertumpahan darah di seluruh dunia. Karena itu sudah waktunya bagi Anda untuk melakukan perbuatan baik. Akhiri keanggotaan Anda di NATO. Singkirkan mereka dari pangkalan, negara dan tanah kami yang mereka gunakan sebagai latar belakangnya. Kami tidak ingin para penguasa memuliakan kaum kafir penjajah serta duduk bersama mereka di satu meja yang penuh dengan darah. Kami menginginkan seorang khalifah yang bijak, yang tidak setuju menumpahkan darah saudara-saudaranya; seorang khalifah yang membuat kaum kafir ketakutan dengan hegemoninya; seorang khalifah yang mencari kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah. Sungguh, sedikit pun tidak ada keraguan bahwa terwujudnya semua ini bukan hal yang sulit bagi Allah SWT. [Abdullah Imamoglu/Sumber: hizb-uttahrir.info, 12/12/2019.

SIFAT DAN KARAKTER PEMIMPIN PADA MASA KHILAFAH

Bagian 1

Sudah menjadi jamak, tatkala kampanye, baik pemilu kadal dan atau pilig, calon pemimpin menampilkan sifat dan karakter baik. Apakah itu tampilan natural maupun di-*boosting* oleh para buzzer nya. Dengan kata lain sifat dan karakternya dipoles sedemikian rupa sehingga terciptakan mempunyai sifat dan karakter yang baik. Peduli, melayani dan pro rakyat. Karakter dan sifat buruknya tertutup rapat-rapat. Kalaulah ada pihak yang menyampaikan fakta buruk karakter dan sifatnya langsung dibantai dan dibunuh karakternya di sosial media dan media mainstream yang dipunyai. Disampaikan sebagai pihak yang jahat dan penyebar *hoax*. Karena masifnya gempurannya, pihak yang secara jujur menyampaikan fakta yang terjadi akhirnya menjadi pihak yang tertuduh dan pesakitan. Akhirnya menjadi terbalik-balik. Yang baik kelihatan buruk. Yang buruk kelihatan baik. Antara yang baik dan yang buruk menjadi

samar karena banyak *hoax* yang berseliweran.

Di sisi lain, saat ini hampir semua pemimpin negeri ini membentuk tim khusus yang tugasnya untuk memoles penampilan ketika di publik. Mengambil gambar, membuat narasi propaganda baik dan membuat tim *buzzer* yang professional. Tujuannya hanya semata agar di mata publik atau rakyatnya ia tampak baik dan pro rakyat. Padahal faktanya ia jauh panggang dari api. Tugas tim ini, selain menyemburkan propaganda, juga menjadi tim yang akan menyerang dan menghabisi pihak-pihak yang memberikan penilaian atau kritik membangun. Mengkritik diartikan tidak setuju dan berseberangan dengan rezim. Pertanyaannya, perlukah adanya tim tersebut? Kalaupun perlu, sejauh mana tugas dan fungsinya sehingga proporsional, tidak membabi-buta membela pemimpin walau kadang ada yang salah, dan menyerang pihak-pihak yang mengkritisi setiap kebijakan pemimpin.

Pertanyaan menariknya, adakah tuntunan dalam Islam bagi para pemimpin terkait sifat dan karakternya? Sifat dan karakter seperti apa yang wajib dipunyai setiap pemimpin dalam Islam? Apakah sifat dan karakter tersebut polesan sewaktu menjabat ataukah itu sudah terbentuk sebelum jauh menjadi pejabat? Perlukah tim khusus untuk menampilkan dan menyampaikan kepada khalayak/rakyat bagaimana karakter dan sifat pemimpin?

Sungguh, Islam telah memberikan gambaran yang jelas tentang syarat-syarat sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Bukan hanya semata untuk konsumsi pencitraan ketika menjabat, namun sifat dan karakter yang telah melekat menjadi satu dengan tingkah-lakunya sejak awal. Sifat dan karakter baik itu sudah diketahui oleh khalayak ramai. Seperti apa sifat dan karakter para pemimpin dalam Islam dijelaskan dengan gamblang dalam buku *The Great Leader of*

Umar bin Al-Khathab. Kisah kehidupan dan kepimpinan khalifah kedua. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa para gubernur pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab wajib mempunyai akidah yang benar, mengakui dan senantiasa terikat dengan hukum syariah, meyakini takdir Allah, memiliki kemampuan memimpin masyarakat, jujur, menjadi contoh masyarakat, pemberani, zuhud, senang berkorban, rendah hati, mau menerima nasihat orang lain, bijaksana, sabar, bercita-cita tinggi, memiliki keteguhan hati, memiliki keinginan yang kuat, adil, mampu menyelesaikan permasalahan dan lain-lain. Uraian sifat dan karakter di atas adalah sebagai berikut:

1. *Zuhud.*

Di antara para gubernur pada masa Umar yang terkenal kezuhudannya adalah Said bin Amir bin Hisyam, Umair bin Saad, Salman al-Farisi, Abu Ubaidah al-Jarrah dan Abu Musa al-Asy'ari. Oleh karena itu sering para istri para gubernur tersebut mengeluhkan kezuhudan para suami mereka. Di antara istri-istri mereka yang mengeluh adalah istrinya Muadz. Suatu saat Umar mengutus Muadz untuk mengumpulkan zakat dari beberapa suku. Dia membagi semua zakat yang terkumpul kepada orang-orang yang berhak dari suku-suku tersebut. Setelah selesai, Dia kembali ke majelisnya dengan budak yang pergi bersamanya. Kemudian ia pulang. Sesampainya di rumah istrinya bertanya, "Dimana uang yang kamu dapatkan dari pekerjaanmu?" Muadz menjawab, "Tadi, Saya diawasi oleh pengawas." Istrinya berkata, "Bukankah kamu adalah seorang yang dipercaya pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar? Mengapa Umar mengirimkan bersamamu pengawas?" Istrinya kemudian menceritakan kejadian ini kepada para wanita yang lain dan mengeluhkan kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra.

Mengetahui hal tersebut Khalifah Umar al-Faruq memanggil Muadz dan bertanya kepadanya, "Apakah saya mengirimkan bersamamu seorang pengawas?" Muadz menjawab, "Saya tidak memiliki jawaban kecuali itu." Mendengar jawabannya, Umar bin Khathab kemudian tertawa dan memberikan kepadanya sesuatu. Khalifah Umar al-Faruq berkata kepadanya, "Berikan ini kepada istrimu supaya dia lega."¹

Apa yang dilakukan oleh Muadz sangat luar biasa. Zuhud terhadap harta dunia. Tidak silau dengan pangkat dan jabatan untuk memperkaya diri dan keluarganya. Jabatan yang menjadi amanahnya dikerjakan dengan baik. Dengan posisi yang dipegang, Muadz sangat mudah untuk membuat laporan keuangan palsu, atau membuat rekayasa kegiatan fiktif atau membuat kegiatan mengada-ada. Yang penting bisa mendapatkan uang atau yang lainnya. Namun, itu semua tidak ia lakukan. Bahkan gaji sebagai haknya karena melakukan pekerjaan tidak diambil langsung sebelum Khalifah sendiri yang memberikannya. Ia khawatir dan hati-hati atas uang yang dia pegang. Jangan sampai akhirnya ia mengambil hak yang memang itu bukan haknya.

Kondisi ini berbeda 180 derajat dengan para pemimpin sekarang. Mereka justru tamak pada harta dan jabatan. Amanah jabatan dipersepsikan sebagai peluang dan kesempatan untuk memperkaya diri dan keluarga. Aji mumpung diberlakukan. Mumpung menjabat dan berkuasa, mereka berpikir dan merencanakan untuk memperkaya diri dan keluarga. Masa bodoh halal-haram. Semua dilabrak. Wajar jika banyak sekali pejabat/pimpinan yang tertangkap oleh KPK karena kasus korupsi dan jual-beli jabatan di lingkungan pekerjaannya. Belum lagi gaya hidup para istri dan keluarga yang tampak di sosial media. Ikut dalam rombongan ketika di luar negeri. Belanja ini dan itu. Semuanya

Tarikh

barang-barang mewah lagi mahal. Ini menunjukkan bahwa para pemimpin tidak ada sifat dan karakter zuhud.

2. *Rendah hati.*

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., para pemimpin sangat terkenal dengan sifat rendah hati mereka. Jika ada seseorang yang datang ke wilayah mereka, dia tidak bisa membedakan antara gubernur dan orang biasa. Pakaian, rumah dan kendaraan mereka sama dengan masyarakat pada umumnya. Mereka tidak memiliki kelebihan yang membedakan dengan rakyatnya.

Pasukan Rumawi pernah mengutus dua orang untuk melakukan perundingan dengan Abu Ubaidah. Sesampainya mereka berdua ke kantor Abu Ubaidah, mereka tidak dapat membedakan antara Abu Ubaidah dan yang lain. Mereka juga tidak tahu apakah Abu Ubaidah berada di tempat tersebut atau tidak. Mereka juga tidak percaya kalau tempat tersebut adalah tempat Gubernur Abu Ubaidah.

Kedua utusan tersebut kemudian berkata, “Wahai orang-orang Arab, di mana pemimpin kalian?” Mereka menjawab, “Itu dia orangnya.” Kedua utusan Romawi melihat Abu Ubaidah sedang menyandarkan badannya ke busur panah dan di tengahnya ada anak panah. Anak panah tersebut sedang dibolak-balikkan oleh Abu Ubaidah. Mereka bertanya kepada Abu Ubaidah, “Apakah betul kamu pemimpin mereka?” Abu Ubaidah menjawab, “Ya, betul.” Mereka bertanya lagi, “Mengapa kamu duduk di atas bantal? Mengapa kamu tidak duduk di atas bantal? Apakah memang seperti ini keadaanmu di sisi-Nya? Apakah Dia melarang kamu untuk menikmati sesuatu yang bagus?”

Abu Ubaidah menjawab, “Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Setiap pagi saya tidak memiliki dinar ataupun dirham. Saya hanya memiliki kuda, senjata dan pedang.

Ketika saya membutuhkan sesuatu untuk menafkahi keluargaku pada sore hari, saya meminjam kepada temanku (Muadz bin Jabal). Dia bersedia untuk memberikan pinjaman kepadaku. Seandainya aku memiliki bantal atau permadani, teman-teman dan para sahabatku tidak boleh duduk di atasnya. Saya hanya akan membolehkan saudaraku seiman untuk duduk di atasnya. Barangkali di sisi Allah kedudukannya lebih terhormat daripada kami. Kami adalah hamba Allah yang hanya berjalan di atas tanah. Hal ini tidak mengurangi derajat kami di sisi-Nya. Bahkan Dia akan memberikan pahala yang besar kepada kami dan mengangkat derajat kami di sisi-Nya. Walaupun seperti itu, kami tetap merendahkan diri di hadapan-Nya.”²

Kondisi ini kontras dengan para pimpinan saat ini. Mereka seolah-olah gila jabatan. Minta pengawalan super ketat. Kalau perlu sepanjang mungkin iring-iringan pengawalnya. Mobil-mobil, rumah-rumah dan pakaian-pakaian mereka sungguh sangat kontras dengan kondisi rakyatnya. Mereka hidup dengan glamour dan bergelimang harta. Sebaliknya, rakyatnya, untuk sekedar makan memenuhi nilai gizi yang layak setiap hari saja sangat susah. Rumah rakyat seadanya. Sebaliknya, rumah para pemimpinnya besar lagi mewah dengan pagar rumah menjulang tinggi. Seolah-olah ingin memisahkan diri dengan lingkungan sekitarnya. Semua orang pun tahu bahwa dia pejabat jika berada dalam kerumunan orang. Selain karena pengawalan yang ketat, juga tampak dari pakaian dan kendaraannya. Wajar jika mereka cinta dunia namun takut mati. Sungguh jauh berbeda dengan para pemimpin dalam Kekhilafahan Islam.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan*, jilid II, halaman 53

² *Al-Azdi, Futih Asy-Syam*, halaman 122-123

AGENDA UMAT



Pasuruan. Sabtu [14/12], bertempat di Madin "Nurul Mas'ud" Pasuruan terselenggara acara Multaqa Ulama Aswaja. Shahibul Fadhilah Al-Mukarram Gus Rohibni menyampaikan bahwa umat Islam saat ini butuh pelindung yang akan mampu melindungi kemuliaan Islam dan kaum Muslim dari berbagai bentuk pelecehan dan penghinaan.



Bogor. Ahad [8/12], bertempat di Majelis Al Kautsar, Bogor diadakan Multaqa Ulama Aswaja. Multaqa Ulama Aswaja kali ini mengambil tema "Siap Bela Nabi dari Penistaan." Ustad Gunung mengungkapkan bahwa penghinaan terhadap Rasulullah saw. sudah berulang terjadi. Karena itu perlu hukuman tegas bagi para penista.



Probolinggo. Acara Multaqa Ulama Aswaja Probolinggo di Aula Majelis Tafsir Qur'an KH. Muhammad Zaini Probolinggo, Rabu [11/12] berlangsung dengan dihadiri ulama dan tokoh masyarakat serta jamaah.



Sidoarjo. Rabu [11/12], berkumpul dalam Multaqa Ulama Aswaja puluhan Ulama di PP. Ulin Nuha Sidoarjo dalam suasana prihatin memendam marah. Mereka marah karena adanya penistaan terhadap Sang Junjungan dan Panutan, yaitu Nabi Muhammad saw., sementara si penista bisa melenggang bebas di negeri yang mayoritas Muslim ini.



Garut. Ahad [8/12] Forum Ulama Aswaja Kabupaten Garut mengadakan acara Multaqa Ulama Ahlussunah Waljamaah Kabupaten Garut di Pondok Pesantren Badahiyah 2 Sinaraja, Cisarupan – Garut. Mereka mengajak para ulama di kabupaten Garut untuk bersatu dan berjuang bersama demi tegaknya syariah Islam secara kaffah.



Sumedang. Lebih dari 300 ulama Aswaja berkumpul di sebuah pesantren di Tanjungsari Sumedang pada Hari Sabtu [14/12], dalam acara Kopdarnas Komunitas Pecinta Batu Cincin (Kopbatin). Para ulama bersama anggota Kopbatin mengokohkan tekad bersama untuk melakukan pembelaan terhadap Rasulullah yang direndahkan oleh beberapa kalangan yang saat ini tengah hangat menjadi perbincangan. Kegiatan ini diawali dengan ramah-tamah sambil minum kopi bersama, penyematan akik kepada para ulama, pengalungan syal Kopbatin, dan diakhiri dengan pelaksanaan Multaqa Ulama.



Pacitan. Sabtu [16/12], lebih dari 150 hadir dalam Pengajian Akbar Maulid Nabi 1441 Hijrah di Masjid Al Mubarakah, Pacitan. Maulid kali ini mengusung tema Cinta Nabi, Cinta Syariah.



Mojokerto. Kajian Dwi Mingguan kembali digelar di Ponpes Al Mukhlisin di akhir pekan [23/11]. Kali ini sekaligus dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw.



Sumenep. Jalsah Ammah di penghujung tahun 2019 berlangsung khidmat di Masjid al-Ikhlash Sumenep Madura. Puluhan Tokoh, Ulama, Asatidz, dan masyarakat sekitar menghadiri acara ini. Acara dimulai dengan pembukaan oleh pengurus DKM Al-Ikhlash Ustadz Sofyan.



Jakarta. Ahad [15/12], tak kurang dari 30 undangan yang terdiri dari para ulama, asatidz dan tokoh masyarakat bertemu di Ma'had Daarul Mawahid Srengseng, Jakarta Barat. Mereka menghadiri Multaqa Ulama Aswaja yang digagas oleh Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jakarta Barat. KH Shoffar Mawardi sebagai Khuwaidimul Ma'had Daarul Mawahid mengajak kepada semua yang hadir untuk melaksanakan syariah Allah SWT secara kaffah.